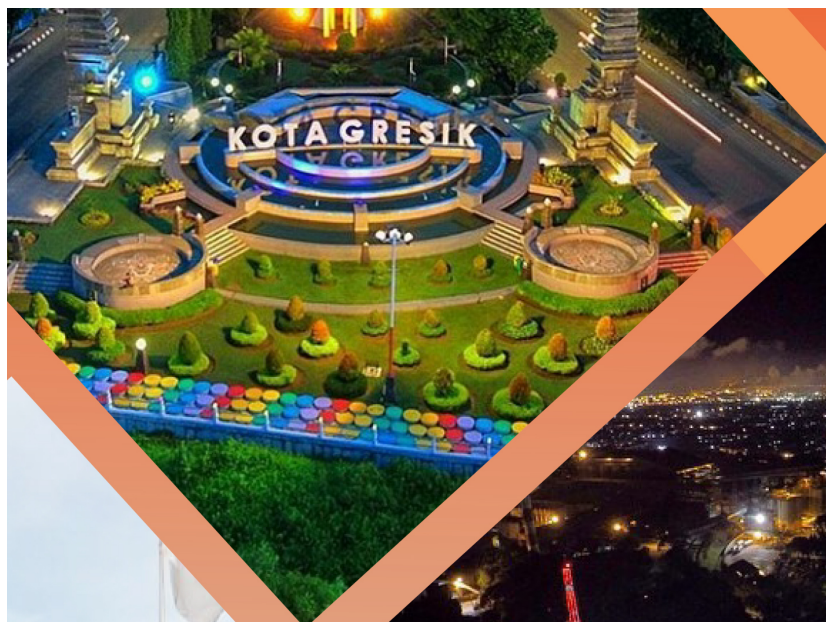




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH Akhir Tahun Anggaran 2020

**Pemerintah Kabupaten Gresik
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka selaku Kepala Daerah menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD sebelum 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA
- BAB III : HASIL PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
- BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
- BAB V : PENUTUP

Berdasarkan tolok ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2020 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah, dan menguatkan Gresik yang telah baik untuk semakin baik, berdikari dalam perekonomian dan sejahtera.

BUPATI GRESIK

H. FANDI AHMAD YANI, SE

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Dasa Hukum	I.1
1.1.1 Pembentukan Daerah	I.1
1.1.2 Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	I.1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	I.7
1.3 Data Umum Daerah	I.8
1.3.1 Data Geografis Wilayah	I.8
1.3.2 Jumlah Penduduk	I.31
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	I.33
1.3.4 Jumlah PNS	I.34
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I.44
1.3.5.1 Pendapatan Asli Daerah	I.45
1.3.5.2 Dana Perimbangan	I.60
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I.94
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II.1
2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan	II.2
2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah	II.3
2.1.1.1 Kebijakan Perubahan Hasil Pajak Daerah	II.3
2.1.1.2 Retribusi Daerah	II.5
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	II.7
2.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	II.8
2.1.2 Dana Perimbangan	II.8
2.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	II.9
2.1.2.2 Dana Alokasi Umum	II.10
2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus	II.10
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II.13
2.2 Kebijakan Perubahan Belanja	II.15
2.2.1 Belanja Tidak Langsung	II.15
2.2.2 Belanja Langsung	II.16

2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah	II.16
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
 YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III.3
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	III.3
3.1.1 Nilai Peduli HAM	III.3
3.1.2 Indeks Reformasi Birokrasi	III.4
3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	III.7
3.1.4 Laju Inflasi	III.9
3.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III.12
3.1.6 Tingkat Kemiskinan	III.14
3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia	III.16
3.1.8 Indeks Pembangunan Gender	III.17
3.2 Capaian Indikator Sasaran RPJMD	III.18
3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	III.18
3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	III.26
3.2.3 Urusan Pilihan	III.40
3.2.4 Urusan Penunjang	III.44
3.3 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	III.55
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
 DAN PENUGASAN	IV.1
4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan	IV.1
4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya	IV.1
4.1.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya	IV.10
BAB V PENUTUP	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik	I.8
Tabel 1.2	Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)	I.13
Tabel 1.3	Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (ha)	I.14
Tabel 1.4	Data Waduk di Kabupaten Gresik	I.17
Tabel 1.5	Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik	I.24
Tabel 1.6	Kawasan Rawan Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit	I.25
Tabel 1.7	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	I.26
Tabel 1.8	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik	I.27
Tabel 1.9	Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik	I.28
Tabel 1.10	Tabel Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2020	I.30
Tabel 1.11	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Desember 2020	I.31
Tabel 1.12	Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Jumlah Kepala Keluarga Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Bulan Desember 2020	I.32
Tabel 1.13	Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2020	I.33
Tabel 1.14	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019 dan 2020	I.33
Tabel 1.15	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Golongan Per 31 Desember 2020	I.35
Tabel 1.16	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2020	I.37
Tabel 1.17	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan	I.39
Tabel 1.18	Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Per 31 Desember 2020	I.42
Tabel 1.19	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I.44

Tabel 1.20 Hasil Pajak Daerah Tahun 2020	I.46
Tabel 1.21 Retribusi Daerah Tahun 2020	I.50
Tabel 1.22 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	I.52
Tabel 1.23 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	I.54
Tabel 1.24 Dana Perimbangan	I.61
Tabel 1.25 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	I.62
Tabel 1.26 Dana Alokasi Umum	I.63
Tabel 1.27 Dana Alokasi Khusus	I.64
Tabel 1.28 Pendapatan Hibah	I.67
Tabel 1.29 Tabel Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020	I.95
Tabel 1.30 Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2020	I.96
Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020	II.3
Tabel 2.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah	II.3
Tabel 2.3 Perubahan Hasil Pajak Daerah Tahun 2020	II.4
Tabel 2.4 Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2020	II.6
Tabel 2.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2020	II.7
Tabel 2.6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2020	II.8
Tabel 2.7 Dana Perimbangan	II.9
Tabel 2.8 Dana Alokasi Umum	II.10
Tabel 2.9 Dana Alokasi Khusus	II.11
Tabel 2.10 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II.14
Tabel 2.11 Belanja Tidak Langsung	II.15
Tabel 2.12 Belanja Langsung	II.16
Tabel 2.13 Pembiayaan Daerah	II.17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	III.3
Tabel 3.2 Komponen self assement Indeks Reformasi Birokrasi	III.5
Tabel 3.3 Kategori Nilai Hasil Assement Indeks Reformasi Birokrasi	III.6
Tabel 3.4 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2020	III.14
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2018 s/d 2020	III.18
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2018 s/d 2020	III.20
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum	

Tahun 2018 s/d 2020	III.21
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 s/d 2020	III.22
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 s/d 2020	III.24
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2018 s/d 2020	III.25
Tabel 3.11 Capaian Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 s/d 2020	III.26
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 s/d 2020	III.27
Tabel 3.13 Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2018 s/d 2020	III.28
Tabel 3.14 Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 s/d 2020	III.29
Tabel 3.15 Capaian Sasaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 s/d 2020	III.30
Tabel 3.16 Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 s/d 2019	III.31
Tabel 3.17 Capaian Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 s/d 2020	III.32
Tabel 3.18 Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2018 s/d 2020	III.33
Tabel 3.19 Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 s/d 2020	III.34
Tabel 3.20 Capaian Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 s/d 2020	III.35
Tabel 3.21 Capaian Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2018 s/d 2020	III.36
Tabel 3.22 Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2020	III.36
Tabel 3.23 Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 s/d 2020	III.37
Tabel 3.24 Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2018 s/d 2020	III.38
Tabel 3.25 Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan	

Tahun 2018 s/d 2020	III.39
Tabel 3.26 Capaian Sasaran Urusan Kearsipan Tahun 2018 s/d 2020	III.40
Tabel 3.27 Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan	
Tahun 2018 s/d 2020	III.41
Tabel 3.28 Capaian Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2016 s/d 2020	III.41
Tabel 3.29 Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2018 s/d 2020	III.42
Tabel 3.30 Capaian Sasaran Urusan Perdagangan Tahun 2018 s/d 2020	III.43
Tabel 3.31 Capaian Sasaran Urusan Perindustrian Tahun 2018 s/d 2020	III.44
Tabel 3.32 Capaian Sasaran Urusan Sekretariat Tahun 2018 s/d 2020	III.45
Tabel 3.33 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Instansi Daerah	
Kabupaten Gresik Tahun 2019 - 2020	III.46
Tabel 3.34 Capaian Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2018 s/d 2020	III.48
Tabel 3.35 Capaian Sasaran Urusan Keuangan Tahun 2018 s/d 2020	III.50
Tabel 3.36 Capaian Sasaran Urusan Inspektorat Tahun 2018 s/d 2020	III.51
Tabel 3.37 Capaian Sasaran Urusan Kepegawaian Serta	
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 s/d 2020	III.52
Tabel 3.38 Laporan Kinerja Pencegahan Dan/ Atau Penanganan	
Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Gresik	III.56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Ketinggian Kabupaten Gresik	I.12
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2015 sd 2019	III.8
Gambar 3.2	Grafik Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 sd 2020	III.11
Gambar 3.3	Laju Inflasi Kabupaten Gresik	III.12
Gambar 3.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik Tahun 2010-2020	III.15
Gambar 3.5	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kab.Gresik Tahun 2016 - 2020	III.16
Gambar 3.6	IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik 2012 – 2020	III.17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1.1.1 Pembentukan Daerah

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

1.1.2 Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2030;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2013;
37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2020;
40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2020;

41. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 13);
43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Gresik;
44. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Gresik;

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, visi yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

Misi ke-2

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

Misi ke-3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Misi ke-4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Jawa;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; serta
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112⁰ sampai 113⁰ Bujur Timur dan 7⁰ sampai 8⁰ Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh Indonesia adalah 1.191,25 km² (119.125 ha), namun berdasarkan penampakan citra satelit luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 125.262,24 ha. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan bentang alam akibat proses reklamasi, sedimentasi dan abrasi pantai.

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

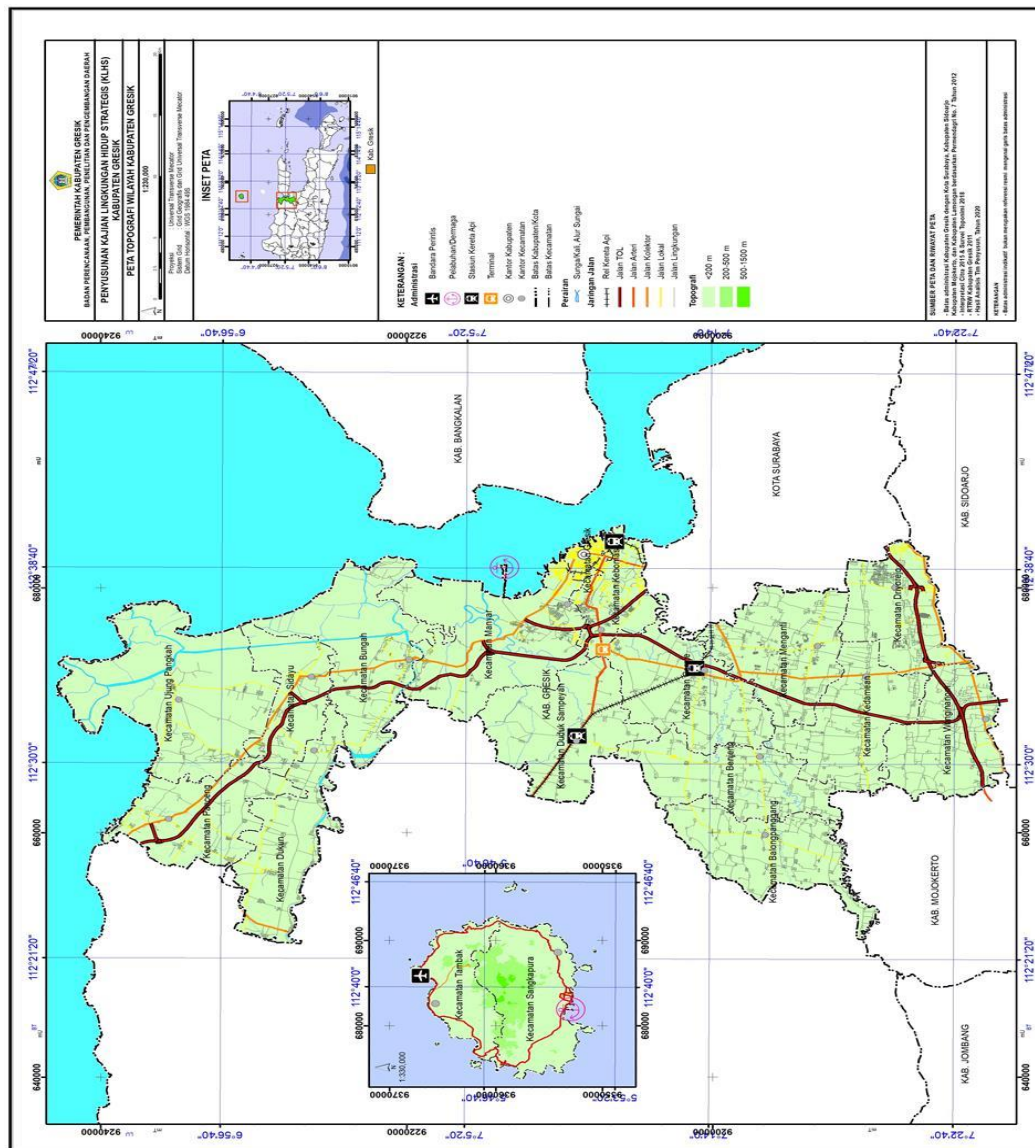
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Balongpanggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor,	6.485,83

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
			Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Mungugebang, Klampok, Kedungsekar, Sironoyo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranpelo, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	6.229,43
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Wido, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	8.538,21
4	Cerme	26	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	7.157,53
5	Driyorejo	17	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumpat, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	5.506,83
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	7.716,89
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung,	6.400,17

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
			Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan	708,40
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan	3.418,99
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	6.703,40
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejanggan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	10.252,51
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palembang, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	7.002,92
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	6.176,71
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari,	12.690,65

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
			Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambu Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	4.452,01
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongubug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	7.279,88
17	Ujungpangkah	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangan, Glatik, Sekapuk	12.337,54
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebanwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	6.204,73
	Jumlah	358		125.262,64

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan dengan tanah terluas di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean dengan luas wilayah sebesar 12.690,65 ha, setelah itu Kecamatan Ujungpangkah dengan luas wilayah sebesar 12.337,54 ha. Sedangkan untuk Kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Gresik dengan luas wilayah sebesar 708,40 ha.



Sumber data: RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 1.1
Peta Ketinggian Kabupaten Gresik

Berdasarkan kondisi topografis, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.

- b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit 1.072,23Ha atau sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kelerengan beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor.

Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan

secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

1. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

- a. Kali Mas;
- b. Kali Bengawan Solo;
- c. Kali Lewean;
- d. Kali Lamongan;
- e. Kali Benem;
- f. Kali Corong;
- g. Kali Mentani;
- h. Kali Wangen;
- i. Kali Bedahan;
- j. Kali Mantup;
- k. Kali Medangan;
- l. Kali Ceper;
- m. Kali Mireng;
- n. Kali Wadak;
- o. Kali Gladakgede;
- p. Kali Tambak;
- q. Kali Baturata;
- r. Kali Raya;
- s. Kali Baturaya;
- t. Kali Kope;
- u. Kali Deje;
- v. Kali Laok;

- w. Kali Kebonagung;
- x. Kali Grunjungan;
- y. Kali Lancabur; dan
- z. Kali Legundi.

2. Danau/Telaga

Danau/telaga adalah suatu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan dan berbentuk cekungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau dan/atau Waduk, Danau/Telaga adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Berikut ini danau/telaga yang terdapat di Kabupaten Gresik:

- a. Telaga Dowo pada Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas;
- b. Telaga Ngipik pada Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas;
- c. Danau Kastoba pada Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

3. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok

persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik

Tabel 1.4
Data Waduk di Kabupaten Gresik

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Waduk	Gresik	0,39
2	Waduk Lowayu	Dukun	0,24
3	Waduk Sukodono	Panceng	25,60
4	Waduk	Kebomas	0,19
5	Waduk	Kebomas	0,00
6	Waduk	Kebomas	1,23
7	Waduk Cerme Kidul	Cerme	1,88
8	Waduk	Sidayu	0,21
9	Waduk Siraman	Dukun	5,28
10	Waduk Rambit	Sidayu	2,38
11	Waduk Palem Watu	Menganti	1,09
12	Waduk Belahan Rejo	Kedamean	2,24
13	Waduk Mojokuwu	Kedamean	1,33
14	Waduk Katimoho	Kedamean	2,43
15	Waduk Tulung	Kedamean	0,50
16	Waduk Tulung	Kedamean	1,59
17	Waduk Ngepung I	Kedamean	6,74
18	Waduk Kedamean	Kedamean	6,94
19	Waduk Randupukah/Gadung	Driyorejo	2,68
20	Waduk Tanjung	Kedamean	2,67
21	Waduk	Kedamean	0,50
22	Waduk Sekar Putih	Balongpanggang	2,77
23	Waduk Gluran Ploso	Benjeng	1,84
24	Waduk Balongpanggang	Balongpanggang	1,62
25	Waduk Gridi	Balongpanggang	8,27
26	Waduk Kedung Jati	Balongpanggang	1,66
27	Waduk	Cerme	0,39
28	Waduk Ngabetan	Cerme	12,27
29	Waduk	Benjeng	0,26
30	Waduk Mentaras DS	Dukun	7,33
31	Waduk Joho	Dukun	19,28
32	Waduk Ketenan II	Panceng	2,63
33	Waduk Bunder	Kebomas	14,00
34	Waduk Sumari	Duduksampeyan	5,21
35	Waduk Lowayu	Dukun	65,05
36	Waduk Mentaras	Dukun	12,32
37	Waduk Mentaras	Dukun	16,71
38	Waduk Kedung Sumber	Balongpanggang	2,07
39	Waduk Balong Jrambah (Kedamean II)	Kedamean	5,21
40	Waduk Mojosarirejo	Driyorejo	2,17
41	Waduk Gedang Kulud	Duduksampeyan	55,20
42	Waduk Gredeg	Duduksampeyan	10,07
43	Waduk Pundutrate II	Benjeng	5,86
44	Waduk Banter	Benjeng	7,18
45	Waduk Ngasin	Balongpanggang	10,04
46	Waduk Bunder	Kebomas	75,67

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
47	Waduk Juwet	Balongpanggang	7,00
48	Waduk Doho Agung	Balongpanggang	6,25
49	Waduk Tenggor	Balongpanggang	3,62
50	Waduk Gadel	Balongpanggang	8,11
51	Waduk Gogor	Balongpanggang	3,45
52	Waduk Gogor	Balongpanggang	15,78
53	Waduk Bongsokulon	Menganti	0,50
54	Waduk Randu Padangan	Menganti	2,18
55	Waduk Bongso Kulon	Menganti	0,50
56	Waduk Hendro Sari I	Menganti	1,06
57	Waduk Pengalangan	Menganti	2,73
58	Waduk Mojotengah	Menganti	1,78
59	Waduk Pakupari	Menganti	2,24
60	Waduk Pacuh	Balongpanggang	11,21
61	Waduk Turirejo	Kedamean	2,64
62	Waduk Wedoro	Driyorejo	5,29
63	Waduk Tenaru	Driyorejo	1,26
64	Waduk Doro (Ngepung II)	Kedamean	7,09
65	Waduk Sooko	Wringinanom	2,11
66	Kastoba	Sangkapura	15,65
67	Kastoba	Tambak	17,50
68	Waduk	Dukun	0,01
69	Waduk Sumber Barat	Balongpanggang	3,41
70	Waduk Babatan	Balongpanggang	2,76
71	Waduk Ngampel	Balongpanggang	2,15
72	Waduk Tanah Landean	Balongpanggang	2,58
73	Waduk Jogodalu	Benjeng	27,60
74	Waduk	Bungah	1,18
75	Waduk Wonosari	Benjeng	13,53
76	Waduk Grogol	Bungah	1,29
77	Waduk Suci	Manyar	6,95
78	Waduk	Balongpanggang	473,98
79	Waduk Pinggir	Balongpanggang	13,64
80	Waduk Bangle	Balongpanggang	235,92
81	Waduk Bangle	Balongpanggang	213,57
82	Waduk Wareng	Balongpanggang	336,07
83	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	225,92
84	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	50,90
85	Waduk Karangwungu	Balongpanggang	225,92
86	Waduk Bandung Sekaran	Balongpanggang	189,76
87	Waduk Jombang Delik	Balongpanggang	90,93
88	Waduk Brangkal I	Balongpanggang	27,37
89	Waduk Brangkal II	Balongpanggang	27,37
90	Waduk Pundutrate	Benjeng	144,21
91	Waduk Sekargeneng	Benjeng	76,52
92	Waduk Balongmojo	Benjeng	125,38
93	Waduk Raci Ndlanyar	Bungah	211,87
94	Waduk Raci Wetan	Bungah	78,48
95	Waduk	Bungah	211,87
96	Waduk Pengundan	Bungah	128,79
97	Waduk Kemangi	Bungah	128,79
98	Waduk Melirang	Bungah	12,52
99	Waduk Sidomukti	Bungah	47,91
100	Waduk	Bungah	74,19
101	Waduk Mojopurno Gede dan Mojopurno Wetan	Bungah	149,63
102	Waduk Abar-Abar	Bungah	38,86

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
103	Waduk	Bungah	83,68
104	Waduk Kisik	Bungah	238,93
105	Waduk Indro Delik	Bungah	100,28
106	Waduk Cerme Lor	Cerme	54,61
107	Waduk	Cerme	54,61
108	Waduk	Cerme	115,07
109	Waduk Cagak Agung	Cerme	115,07
110	Waduk Karangan	Cerme	328,77
111	Waduk Kambingan	Cerme	328,77
112	Waduk Wedani II	Cerme	153,28
113	Waduk Wedani I	Cerme	153,28
114	Waduk Kandangan	Cerme	324,24
115	Waduk Amburan	Cerme	324,24
116	Waduk Iker-Iker Geger	Cerme	149,03
117	Waduk Betting	Cerme	141,02
118	Waduk Telapak I	Driyorejo	660,12
119	Waduk Telapak II	Driyorejo	660,12
120	Waduk Randegan	Driyorejo	660,12
121	Waduk Radengan Sari	Driyorejo	660,12
122	Waduk Anom	Driyorejo	556,17
123	Waduk Banjaran	Driyorejo	105,18
124	Waduk Gunung Daten	Driyorejo	293,78
125	Waduk Kesamben Wetan	Driyorejo	281,98
126	Waduk Kliteh	Driyorejo	660,12
127	Waduk Petiken Barat	Driyorejo	321,77
128	Waduk	Driyorejo	660,12
129	Waduk Petiken Timur	Driyorejo	321,77
130	Waduk Mulung	Driyorejo	104,23
131	Waduk Pandanan	Duduksampeyan	74,77
132	Waduk Tumapel	Duduksampeyan	175,74
133	Waduk Kali Ombo	Duduksampeyan	367,31
134	Waduk Bulangan	Dukun	27,80
135	Waduk Proliman	Dukun	102,52
136	Waduk Mojo Petung	Dukun	219,12
137	Waduk Mojo Petung	Dukun	2,76
138	Waduk Sombo Gunung	Dukun	49,04
139	Waduk Kedanyang	Kebomas	178,60
140	Waduk Gading Sidoharjo	Kedamean	511,22
141	Waduk Slempit	Kedamean	624,21
142	Waduk Lingsir	Kedamean	624,21
143	Waduk Balekambang	Kedamean	419,77
144	Waduk Hendro Sari II	Menganti	325,02
145	Waduk Kepatihan	Menganti	27,40
146	Waduk Boteng	Menganti	14,69
147	Waduk Pranti	Menganti	218,97
148	Waduk Wonoayu ceper	Menganti	214,07
149	Waduk Menganti	Menganti	443,40
150	Waduk Songgat	Menganti	454,57
151	Waduk Hulaan	Menganti	490,01
152	Waduk Setro	Menganti	173,71
153	Waduk Sido Wungu	Menganti	490,01
154	Waduk Pengampon II	Menganti	207,66
155	Waduk Pengampon I	Menganti	207,66
156	Waduk Labankulon III	Menganti	377,53
157	Waduk Labankulon II	Menganti	377,53
158	Waduk Labankulon I	Menganti	377,53
159	Waduk Grogol	Menganti	377,53

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
160	Waduk Laban Wetan	Menganti	377,53
161	Waduk Delegan	Panceng	26,18
162	Waduk Campurejo	Panceng	70,46
163	Waduk Ketanen I	Panceng	56,71
164	Waduk Pantenan	Panceng	248,70
165	Waduk Sukodono	Panceng	639,02
166	Waduk Doudo	Panceng	58,97
167	Waduk Wotan	Panceng	50,69
168	Waduk	Panceng	7,85
169	Waduk Petung II	Panceng	92,33
170	Waduk Petung I	Panceng	92,33
171	Waduk Wedeng	Sidayu	102,55
172	Waduk Sukorejo	Sidayu	87,97
173	Waduk Ngawen IV	Sidayu	134,07
174	Waduk Ngawen II	Sidayu	134,07
175	Waduk Ngawen I	Sidayu	134,07
176	Waduk Ngawen III	Sidayu	134,07
177	Waduk Rambit	Ujungpangkah	147,57
178	Waduk Gosari	Ujungpangkah	242,63
179	Waduk Ketapang	Ujungpangkah	122,50
180	Waduk Glatik	Ujungpangkah	158,58
181	Waduk Glatik	Ujungpangkah	28,87
182	Waduk Bolo	Ujungpangkah	65,63
183	Waduk Kesamben Kulon	Wringinanom	19,15
184	Waduk Sembung	Wringinanom	192,43
185	Waduk Raci Kulon	Sidayu	112,33
186	Waduk Sekargeneng	Cerme	148,33
187	Waduk Banjarsari	Manyar	259,23
188	Telaga Dowo	Manyar	1,23
189	Telaga Ngipik	Manyar	12,50
190	Telaga Ngipik	Manyar	6,44
191	Telaga Ngipik	Gresik	4,13
192	Telaga Ngipik	Kebomas	15,54
193	Telaga Dowo	Kebomas	5,36

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Arahan pengembangan wilayah sungai kabupaten termasuk waduk dan embung, meliputi:

- Menambah penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau, dengan dan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada;
- Melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui kali surabaya dan kali tengah yang merupakan bagian dari das brantas;
- Melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui kali lamong dengan wilayah pelayanan gresik dan lamongan yang merupakan bagian dari das bengawan solo; dan

- d. Mengoptimalkan waduk-waduk atau embung di kabupaten Gresik yang berjumlah 100.

Pemutakhiran rencana pola ruang kabupaten disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang provinsi dan nasional. Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:

1. Rencana pola ruang kawasan lindung yang mencakup:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - c. Kawasan bergambut; dan
 - d. Kawasan resapan air;

2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:

- a. Sempadan pantai;

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan luas kurang lebih sebesar 1,72 Ha pada Kecamatan Kebomas. Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Gresik terdapat di sepanjang pantai yang melalui Pulau Bawean, Kecamatan Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas.

- b. Sempadan sungai

Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul dengan luas kurang lebih 1.318,42 Ha pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Ujungpangkah

c. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk memiliki luas kurang lebih sebesar 49,41 Ha pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar meliputi:

- 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi air muka tertinggi yang pernah terjadi;
- 2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau/waduk.

Adapun rencana pemantapan kawasan sempadan waduk diatas antara lain:

- 1) Pengendalian kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan sekitar danau/waduk dan mata air agar tidak mengganggu fungsi danau dan mata air
- 2) Pelarangan kegiatan budidaya baru di kawasan sekitar danau/waduk dan mata air
- 3) Pengembalian fungsi lindung kawasan sekitar danau/waduk dan mata air

3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi:

- a. Kawasan suaka alam;
- b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
- d. Cagar alam dan cagar alam laut;
- e. Kawasan pantai berhutan bakau;
- f. Taman nasional dan taman nasional laut;
- g. Taman hutan raya;
- h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

4. Kawasan rawan bencana alam, meliputi:

- a. Kawasan rawan tanah longsor; dan
- b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.

5. Kawasan lindung geologi, meliputi:

- a. Kawasan cagar alam geologi; dan

- b. Kawasan rawan bencana alam geologidan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- 6. Kawasan lindung lainnya, meliputi:
 - a. Cagar biosfer;
 - b. Ramsar;
 - c. Taman buru;
 - d. Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan
 - e. Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- 7. Kawasan Budidaya, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. Kawasan peruntukan perikanan;
 - f. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. Kawasan peruntukan industri;
 - h. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - i. Kawasan peruntukan permukiman;
 - j. Kawasan peruntukan lainnya.
- 8. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Gresik
 - a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik masuk dalam kawasan rawan bencana banjir dengan indeks resiko bencana banjir tinggi, sedang, dan rendah. Banjir di Kabupaten Gresik dapat diakibatkan oleh DAS Bengawan Solo, DAS Lamong, DAS Surabaya, banjir kota/genangan. DAS Bengawan Solo merupakan DAS terpanjang di Pulau Jawa yang bermuara di Kabupaten Gresik.

Dari sejarah kejadian dapat diamati kejadian banjir yang diakibatkan karena meluapnya aliran DAS Bengawan Solo dalam periode dua tahun terakhir 2016 – 2017 awal mencapai 6 kejadian banjir dengan cakupan 3 wilayah Kecamatan terdampak, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun dan Kecamatan Ujungpangkah

b. Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim

18 Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk dalam kawasan rawan bencana cuaca ekstrim. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Gresik dibagi menjadi 3, yakni Rendah, Sedang dan Tinggi. Sebaran kawasan rawan bencana cuaca ekstrim pada Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.5
Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrim		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	
7	Duduksampeyan	V	V	
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V		
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	V
12	Balongpanggang		V	V
13	Kedamean		V	V
14	Driyorejo		V	V
15	Menganti		V	V
16	Wringinanom		V	V
17	Tambak	V	V	V
18	Sangkapura	V	V	V

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 Kecamatan yang memiliki tingkat atau indeks resiko bencana cuaca ekstrim rendah, sedang dan tinggi sekaligus. 3 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Benjeng, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura. 5 Kecamatan dengan indeks resiko bencana cuaca ekstrim sedang hingga tinggi, 8 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang, dan 1 Kecamatan yang memiliki indeks resiko rendah.

Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana cuaca ekstrim rendah adalah Kecamatan Gresik.

c. Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

Kawasan bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Gresik juga memiliki 3 indeks resiko, yakni rendah, sedang dan tinggi. Sebaran kawasab rawan bencana epidemi dan wabah penyakit pada seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.6
Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng			V
2	Ujungpangkah			
3	Dukun		V	V
4	Sidayu			
5	Bungah		V	V
6	Manyar		V	V
7	Duduksampeyan			V
8	Kebomas	V	V	V
9	Gresik	V		
10	Cerme		V	V
11	Benjeng			V
12	Balongpanggang	V	V	V
13	Kedamean			V
14	Driyorejo			
15	Menganti			V
16	Wringinanom			
17	Tambak			V
18	Sangkapura			

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 2 Kecamatan dengan indeks resiko bencana rendah, sedang hingga tinggi. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Balongpanggang. 4 Kecamatan dengan indeks sedang hingga tinggi, yakni Kecamatan Dukun, Bungah, Manyar dan Cerme. 6 Kecamatan dengan indeks resiko

tinggi, yakni Kecamatan Panceng, Duduksampeyan, Benjeng, Kedamean, Menganti dan Tambak. 1 Kecamatan dengan indeks resiko rendah adalah Kecamatan Gresik. Serta 5 Kecamatan tidak berpotensi sebagai kawasan rawan bencana epidemi dan wabah penyakit adalah Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, Driyorejo, Wringinanom dan Sangkapura.

d. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Parameter tinggi gelombang dan arus gelombang pada jenis bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Gresik merupakan faktor utama yang menjadi penyebab bencana. Semua pesisir pantai kabupaten Gresik memiliki indeks resiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang, hingga tinggi. Pesisir pantai di Kabupaten Gresik memanjang melalui Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean. Berikut sebaran kawasan rawan bencana pada 9 Kecamatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 1.7
Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di
Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V		
2	Ujungpangkah	V	V	V
3	Sidayu		V	V
4	Bungah		V	V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas	V	V	
7	Gresik	V	V	
8	Tambak	V		
9	Sangkapura	V		

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam

kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

e. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Gresik adalah Kabupaten dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi. Hal ini disebabkan masuknya Kabupaten Gresik dalam radius patahan sesar di Wilayah Surabaya. Sama halnya dengan Bencana yang lain, indeks resiko bencana gempa bumi juga dibagi dalam 3 tingkatan, yakni rendah, sedang hingga tinggi. Berikut sebaran kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Gresik:

Tabel 1.8
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	
7	Duduksampeyan	V	V	
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V	V	
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	
12	Balongpanggang	V	V	
13	Kedamean	V	V	
14	Driyorejo	V	V	
15	Menganti	V	V	
16	Wringinanom	V	V	
17	Tambak		V	V
18	Sangkapura		V	V

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa

bumi. 2 Kecamatan di Pulau Bawaan, yakni Kecamatan Tambak dan Sangkapura adalah Kecamatan dengan tingkat resiko gempa bumi sedang hingga tinggi. Sedangkan untuk 16 Kecamatan lainnya yang berada di Pulau Jawa memiliki tingkat resiko gempa bumi rendah hingga sedang.

f. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Gresik menyebar pada beberapa kecamatan. Diantaranya sebagian wilayah di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Dukun, Bungah, Manyar, Kebomas, Cerme, Wringinanom. Sebaran kawasan rawan bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun			V
4	Bungah			V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas		V	
7	Cerme			V
8	Wringinanom		V	

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik terdapat 8 Kecamatan yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tanah longsor. Terdapat 3 Kecamatan dengan tingkat resiko rawan bencana tinggi adalah Kecamatan Dukun, Bungah dan Cerme, 1 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi adalah Kecamatan Manyar, 2 Kecamatan dengan indeks resiko sedang adalah Kecamatan Kebomas dan Wringinanom dan 2 Kecamatan lainnya dengan indeks resiko rendah hingga sedang adalah Kecamatan Panceng dan Ujungpangkah.

Berdasarkan pencatatan data bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, terdapat

8 (delapan) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kebakaran, Angin Kencang, Pohon Tumbang, OPS SAR, Kegagalan Teknologi, Kekeringan dan Tanah Longsor. Dalam rentang waktu tahun 2020 telah terjadi 222 kali bencana di Kabupaten Gresik.

Bencana Kebakaran mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik di tahun 2020, dengan persentase kejadian yaitu 78,3%, dan Banjir dengan 14,4%. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1.10
Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2020

No	Bulan	Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2020								
		Banjir	Kebakaran	Angin Kencang	Pohon Tumbang	OPS SAR	Kegagalan Teknologi	Kekeringan	Tanah Longsor	Jumlah
1	Januari	2	3	0	0	1	0	0	0	6
2	Februari	10	2	0	0	1	0	0	0	13
3	Maret	10	2	0	0	1	0	0	0	13
4	April	4	2	0	0	1	0	0	0	7
5	Mei	1	2	0	0	2	0	0	0	5
6	Juni	0	3	0	1	0	0	0	0	4
7	Juli	0	1	0	0	1	0	0	0	2
8	Agustus	0	49	0	0	0	0	0	0	49
9	September	0	56	0	0	1	0	0	0	57
10	Oktober	0	47	0	0	0	0	0	0	47
11	November	0	7	2	0	1	0	0	0	10
12	Desember	5	0	2	0	2	0	0	0	9
Jumlah Kejadian		32	174	4	1	11	0	0	0	222

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, 2020

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2020 sebanyak 1.292.394 jiwa yang terdiri dari 649.640 laki-laki dan 642.754 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebesar 1.031 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2020 sebesar 1:1 Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan
Jenis Kelamin Bulan Desember 2020

N O	KECAMATAN	JUMLAH DESA \ KELURAHAN	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	DUKUN	26	33.421	33.099	66.520
2	BALONGPANGGANG	25	28.711	28.917	57.628
3	PANCENG	14	26.092	26.116	52.208
4	BENJENG	23	33.217	32.917	66.134
5	DUDUKSAMPEYAN	23	25.124	25.205	50.329
6	WRINGINANOM	16	36.893	36.331	73.224
7	UJUNGPAKKAH	13	25.960	25.865	51.825
8	KEDAMEAN	15	32.300	31.696	63.996
9	SIDAYU	21	21.838	21.512	43.350
10	MANYAR	23	58.344	56.995	115.339
11	CERME	25	40.453	39.954	80.407
12	BUNGAH	22	34.307	33.767	68.074
13	MENGANTI	22	63.178	61.922	125.100
14	KEBOMAS	21	55.317	54.696	110.013
15	DRIYOREJO	16	51.903	50.989	102.892
16	GRESIK	21	40.417	40.964	81.381
17	SANGKAPURA	17	26.818	26.465	53.283
18	TAMBAK	13	15.347	15.344	30.691
JUMLAH		356	649.640	642.754	1.292.394

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2020

Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 sebanyak 397.567 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebanyak 389.072 . Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.12
Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Jumlah Kepala Keluarga Dan
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Bulan Desember 2020

NO	KECAMATAN	Desa/ Kel	JUMLAH KK	MEMILIKI KK	BELUM MEMIL IKI KK	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
						L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DUKUN	26	20.592	20.592	0	33.421	33.099	66.520
2	BALONGPANGGANG	25	18.677	18.677	0	28.711	28.917	57.628
3	PANCENG	14	15.880	15.880	0	26.092	26.116	52.208
4	BENJENG	23	20.838	20.838	0	33.217	32.917	66.134
5	DUDUKSAMPEYAN	23	15.192	15.192	0	25.124	25.205	50.329
6	WRINGINANOM	16	24.194	24.194	0	36.893	36.331	73.224
7	UJUNGPAKKAH	13	15.847	15.847	0	25.960	25.865	51.825
8	KEDAMEAN	15	20.579	20.579	0	32.300	31.696	63.996
9	SIDAYU	21	12.787	12.787	0	21.838	21.512	43.350
10	MANYAR	23	34.030	34.030	0	58.344	56.995	115.339
11	CERME	25	23.870	23.870	0	40.453	39.954	80.407
12	BUNGAH	22	20.371	20.371	0	34.307	33.767	68.074
13	MENGANTI	22	38.792	38.792	0	63.178	61.922	125.100
14	KEBOMAS	21	33.156	33.156	0	55.317	54.696	110.013
15	DRIYOREJO	16	32.205	32.205	0	51.903	50.989	102.892
16	GRESIK	21	25.463	25.463	0	40.417	40.964	81.381
17	SANGKAPURA	17	15.977	15.977	0	26.818	26.465	53.283
18	TAMBAK	13	9.117	9.117	0	15.347	15.344	30.691
JUMLAH		356	397.567	397.567	0	649.640	642.754	1.292.394

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2020

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2020, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 38.792 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 125.100 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.117 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 30.691 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 35–39 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,23% kemudian kelompok umur 40-44 tahun mencapai 8,13% dan selanjutnya kelompok umur 10-14 tahun mencapai 7,91%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 - 4 Th	41.643	38.590	80.233
2	5 - 9 Th	51.215	48.140	99.355
3	10 - 14 Th	52.898	49.391	102.289
4	15 - 19 Th	51.303	48.677	99.980
5	20 - 24 Th	50.244	48.446	98.690
6	25 - 29 Th	48.421	47.365	95.786
7	30 - 34 Th	44.848	44.128	88.976
8	35 - 39 Th	52.979	53.322	106.301
9	40 - 44 Th	52.497	52.535	105.032
10	45 - 49 Th	49.557	49.627	99.184
11	50 - 54 Th	43.147	43.862	87.009
12	55 - 59 Th	35.704	36.832	72.536
13	60 - 64 Th	29.315	30.585	59.900
14	65 - 69 Th	20.774	18.689	39.463
15	70 - 74 Th	11.053	12.877	23.930
16	75 Th	14.042	19.688	33.730
		649.640	642.754	1.292.394

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2020

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 mencapai -0,4% mengalami penurunan sebesar -1,8% dibandingkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 mencapai 1,4%. Jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 1.292.394 Jiwa menurun 5.790 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Kecamatan:

Tabel 1.14
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA\ KEL	2019	2020
1	DUKUN	26	67.127	66.520
2	BALONGPANGGANG	25	58.015	57.628
3	PANCENG	14	52.599	52.208
4	BENJENG	23	66.546	66.134
5	DUDUKSAMPEYAN	23	50.497	50.329
6	WRINGINANOM	16	73.297	73.224

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA\ KEL	2019	2020
7	UJUNGPANGKAH	13	51.890	51.825
8	KEDAMEAN	15	63.887	63.996
9	SIDAYU	21	43.533	43.350
10	MANYAR	23	114.893	115.339
11	CERME	25	80.032	80.407
12	BUNGAH	22	68.342	68.074
13	MENGANTI	22	124.468	125.100
14	KEBOMAS	21	109.392	110.013
15	DRIYOREJO	16	102.646	102.892
16	GRESIK	21	82.448	81.381
17	SANGKAPURA	17	56.053	53.283
18	TAMBAK	13	32.519	30.691
JUMLAH		356	1.298.184	1.292.394

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2020

1.3.4 Jumlah PNS

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Gresik berjumlah 7.240 ASN yang tersebar ke 48 OPD, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Narkotika Nasional. Struktur birokrasi pada ASN dibagi berdasarkan pangkat dan golongan. Pangkat dan Golongan ASN sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu mengabdikan, diklat jabatan yang pernah diikuti, kompetensi, pendidikan, serta prestasi.

ASN di Kabupaten Gresik menurut golongannya dibedakan menjadi 4 Golongan, yakni Golongan I, II, III dan IV. Golongan I merupakan level terendah dalam struktur birokrasi PNS, berasal dari lulusan SD sampai dengan SMP; Golongan II memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA hingga D3; Golongan III diperuntukkan bagi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3; dan yang terakhir atau yang paling tinggi adalah Golongan IV. Data sebaran Golongan ASN di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Golongan
Per 31 Desember 2020

No	Perangkat Daerah	Golongan (Orang)															
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	4	5	6	27	54	110	122	368	443	394	496	705	934	77	2	3.747
2	Dinas Kesehatan	1	2	2	16	7	215	139	147	111	101	256	39	28	4	1	1.069
3	Rsud Ibnu Sina		2	5	4	15	28	47	95	75	52	69	35	25	12	4	468
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang			6	7	8	5	28	44	8	20	14	6	2	1		149
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman					3	8	8	14	4	7	6	6	2			58
6	Dinas Sosial				1	2	2	2	1	1	1	7	4		1		22
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					1	1	2		2	2	7	3		1		19
8	Satuan Polisi Pamong Praja		1	1	2	6	41	45	23	1	4	8	1	1	1		135
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					1	1	1	2		2	6	10	1	1		25
10	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga					1	2	4	1	2		9	2	2			23
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			1		1	1	7	3	6	5	6	1	2			33
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika				1				3		5	9	3		1		22
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan		1	11		7	5	9	6	2	4	12	14	1	1		73
14	Dinas Lingkungan Hidup	1		10	2	9	6	10	6	2	7	9	5	1	1		69
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan				1		3	2	3	4	5	7	6	2			33
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						1	4	7	1	1	10	7	1	1		33
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						2	9	12	2	15	11	3		1		55
18	Dinas Perhubungan			1	2	1	7	17	8	2	8	3	3		1		53
19	Dinas Perikanan							5	1	2	10	15	4	2	1		40
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan						3	2	3	2	2	5	3	1	1		22
21	Dinas Pertanahan					1	1	5	3	1	2	6	2	1	1		23
22	Dinas Pertanian				3	5	2	11	15	2	16	24	20	8			106
23	Dinas Tenaga Kerja					1	1	1	4		4	10	8	1			30

No	Perangkat Daerah	Golongan (Orang)															
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jumlah
24	Sekretariat Daerah				1	1	7	30	45	13	19	19	12	8	2		157
25	Sekretariat DPRD				1	1	2	8	9		3	5	1	4	1		35
26	Inspektorat					1	1	3	9	1	5	6	8	4	1		39
27	Badan Kepegawaian Daerah					2	1	2	12	12	9	6	6	1	1		52
28	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			1	1	1	5	12	16	9	20	34	8		1		108
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan						1	4	16	4	5	11	2	1	1		45
30	Kecamatan Balongpanggang		1				6	2	5	4		8	2	1			29
31	Kecamatan Benjeng				2	2	5	6	2		3	4	1	1			26
32	Kecamatan Bungah						3	8	5	2		5	4	1			28
33	Kecamatan Cerme					1	3	3	1	4	1	6	3	1			23
34	Kecamatan Driyorejo					2	2	4	3	2	4	4		1			22
35	Kecamatan Duduk Sampeyan			1	1		1	1	8	3	1	3	3	1			23
36	Kecamatan Dukun					2	4	3	4		1	2	5				21
37	Kecamatan Gresik			1	2	1	5	9	5	3	15	39	6				86
38	Kecamatan Kebomas			1	1		3	5	3	1	10	17	5	1			47
39	Kecamatan Kedamean						2	3	1	1	3	4	1	1			16
40	Kecamatan Manyar						4	5	2	1	4	3	3				22
41	Kecamatan Menganti				1	2	5	2	1	2	1	6	1	2			23
42	Kecamatan Panceng					4	4	3	1		1	1	4	1			19
43	Kecamatan Sangkapura					1	2	6	1		1	4	2	2			19
44	Kecamatan Sidayu					1	2	4	7	1		2	3	2			22
45	Kecamatan Tambak				1		4	2	1		2	4	2	1			17
46	Kecamatan Ujung Pangkah					1	1	5	4		2	3	2	1			19
47	Kecamatan Wringinanom						1	7	2	1	2	3	1	2			19
48	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik						1	2	3	2	1	1	2	1			13
	Jumlah	6	12	47	77	146	520	619	935	739	780	120 5	977	105 3	114	7	7.237
49	Komisi Pemilihan Umum								1								1
50	Badan Narkotika Nasional					1		1									2
	Jumlah	6	12	47	77	147	520	620	936	739	780	120 5	977	105 3	114	7	7.240

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa struktur birokrasi di Kabupaten Gresik didominasi oleh ASN Golongan 3 dengan jumlah ASN sebanyak 3.660 ASN atau sebesar 50,05%. Golongan 3 ASN tersebut terbagi atas Golongan III a, III b, III c dan III d dengan rata rata 915 ASN di setiap golongan. Sedangkan untuk Golongan dengan ASN paling sedikit adalah Golongan I dengan jumlah ASN sebanyak 65 ASN atau sebesar 0,89%. Hal ini menunjukkan bahwa golongan ASN di Kabupaten Gresik rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi.

Tabel 1.16
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2020

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	DINAS PENDIDIKAN	1495	2252	3747
2	DINAS KESEHATAN	250	819	1069
3	RSUD IBNU SINA	181	287	468
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	110	39	149
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	29	29	58
6	DINAS SOSIAL	15	7	22
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	8	19
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	132	3	135
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	18	25
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	13	10	23
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	17	33
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11	11	22
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50	23	73
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56	13	69
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	18	15	33
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18	15	33
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35	20	55
18	DINAS PERHUBUNGAN	50	3	53
19	DINAS PERIKANAN	23	17	40
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7	15	22
21	DINAS PERTANAHAN	19	4	23
22	DINAS PERTANIAN	62	44	106
23	DINAS TENAGA KERJA	16	14	30
24	SEKRETARIAT DAERAH	85	72	157
25	SEKRETARIAT DPRD	26	9	35
26	INSPEKTORAT	21	18	39
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22	30	52
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	72	36	108
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,	24	21	45

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	20	9	29
31	KECAMATAN BENJENG	21	5	26
32	KECAMATAN BUNGAH	20	8	28
33	KECAMATAN CERME	18	5	23
34	KECAMATAN DRIYOREJO	19	3	22
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	19	4	23
36	KECAMATAN DUKUN	16	5	21
37	KECAMATAN GRESIK	40	46	86
38	KECAMATAN KEBOMAS	26	21	47
39	KECAMATAN KEDAMEAN	12	4	16
40	KECAMATAN MANYAR	18	4	22
41	KECAMATAN MENGANTI	18	5	23
42	KECAMATAN PANCENG	17	2	19
43	KECAMATAN SANGKAPURA	17	2	19
44	KECAMATAN SIDAYU	17	5	22
45	KECAMATAN TAMBAK	14	3	17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	15	4	19
47	KECAMATAN WRINGINANOM	14	5	19
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	5	13
	Jumlah	3223	4014	7237
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM		1	1
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2		2
	Jumlah	3225	4015	7240

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 202

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai ASN dengan jenis kelamin perempuan masih mendominasi dibandingkan laki-laki dengan rasio 1,24:1. Dari total keseluruhan 48 OPD, pegawai ASN dengan jenis kelamin laki-laki tercatat lebih banyak di 40 OPD sedangkan 8 OPD lainnya didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Rasio selisih terbesar terdapat di Dinas Pendidikan dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.495 orang dan perempuan sebanyak 2.252 orang atau terpaut 757 orang.

Pengembangan kepegawaian Aparatur Sipil Negara ditinjau dari tingkat pendidikan. Sebesar 80,89% ASN Kabupaten Gresik atau sejumlah 7.237 pegawai telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pegawai di lingkup Kabupaten Gresik cukup unggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terutama dalam pelayanan publik.

Tabel 1.17
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	D III/Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
1	DINAS PENDIDIKAN	6	181	31		2976	192		13	283	4	15	44	2	3747
2	DINAS KESEHATAN	103		503	15	218	15		2	125		71	17		1069
3	RSUD IBNU SINA	1		190	5	113	49		7	76		10	17		468
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1		3		67	16		3	33		20	6		149
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			10	1	24	9			13		1			58
6	DINAS SOSIAL					9	6			5			2		22
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			2		9	4			2		1	1		19
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1		1		30	6		1	60		35	1		135
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1		15	6			3					25
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					13	3			6		1			23
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1	1	15	2			14					33
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					15	6			1					22
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					24	16		11	14		3	5		73
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			2		20	9		1	22		4	11		69
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1		1	1	15	7			8					33
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1		19	6			6		1			33

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	D III/Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			2	1	30	8			12		2			55
18	DINAS PERHUBUNGAN		1		2	15	3		1	21		8	2		53
19	DINAS PERIKANAN					28	5			6		1			40
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			1	1	6	5	1		8					22
21	DINAS PERTANAHAN			1		8	5			8		1			23
22	DINAS PERTANIAN			1	1	64	17			16		3	4		106
23	DINAS TENAGA KERJA					18	9			2			1		30
24	SEKRETARIAT DAERAH			9	4	77	26			38		3			157
25	SEKRETARIAT DPRD			1	2	13	6			11		1	1		35
26	INSPEKTORAT			1	1	23	8			6					39
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			1	7	27	11			6					52
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			4		68	12		1	19		2	2		108
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			4	2	31	4			4					45
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG					14	4		1	10					29
31	KECAMATAN BENJENG			1		7	1			15			2		26
32	KECAMATAN BUNGAH					8	6			14					28
33	KECAMATAN CERME					8	4			11					23
34	KECAMATAN DRIYOREJO					10				11		1			22
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN					11	4		1	6		1			23
36	KECAMATAN DUKUN					8	4			8			1		21

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	D III/Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
37	KECAMATAN GRESIK			1	1	51	7		2	22		1	1		86
38	KECAMATAN KEBOMAS			2		21	7			14		2	1		47
39	KECAMATAN KEDAMEAN					7	2			7					16
40	KECAMATAN MANYAR					8	4			10					22
41	KECAMATAN MENGANTI					7	3			13					23
42	KECAMATAN PANCENG		1			4	3			10			1		19
43	KECAMATAN SANGKAPURA					8	2	1		8					19
44	KECAMATAN SIDAYU					9	2			11					22
45	KECAMATAN TAMBAK					8	2			6			1		17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH					10	2			6			1		19
47	KECAMATAN WRINGINANOM					7	2			10					19
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7	3			2		1			13
	Jumlah	113	183	775	45	4203	533	2	44	1022	4	189	122	2	7237
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM					1									1
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL									2					2
	Jumlah	113	183	775	45	4204	533	2	44	1024	4	189	122	2	7240

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tabel 1.18
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Per 31 Desember 2020

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
1	DINAS PENDIDIKAN	28	104	170	403	433	606	985	1018	3747
2	DINAS KESEHATAN	7	51	98	170	252	219	207	65	1069
3	RSUD IBNU SINA	5	13	29	105	103	89	86	38	468
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	4	15	12	16	32	25	33	12	149
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5	4	5	6	12	11	12	3	58
6	DINAS SOSIAL	0	0	1	2	3	3	9	4	22
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	1	1	3	4	6	4	19
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	8	70	24	20	10	3	135
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	1	2	0	4	3	9	6	25
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0	0	0	1	3	5	11	3	23
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	2	2	0	9	10	8	2	33
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	0	0	4	4	6	5	2	22
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	1	5	15	16	21	15	73
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	1	3	10	21	20	12	2	69
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0	1	1	2	6	8	10	5	33
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	1	3	5	12	8	4	33
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	2	10	9	15	8	7	4	55
18	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	3	4	12	14	14	6	53
19	DINAS PERIKANAN	0	0	2	4	4	7	15	8	40
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	1	2	1	3	5	4	6	22
21	DINAS PERTANAHAN	0	0	0	3	6	4	6	4	23
22	DINAS PERTANIAN	1	3	4	20	12	19	26	21	106
23	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	3	5	3	12	7	30
24	SEKRETARIAT DAERAH	3	5	13	25	34	40	34	3	157
25	SEKRETARIAT DPRD	1	0	2	7	7	4	11	3	35
26	INSPEKTORAT	2	5	2	6	5	5	11	3	39

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2	4	5	17	10	7	5	2	52
28	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	0	4	22	19	23	27	12	108
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2	8	3	8	5	11	6	2	45
30	KECAMATAN BALONGPANGGANG	0	0	0	1	7	6	11	4	29
31	KECAMATAN BENJENG	0	0	0	2	5	6	7	6	26
32	KECAMATAN BUNGAH	0	0	0	3	3	5	12	5	28
33	KECAMATAN CERME	0	0	0	2	3	8	6	4	23
34	KECAMATAN DRIYOREJO	0	0	0	2	1	2	12	5	22
35	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	0	0	1	1	5	6	6	4	23
36	KECAMATAN DUKUN	0	0	0	1	2	7	6	5	21
37	KECAMATAN GRESIK	0	1	0	4	9	12	36	24	86
38	KECAMATAN KEBOMAS	0	0	2	1	4	11	19	10	47
39	KECAMATAN KEDAMEAN	0	0	0	2	2	2	7	3	16
40	KECAMATAN MANYAR	0	0	0	1	5	5	8	3	22
41	KECAMATAN MENGANTI	0	0	1	0	3	4	9	6	23
42	KECAMATAN PANCENG	0	0	0	1	3	7	6	2	19
43	KECAMATAN SANGKAPURA	0	0	0	2	3	5	9	0	19
44	KECAMATAN SIDAYU	0	0	0	0	1	6	11	4	22
45	KECAMATAN TAMBAK	0	0	0	1	4	3	8	1	17
46	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	0	0	0	0	3	3	11	2	19
47	KECAMATAN WRINGINANOM	0	0	0	1	1	2	10	5	19
48	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	2	2	4	2	3	13
	Jumlah	62	221	388	954	1132	1311	1806	1363	7237
49	KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0	0	0	0	1	0	0	1
50	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Jumlah	62	221	388	954	1132	1314	1806	1363	7240

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, ASN Kabupaten Gresik terbanyak pada rentang usia 50-55 tahun dengan total jumlah 1.806 orang (terbanyak ada pada Dinas Pendidikan dengan jumlah 985 orang, Dinas Kesehatan 207 orang, dan RSUD Ibnu Sina sebanyak 86 orang). Rentang usia tersebut mencapai 25% dari total keseluruhan ASN sebanyak 7.237 pegawai. Urutan kedua terbanyak yaitu pada rentang usia 56-60 tahun dengan total jumlah 1.363 orang dengan persentasi 18% dari keseluruhan ASN, dan disusul dengan urutan ketiga terbanyak yaitu pada rentang usia 46-50 tahun dengan total jumlah 1.311 orang dengan persentasi 18% dari keseluruhan ASN.

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp2.854.576.383.457,35 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.939.472.116.094,07 atau mencapai 102,97%. Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 113,29%, capaian Dana Perimbangan mencapai 98,23% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 100,07%. Berikut Rincian Realisasi Jenis Pendapatan pada Tahun 2020:

Tabel 1.19
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Uraian	Target	Realisasi	Efektivitas	Selisih
Pendapatan Asli Daerah	816.210.832.745	924.652.463.463,07	113,29%	108.454.030.397,72
Dana perimbangan	1.355.693.530.362	1.331.644.546.291,00	98,23%	(24.048.984.071,00)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	682.672.020.350	683.175.106.340,00	100,07%	(503.085.990)
Pendapatan Daerah	2.854.576.383.457,35	2.939.472.116.094,07	102,97%	84.908.132.316,72

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

1.3.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp816.210.832.745,35 dapat direalisasikan sebesar Rp924.652.463.463,07 atau mencapai 113,29%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp 590.088.821.868,15 atau 108,56%.
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp 65.618.024.129,50 atau 105,11%.
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp 12.222.126.583,09 atau 100%.
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp 256.723.490.882,33 atau 129,68%.

Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Jenis Pendapatannya sebagaimana berikut:

a) Hasil Pajak Daerah

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2020 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp.543.600.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 590.088.821.868,15 atau mencapai 109%. Pajak Penerangan Jalan Mendominasi Pendapatan Asli Daerah, yakni sebesar Rp217.926.493.873,37 dengan capaian 105%. Adapun Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.20
Hasil Pajak Daerah Tahun 2020

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	1			HASIL PAJAK DAERAH	543.600.000.000,00	590.088.821.868,15	109%	46.488.821.868,15
4	1	1	0 1		PAJAK HOTEL	4.500.000.000,00	5.030.187.787,70	112%	530.187.787,70
4	1	1	01	00 3	HOTEL BINTANG EMPAT	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	1	01	00 4	HOTEL BINTANG TIGA	2.965.000.000,00	4.160.853.053,70	140%	1.195.853.053,70
4	1	1	01	00 5	HOTEL BINTANG DUA	690.000.000,00	215.315.433,00	31%	(474.684.567,00)
4	1	1	01	00 9	HOTEL MELATI SATU	690.000.000,00	595.594.301,00	86%	(94.405.699,00)
4	1	1	01	01 2	LOSMEN/RUMAH PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/HOTEL/RUMAH KOS	155.000.000,00	58.425.000,00	38%	(96.575.000,00)
4	1	1	0 2		PAJAK RESTORAN	21.260.000.000,00	17.999.276.639,43	85%	(3.260.723.360,57)
4	1	1	02	00 1	RESTORAN	12.688.000.000,00	9.638.908.419,10	76%	(3.049.091.580,90)
4	1	1	02	00 2	RUMAH MAKAN	5.534.000.000,00	4.109.049.411,86	74%	(1.424.950.588,14)
4	1	1	02	00 5	KATERING	3.032.000.000,00	4.249.053.808,47	140%	1.217.053.808,47
4	1	1	02	00 6	WARUNG	6.000.000,00	2.265.000,00	38%	(3.735.000,00)
4	1	1	0 3		PAJAK HIBURAN	2.360.000.000,00	1.039.985.654,00	44%	(1.320.014.346,00)
4	1	1	03	00 1	TONTONAN FILM/BIOSKOP/TV KABEL	1.428.000.000,00	531.433.317,00	37%	(896.566.683,00)
4	1	1	03	00 2	PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/BUSANA	12.000.000,00	14.100.000,00	118%	2.100.000,00
4	1	1	03	01 0	PERMAINAN BILIAR	38.000.000,00	4.656.000,00	12%	(33.344.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	1	03	01 5	PERMAINAN KETANGKASAN	638.000.000,00	327.442.897,00	51%	(310.557.103,00)
4	1	1	03	01 8	PUSAT KEBUGARAN	53.000.000,00	25.108.440,00	47%	(27.891.560,00)
4	1	1	03	01 9	PERTANDINGAN OLAHRAGA	42.000.000,00	125.880.000,00	300%	83.880.000,00
4	1	1	03	02 0	KOLAM RENANG	119.000.000,00	1.550.000,00	1%	(117.450.000,00)
4	1	1	03	02 1	HIBURAN DUNIA ANAK	30.000.000,00	9.815.000,00	33%	(20.185.000,00)
4	1	1	03	02 2	HIBURAN LAINNYA	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	1	0 4		PAJAK REKLAME	3.900.000.000,00	3.432.148.928,05	88%	(467.851.071,95)
4	1	1	04	00 1	REKLAME PAPAN/BILL BOARD/VIDEOTRON/MEGATRON	2.230.000.000,00	2.029.424.931,05	91%	(200.575.068,95)
4	1	1	04	00 2	REKLAME KAIN	1.670.000.000,00	1.402.723.997,00	84%	(267.276.003,00)
4	1	1	04	00 4	REKLAME SELEBARAN	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	1	0 5		PAJAK PENERANGAN JALAN	208.000.000.000,00	217.926.493.873,37	105%	9.926.493.873,37
4	1	1	05	00 1	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	194.000.000.000,00	202.127.638.688,00	104%	8.127.638.688,00
4	1	1	05	00 2	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	14.000.000.000,00	15.798.855.185,37	113%	1.798.855.185,37
4	1	1	0 7		PAJAK PARKIR	5.000.000.000,00	4.135.270.918,00	83%	(864.729.082,00)
4	1	1	07	00 1	PAJAK PARKIR.	5.000.000.000,00	4.135.270.918,00	83%	(864.729.082,00)
4	1	1	1 0		PAJAK AIR TANAH	1.080.000.000,00	1.116.974.183,60	103%	36.974.183,60
4	1	1	10	00 1	PAJAK AIR TANAH.	1.080.000.000,00	1.116.974.183,60	103%	36.974.183,60
4	1	1	1 1		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.500.000.000,00	2.509.957.600,00	100%	9.957.600,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	1	11	00 4	BATU KAPUR	2.500.000.000,00	2.509.957.600,00	100%	9.957.600,00
4	1	1	1 2		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN	105.000.000.000,00	122.890.321.646,00	117%	17.890.321.646,00
4	1	1	12	00 1	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN	105.000.000.000,00	122.890.321.646,00	117%	17.890.321.646,00
4	1	1	1 3		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	190.000.000.000,00	214.008.204.638,00	113%	24.008.204.638,00
4	1	1	13	00 1	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	190.000.000.000,00	214.008.204.638,00	113%	24.008.204.638,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

b) Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 62.429.175.437,00 terealisasi sebesar Rp65.618.024.129,50 atau 105,11%. Terdapat 3 komponen pembentuk retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan, Retribusi Penhujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp14.883.914.668,00 atau mencapai 108,47%;
- b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempak Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penyebrangan di air. Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2020 sebesar Rp6.440.691.717,50 atau mencapai 107,68%;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp44.293.417.744,00 atau mencapai 103,67%.

Dari ketiga komponen diatas, Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kontribusi paling besar dalam komponen Retribusi Daerah. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Retribusi Daerah Tahun 2020

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	2			RETRIBUSI DAERAH	62.429.175.437,00	65.618.024.129,50	105,11%	3.188.848.692,50
4	1	2	0 1		RETRIBUSI JASA UMUM	13.721.794.000,00	14.883.914.668,00	108,47%	1.162.120.668,00
4	1	2	01	00 1	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	5.500.000.000,00	7.476.832.589,00	135,94%	1.976.832.589,00
4	1	2	01	00 2	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	802.673.000,00	730.313.500,00	90,99%	(72.359.500,00)
4	1	2	01	00 5	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	1.200.000.000,00	1.233.925.000,00	102,83%	33.925.000,00
4	1	2	01	00 6	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	2.519.121.000,00	1.890.556.079,00	75,05%	(628.564.921,00)
4	1	2	01	00 6	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	0,00	26.830.000,00	0,00%	26.830.000,00
4	1	2	01	00 7	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.100.000.000,00	2.135.475.000,00	101,69%	35.475.000,00
4	1	2	01	01 1	RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	100.000.000,00	115.460.000,00	115,46%	15.460.000,00
4	1	2	01	01 4	RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	1.500.000.000,00	1.274.522.500,00	84,97%	(225.477.500,00)
4	1	2	0 2		RETRIBUSI JASA USAHA	5.981.406.437,00	6.440.691.717,50	107,68%	459.285.280,50
4	1	2	02	00 1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	300.000.000,00	83.480.000,00	27,83%	(216.520.000,00)
4	1	2	02	00 1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	640.387.437,00	712.045.000,00	111,19%	71.657.563,00
4	1	2	02	00 1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	200.000.000,00	200.408.000,00	100,20%	408.000,00
4	1	2	02	00 1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	1	2	02	00 1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	225.000.000,00	251.340.500,00	111,71%	26.340.500,00
4	1	2	02	00	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	130.000.000,00	207.000.000,00	159,23%	77.000.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
				1					
4	1	2	02	00 1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.276.573.617,50	109,22%	276.573.617,50
4	1	2	02	00 3	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN	17.133.000,00	0,00	0,00%	(17.133.000,00)
4	1	2	02	00 4	RETRIBUSI TERMINAL	95.168.000,00	60.438.600,00	63,51%	(34.729.400,00)
4	1	2	02	00 5	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	560.000.000,00	568.041.000,00	101,44%	8.041.000,00
4	1	2	02	00 5	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	1	2	02	00 8	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	123.718.000,00	112.643.000,00	91,05%	(11.075.000,00)
4	1	2	02	01 0	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	230.000.000,00	273.335.000,00	118,84%	43.335.000,00
4	1	2	02	01 0	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	320.000.000,00	525.180.000,00	164,12%	205.180.000,00
4	1	2	02	01 1	RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR	140.000.000,00	170.207.000,00	121,58%	30.207.000,00
4	1	2	03	00 3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	42.725.975.000,00	44.293.417.744,00	103,67%	1.567.442.744,00
4	1	2	03	00 1	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	40.224.625.000,00	40.172.574.919,00	99,87%	(52.050.081,00)
4	1	2	03	00 4	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	1	2	03	00 4	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	1.350.000,00	2.610.000,00	193,33%	1.260.000,00
4	1	2	03	00 6	RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	2.500.000.000,00	4.118.232.825,00	164,73%	1.618.232.825,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2020 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp.12.222.126.583,09 atau 100,01%. Perusahaan Milik Daerah yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, PT Gresik Migas, PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.221.274.794,00	12.222.126.583,09	100,01%	851.789,09
4	1	3	0	1	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	12.221.274.794,00	12.222.126.583,09	100,01%	851.789,09
4	1	3	01	00 2	PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK	600.000.000,00	603.307.789,09	100,55%	3.307.789,09
4	1	3	01	00 3	PT GRESIK MIGAS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	0,00
4	1	3	01	00 4	PT BANK JATIM	10.614.274.794,00	10.614.274.794,00	100,00%	0,00
4	1	3	01	00 5	PT BPR JATIM	7.000.000,00	4.544.000,00	64,91%	(2.456.000,00)

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp256.723.490.882,33 atau mencapai 129,68% dengan 12 komponen pembentuk, yaitu:

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang terdiri dari Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan;
- b. Penerimaan Jasa Giro yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas;
- c. Pendapatan Bunga Deposito yang terdiri dari Rekening Deposito pada Bank Jatim, Bank BTN dan Bank BRI;
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sekretariat;
- e. Pendapatan Denda Pajak yang terdiri dari Pendapatan Denda Hotel, Pajak Air Bawah Tanah dan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
- f. Pendapatan Denda Retribusi yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu;
- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang berasal dari pembongkaran reklame;
- h. Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan lain-lain;
- i. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan 17 Puskesmas;
- j. Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 15 Puskesmas;
- k. Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan
- l. Pendapatan Tas Pelanggaran Perda/Perbup.

Tabel 1.23
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	197.960.382.514,35	256.723.490.882,33	129,68%	58.775.508.047,98
4	1	4	01		HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN	67.494.000,00	71.615.000,00	106,11%	4.121.000,00
4	1	4	01	001	PELEPASAN HAK ATAS TANAH	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	4	01	010	PENJUALAN BAHAN-BAHAN BEKAS BANGUNAN	67.494.000,00	71.615.000,00	106,11%	4.121.000,00
4	1	4	02		PENERIMAAN JASA GIRO	4.700.000.000,00	5.417.077.195,92	115,26%	717.077.195,92
4	1	4	02	001	JASA GIRO KAS DAERAH	4.700.000.000,00	4.598.197.296,86	97,83%	(101.802.703,14)
4	1	4	02	002	JASA GIRO PEMEGANG KAS	0,00	818.879.899,06	0%	818.879.899,06
4	1	4	03		PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	10.000.000.000,00	10.821.859.724,40	108,22%	821.859.724,40
4	1	4	03	001	REKENING DEPOSITO PADA BANK JATIM	10.000.000.000,00	4.817.465.753,00	48,17%	(5.182.534.247,00)
4	1	4	03	002	REKENING DEPOSITO PADA BANK BTN	0,00	4.141.095.890,40	0%	4.141.095.890,40
4	1	4	03	005	REKENING DEPOSITO PADA BANK BRI	0,00	1.863.298.081,00	0%	1.863.298.081,00
4	1	4	06		PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	0,00	199.942.795,77	0%	192.342.475,77
4	1	4	06	001	BIDANG PENDIDIKAN	0,00	8.100.000,00	0%	8.100.000,00
4	1	4	06	002	BIDANG KESEHATAN	0,00	21.941.960,00	0%	21.941.960,00
4	1	4	06	003	BIDANG PEKERJAAN UMUM	0,00	154.096.670,77	0%	154.096.670,77

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	4	06	00 4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	7.998.800,00	0%	7.998.800,00
4	1	4	06	00 6	BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	#0%	0,00
4	1	4	06	01 0	BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	4	06	02 5	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	4	06	02 7	BIDANG PERTANIAN	0,00	7.600.320,00	0%	0,00
4	1	4	06	03 8	BIDANG SEKRETARIAT	0,00	205.045,00	0%	205.045,00
4	1	4	0 7		PENDAPATAN DENDA PAJAK	0,00	430.529.323,80	0%	430.529.323,80
4	1	4	07	00 1	PENDAPATAN DENDA HOTEL	0,00	80.230,00	0%	80.230,00
4	1	4	07	00 4	PENDAPATAN DENDA REKLAME	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	4	07	00 5	PENDAPATAN DENDA PAJAK PENERANGAN JALAN	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	4	07	00 8	PENDAPATAN DENDA PAJAK AIR BAWAH TANAH	0,00	1.520.938,80	0%	1.520.938,80
4	1	4	07	01 1	PENDAPATAN DENDA PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN	0,00	428.928.155,00	0%	428.928.155,00
4	1	4	0 8		PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	0,00	187.342.479,00	0%	187.342.479,00
4	1	4	08	00 1	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA UMUM	0,00	1.330.036,00	0%	1.330.036,00
4	1	4	08	00 2	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA USAHA	0,00	2.608.756,00	0%	2.608.756,00
4	1	4	08	00 2	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA USAHA	0,00	7.471.515,00	0%	7.471.515,00
4	1	4	08	00 3	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	0,00	175.932.172,00	0%	175.932.172,00
4	1	4	0 9		PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN	0,00	3.430.000,00	0%	3.430.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	4	09	00 1	HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	0,00	0,00	0%	0,00
4	1	4	07	00 2	HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME	0,00	3.430.000,00	0%	3.430.000,00
4	1	4	1 0		PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	0,00	1.919.354.440,83	0%	1.939.354.440,83
4	1	4	10	00 3	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	0,00	408.619.939,00	0%	408.619.939,00
4	1	4	10	00 4	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS	0,00	7.019.800,00	0%	7.019.800,00
4	1	4	10	00 6	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN LAIN-LAIN	0,00	1.503.714.701,83	0%	1.523.714.701,83
4	1	4	1 5		PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	166.894.951.814,35	221.895.112.872,61	132,95%	55.000.161.058,26
4	1	4	15	00 1	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU	135.590.000.000,00	191.235.063.234,57	141,04%	55.645.063.234,57
4	1	4	15	00 2	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS ALON - ALON	1.823.538.616,90	1.708.748.135,23	93,71%	(114.790.481,67)
4	1	4	15	00 5	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KEBOMAS	1.517.240.105,81	1.512.251.267,81	99,67%	(4.988.838,00)
4	1	4	15	00 7	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS MANYAR	1.202.899.494,00	1.193.875.383,61	99,25%	(9.024.110,39)
4	1	4	15	00 9	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SUKOMULYO	1.143.710.962,00	1.111.618.373,86	97,19%	(32.092.588,14)
4	1	4	15	01 0	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN	2.170.900.314,29	2.130.281.083,44	98,13%	(40.619.230,85)
4	1	4	15	01 1	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS CERME	2.648.719.868,00	2.613.178.325,95	98,66%	(35.541.542,05)
4	1	4	15	01 3	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS BALONGPANGGANG	1.571.910.136,33	1.567.942.305,02	99,75%	(3.967.831,31)
4	1	4	15	01 5	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS BENJENG	2.098.426.289,61	2.067.832.176,81	98,54%	(30.594.112,80)
4	1	4	15	01 6	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS METATU	1.312.038.686,43	1.261.751.398,24	96,17%	(50.287.288,19)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	4	15	02 1	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DRIYOREJO	2.259.140.456,08	2.250.335.249,48	99,61%	(8.805.206,60)
4	1	4	15	02 3	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS WRINGINANOM	1.506.918.103,00	1.473.560.979,32	97,79%	(33.357.123,68)
4	1	4	15	02 4	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KESAMBEN KULON	1.436.271.523,34	1.333.865.378,23	92,87%	(102.406.145,11)
4	1	4	15	02 5	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS BUNGAH	2.790.036.891,99	2.793.584.488,22	100,13%	3.547.596,23
4	1	4	15	02 7	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS MENTARAS	1.194.423.606,39	1.233.719.487,38	103,29%	39.295.880,99
4	1	4	15	02 8	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SIDAYU	2.283.792.318,24	2.162.290.059,96	94,68%	(121.502.258,28)
4	1	4	15	02 9	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS UJUNGPAKANGKAH	1.891.214.927,35	1.860.110.267,05	98,36%	(31.104.660,30)
4	1	4	15	03 1	PENDAPATAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PANCENG	2.453.769.514,59	2.385.105.278,43	97,20%	(68.664.236,16)
4	1	4	17	00 2	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)	16.297.936.700,00	15.611.891.275,00	95,79%	(686.045.425,00)
4	1	4	17	00 2	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS NELAYAN	691.914.000,00	544.013.400,00	78,62%	(147.900.600,00)
4	1	4	17	00 3	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS INDUSTRI	687.650.100,00	671.971.800,00	97,72%	(15.678.300,00)
4	1	4	17	00 5	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS GENDING	723.482.700,00	710.684.400,00	98,23%	(12.798.300,00)
4	1	4	17	00 7	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS SEMBAYAT	1.087.268.900,00	1.072.624.800,00	98,65%	(14.644.100,00)
4	1	4	17	01 1	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS DADAP KUNING	950.131.850,00	718.672.350,00	75,64%	(231.459.500,00)
4	1	4	17	01 3	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS	680.699.800,00	684.823.800,00	100,61%	4.124.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
					DAPET				
4	1	4	17	01 6	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS MENGANTI	2.604.504.420,00	2.319.965.400,00	89,08%	(284.539.020,00)
4	1	4	17	01 7	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS KEPATIHAN	909.526.030,00	924.821.225,00	101,68%	15.295.195,00
4	1	4	17	01 8	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS KEDAMEAN	1.333.682.400,00	1.333.444.800,00	99,98%	(237.600,00)
4	1	4	17	01 9	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS SLEMPIT	862.690.900,00	854.649.900,00	99,07%	(8.041.000,00)
4	1	4	17	02 1	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS KARANGDONG	1.104.038.200,00	1.100.739.900,00	99,70%	(3.298.300,00)
4	1	4	17	02 5	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS DUKUN	1.417.915.900,00	1.403.904.000,00	99,01%	(14.011.900,00)
4	1	4	17	02 9	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS SEKAPUK	492.387.775,00	471.285.750,00	95,71%	(21.102.025,00)
4	1	4	17	03 1	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS SANGKAPURA	1.794.691.950,00	1.803.313.050,00	100,48%	8.621.100,00
4	1	4	17	03 2	PENDAPATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS TAMBAK	957.351.775,00	996.976.700,00	104,14%	39.624.925,00
4	1	4	18	00 1	TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN ASET	0,00	118.685.775,00	0%	118.685.775,00
4	1	4	20		PENDAPATAN TAS PELANGGARAN PERDA/PERBUP	0,00	46.650.000,00	0%	46.650.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	1	4	20	00 1	PENDAPATAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN BUPATI	0,00	46.650.000,00	0%	46.650.000,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

1.3.5.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: (2) Dana Alokasi Umum: dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2020 direncanakan sebesar sebesar Rp1.355.693.530.362,00 terealisasi sebesar Rp1.331.644.546.291,00 atau 98,23%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.24
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2				DANA PERIMBANGAN	1.355.693.530.362,00	1.331.644.546.291,00	98,23%	(24.048.984.071,00)
4	2	1			DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	181.573.308.362,00	184.917.706.092,00	101,84%	3.344.397.730,00
4	2	2			DANA ALOKASI UMUM	890.343.102.000,00	871.987.860.000,00	97,94%	(18.355.242.000,00)
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS	283.777.120.000,00	274.738.980.199,00	96,82%	(9.038.139.801,00)

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Komponen penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

- 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang; dan
- 3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas:

- 1) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
- 2) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;

- 3) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
- 4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
- 5) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan;
- 6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; dan
- 7) Bagi Hasil Mineral dan Batubara.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp181.573.308.362,00 terealisasi sebesar Rp184.917.706.092,00 atau 101,84%. Perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.25
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2	1			DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	181.573.308.362,00	184.917.706.092,00	101,84%	3.344.397.730,00
4	2	1	0	1	BAGI HASIL PAJAK	146.267.097.663,00	144.337.948.806,00	98,68%	(1.929.148.857,00)
4	2	1	01	00 1	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	31.697.906.662,00	36.037.542.755,00	113,69%	4.339.636.093,00
4	2	1	01	00 3	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21	97.641.093.001,00	92.304.408.516,00	94,53%	(5.336.684.485,00)
4	2	1	01	00 4	BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU	16.928.098.000,00	15.995.997.535,00	94,49%	(932.100.465,00)
4	2	1	0	2	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	35.306.210.699,00	40.579.757.286,00	114,94%	5.273.546.587,00
4	2	1	02	00 6	BAGI HASIL DARI PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN	1.588.988.903,00	788.276.289,00	49,61%	(800.712.614,00)
4	2	1	02	00 8	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	28.415.532.691,00	30.792.707.590,00	108,37%	2.377.174.899,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2	1	02	00 9	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN GAS BUMI	4.167.593.898,00	7.260.190.122,00	174,21%	3.092.596.224,00
4	2	1	02	01 0	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN PANAS BUMI	44.233.524,00	31.628.750,00	71,50%	(12.604.774,00)
4	2	1	02	01 1	BAGI HASIL DARI SUMBER DAYA KEHUTANAN	365.676.638,00	214.426.745,00	58,64%	(151.249.893,00)
4	2	1	02	01 3	BAGI HASIL MINERAL DAN BATUBARA	724.185.045,00	1.492.527.790,00	206,10%	768.342.745,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp890.343.102.000,00 terealisasi sebesar Rp871.987.860.000,00 atau 97,94%.

Tabel 1.26
Dana Alokasi Umum

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2	2			DANA ALOKASI UMUM	890.343.102.000,00	871.987.860.000,00	97,94%	(18.355.242.000,00)
4	2	2	0 1		DANA ALOKASI UMUM	890.343.102.000,00	871.987.860.000,00	97,94%	(18.355.242.000,00)
4	2	2	01	00 1	DANA ALOKASI UMUM	890.343.102.000,00	871.987.860.000,00	97,94%	(18.355.242.000,00)

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan Rp283.777.120.000,00 terealisasi sebesar Rp274.738.980.199,00 atau 96,82%. Perincian DAK pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.27
Dana Alokasi Khusus

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS	283.777.120.000,00	274.738.980.199,00	96,82%	(9.038.139.801,00)
4	2	3	0		DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	73.352.157.000,00	66.191.568.981,00	90,24%	(7.160.588.019,00)
4	2	3	01	00 1	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SD	9.970.645.000,00	9.529.871.500,00	95,58%	(440.773.500,00)
4	2	3	01	00 2	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SMP	6.723.054.000,00	6.486.273.000,00	96,48%	(236.781.000,00)
4	2	3	01	00 4	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR	7.518.299.000,00	5.169.231.020,00	68,76%	(2.349.067.980,00)
4	2	3	01	00 5	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	22.993.600.000,00	21.574.297.799,00	93,83%	(1.419.302.201,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2	3	01	00 6	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	4.559.658.000,00	4.559.641.783,00	100,00%	(16.217,00)
4	2	3	01	00 7	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA	1.438.405.000,00	1.279.606.910,00	88,96%	(158.798.090,00)
4	2	3	01	00 8	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3.466.462.000,00	2.228.060.100,00	64,27%	(1.238.401.900,00)
4	2	3	01	01 4	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG AIR MINUM	2.118.226.000,00	2.118.225.907,00	100,00%	(93,00)
4	2	3	01	01 5	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG SANITASI	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	01	01 6	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG JALAN	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	01	03 4	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	01	03 7	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG SANITASI	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	01	03 9	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG JALAN	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	01	04 0	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG PENURUNAN STUNTING	1.133.563.000,00	1.133.526.400,00	100,00%	(36.600,00)
4	2	3	01	04 3	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG IRIGASI	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	01	04 4	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	01	04 5	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PAUD	349.657.000,00	275.789.850,00	78,87%	(73.867.150,00)
4	2	3	01	04 6	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG PENURUNAN AKI-AKB	620.280.000,00	492.166.312,00	79,35%	(128.113.688,00)
4	2	3	01	04 7	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN	10.737.749.000,00	9.765.125.700,00	90,94%	(972.623.300,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
					PENGENDALIAN PENYAKIT				
4	2	3	01	04 8	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG PERTANIAN	1.221.318.000,00	1.160.000.000,00	94,98%	(61.318.000,00)
4	2	3	01	04 9	DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	501.241.000,00	419.752.700,00	83,74%	(81.488.300,00)
4	2	3	0 2		DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	210.424.963.000,00	208.547.411.218,00	99,11%	(1.877.551.782,00)
4	2	3	02	00 2	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	30.294.600.000,00	27.211.500.000,00	89,82%	(3.083.100.000,00)
4	2	3	02	00 3	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK TUNJANGAN PROFESI GURU.	139.518.371.000,00	139.518.371.000,00	100,00%	0,00
4	2	3	02	00 6	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	25.637.564.000,00	32.648.198.896,00	127,35%	7.010.634.896,00
4	2	3	02	00 8	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG AKREDITASI PUSKESMAS	1.230.880.000,00	0,00	0,00%	(1.230.880.000,00)
4	2	3	02	00 9	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG JAMINAN PERSALINAN	1.506.288.000,00	0,00	0,00%	(1.506.288.000,00)
4	2	3	02	01 0	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB SUB BIDANG BANTUAN OPERASIONAL KB	5.798.228.000,00	4.451.444.289,00	76,77%	(1.346.783.711,00)
4	2	3	02	01 3	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.542.689.000,00	1.927.904.383,00	75,82%	(614.784.617,00)
4	2	3	02	01 4	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	2.039.500.000,00	1.714.100.000,00	84,05%	(325.400.000,00)
4	2	3	02	01 5	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK PENYELENGGARAAN MUSEUM	600.000.000,00	373.836.000,00	62,31%	(226.164.000,00)
4	2	3	02	01 7	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	417.358.000,00	387.054.650,00	92,74%	(30.303.350,00)
4	2	3	02	01 8	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK PELAYANAN KEPARIWISATAAN	575.870.000,00	315.002.000,00	54,70%	(260.868.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	2	3	02	01 9	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	02	02 0	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	2	3	02	02 3	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KKB SUB BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	263.615.000,00	0,00	0,00%	(263.615.000,00)

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

1.3.5.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp682.672.020.350,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp683.175.106.340,00 atau mencapai 100,07%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.28
Pendapatan Hibah

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	682.672.020.350,00	683.175.106.340,00	100,07%	503.085.990,00
4	3	1			PENDAPATAN HIBAH	94.925.700.000,00	99.485.295.505,00	104,80%	4.559.595.505,00
4	3	1	0 1		PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	0,00	4.506.202.781,00	0,00%	4.506.202.781,00
4	3	1	01	00	PEMERINTAH	0,00	4.506.202.781,00	0,00%	4.506.202.781,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
				1					
4	3	1	06		PENDAPATAN HIBAH DANA BOS	94.925.700.000,00	94.979.092.724,00	100,06%	53.392.724,00
4	3	1	06	001	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Balongpanggang (UPT SD Negeri 119 Gresik)	203.400.000,00	284.760.000,00	140,00%	81.360.000,00
4	3	1	06	002	Pendapatan BOS SD Negeri Kedungsumber (UPT SD Negeri 129 Gresik)	152.100.000,00	153.450.000,00	100,89%	1.350.000,00
4	3	1	06	003	Pendapatan BOS SD Negeri Kedungpring (UPT SD Negeri 128 Gresik)	120.600.000,00	169.002.000,00	140,13%	48.402.000,00
4	3	1	06	004	Pendapatan BOS SD Negeri Banjaragung (UPT SD Negeri 122 Gresik)	182.400.000,00	183.750.000,00	100,74%	1.350.000,00
4	3	1	06	005	Pendapatan BOS SD Negeri Dapet (UPT SD Negeri 124 Gresik)	172.500.000,00	175.470.000,00	101,72%	2.970.000,00
4	3	1	06	006	Pendapatan BOS SD Negeri Babatan (UPT SD Negeri 118 Gresik)	179.700.000,00	180.780.000,00	100,60%	1.080.000,00
4	3	1	06	007	Pendapatan BOS SD Negeri Wahas (UPT SD Negeri 141 Gresik)	161.700.000,00	161.430.000,00	99,83%	(270.000,00)
4	3	1	06	008	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Balongpanggang (UPT SD Negeri 120 Gresik)	115.200.000,00	114.120.000,00	99,06%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	009	Pendapatan BOS SD Negeri Sekarputih (UPT SD Negeri 137 Gresik)	156.300.000,00	157.920.000,00	101,04%	1.620.000,00
4	3	1	06	010	Pendapatan BOS SD Negeri Mojogede (UPT SD Negeri 132 Gresik)	151.800.000,00	154.770.000,00	101,96%	2.970.000,00
4	3	1	06	011	Pendapatan BOS SD Negeri Brangkal (UPT SD Negeri 123 Gresik)	155.400.000,00	156.210.000,00	100,52%	810.000,00
4	3	1	06	012	Pendapatan BOS SD Negeri Dohoagung (UPT SD Negeri 125 Gresik)	161.700.000,00	162.780.000,00	100,67%	1.080.000,00
4	3	1	06	013	Pendapatan BOS SD Negeri Tanahlandean (UPT SD Negeri 138 Gresik)	169.800.000,00	171.420.000,00	100,95%	1.620.000,00
4	3	1	06	014	Pendapatan BOS SD Negeri Bandungsekar (UPT SD Negeri 121 Gresik)	148.200.000,00	151.440.000,00	102,19%	3.240.000,00
4	3	1	06	015	Pendapatan BOS SD Negeri Wotansari (UPT SD Negeri 143 Gresik)	152.700.000,00	153.780.000,00	100,71%	1.080.000,00
4	3	1	06	016	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Tenggor (UPT SD Negeri 139 Gresik)	124.800.000,00	122.100.000,00	97,84%	(2.700.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	01 7	Pendapatan BOS SD Negeri Pucung (UPT SD Negeri 136 Gresik)	121.200.000,00	122.010.000,00	100,67%	810.000,00
4	3	1	06	01 8	Pendapatan BOS SD Negeri Jombangdelik (UPT SD Negeri 126 Gresik)	114.000.000,00	116.970.000,00	102,61%	2.970.000,00
4	3	1	06	01 9	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Tenggor (UPT SD Negeri 140 Gresik)	110.400.000,00	110.130.000,00	99,76%	(270.000,00)
4	3	1	06	02 0	Pendapatan BOS SD Negeri Pinggir (UPT SD Negeri 135 Gresik)	123.000.000,00	133.740.000,00	108,73%	10.740.000,00
4	3	1	06	02 1	Pendapatan BOS Sdn Wonorejo (UPT SD Negeri 142 Gresik)	116.700.000,00	118.590.000,00	101,62%	1.890.000,00
4	3	1	06	02 2	Pendapatan BOS SD Negeri Ngampel (UPT SD Negeri 133 Gresik)	54.900.000,00	53.820.000,00	98,03%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	02 3	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Klotok (UPT SD Negeri 131 Gresik)	114.000.000,00	113.190.000,00	99,29%	(810.000,00)
4	3	1	06	02 4	Pendapatan BOS SD Negeri Karangsemanding (UPT SD Negeri 127 Gresik)	107.700.000,00	107.430.000,00	99,75%	(270.000,00)
4	3	1	06	02 5	Pendapatan BOS SD Negeri Ngasin (UPT SD Negeri 134 Gresik)	105.900.000,00	106.440.000,00	100,51%	540.000,00
4	3	1	06	02 6	Pendapatan BOS SD Negeri Klotok I (UPT SD Negeri 130 Gresik)	106.800.000,00	109.230.000,00	102,28%	2.430.000,00
4	3	1	06	02 7	Pendapatan BOS SD Negeri Sirnobojo (UPT SD Negeri 117 Gresik)	258.300.000,00	255.330.000,00	98,85%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	02 8	Pendapatan BOS SD Negeri Deliksumber (UPT SD Negeri 99 Gresik)	175.500.000,00	177.120.000,00	100,92%	1.620.000,00
4	3	1	06	02 9	Pendapatan BOS SD Negeri Munggugianti (UPT SD Negeri 114 Gresik)	168.300.000,00	167.220.000,00	99,36%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	03 0	Pendapatan BOS SD Negeri Lundo (UPT SD Negeri 111 Gresik)	226.500.000,00	224.070.000,00	98,93%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	03 1	Pendapatan BOS SD Negeri Gluranpelo (UPT SD Negeri 101 Gresik)	157.500.000,00	156.960.000,00	99,66%	(540.000,00)
4	3	1	06	03 2	Pendapatan BOS SD Negeri Bulurejo (UPT SD Negeri 98 Gresik)	131.400.000,00	131.670.000,00	100,21%	270.000,00
4	3	1	06	03 3	Pendapatan BOS SD Negeri Jatirembe (UPT SD Negeri 102 Gresik)	193.200.000,00	196.440.000,00	101,68%	3.240.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	03 4	Pendapatan BOS SD Negeri Munggugebang (UPT SD Negeri 113 Gresik)	163.500.000,00	163.230.000,00	99,83%	(270.000,00)
4	3	1	06	03 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Karang Kidul (UPT SD Negeri 106 Gresik)	165.300.000,00	165.570.000,00	100,16%	270.000,00
4	3	1	06	03 6	Pendapatan BOS SD Negeri Kalipadang (UPT SD Negeri 104 Gresik)	170.700.000,00	171.510.000,00	100,47%	810.000,00
4	3	1	06	03 7	Pendapatan BOS SD Negeri Bulangkulon (UPT SD Negeri 97 Gresik)	170.700.000,00	168.540.000,00	98,73%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	03 8	Pendapatan BOS SD Negeri Kedungsekar (UPT SD Negeri 108 Gresik)	141.900.000,00	137.310.000,00	96,77%	(4.590.000,00)
4	3	1	06	03 9	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Klampok (UPT SD Negeri 109 Gresik)	131.100.000,00	129.210.000,00	98,56%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	04 0	Pendapatan BOS SD Negeri Balongmojo (UPT SD Negeri 93 Gresik)	165.300.000,00	163.410.000,00	98,86%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	04 1	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Karang Kidul (UPT SD Negeri 105 Gresik)	152.700.000,00	151.890.000,00	99,47%	(810.000,00)
4	3	1	06	04 2	Pendapatan BOS SD Negeri Balongtunjung (UPT SD Negeri 94 Gresik)	158.100.000,00	156.210.000,00	98,80%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	04 3	Pendapatan BOS Sdn Sedapurklagen (UPT SD Negeri 116 Gresik)	161.700.000,00	159.810.000,00	98,83%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	04 4	Pendapatan BOS SD Negeri Kedungrukem (UPT SD Negeri 107 Gresik)	146.400.000,00	145.860.000,00	99,63%	(540.000,00)
4	3	1	06	04 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Klampok (UPT SD Negeri 110 Gresik)	162.600.000,00	162.600.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	04 6	Pendapatan BOS SD Negeri Punduttrate (UPT SD Negeri 115 Gresik)	143.700.000,00	143.430.000,00	99,81%	(270.000,00)
4	3	1	06	04 7	Pendapatan BOS SD Negeri Bengkelolor (UPT SD Negeri 96 Gresik)	132.900.000,00	135.870.000,00	102,23%	2.970.000,00
4	3	1	06	04 8	Pendapatan BOS SD Negeri D E R M O (UPT SD Negeri 100 Gresik)	132.000.000,00	132.000.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	04 9	Pendapatan BOS SD Negeri Jogodalu (UPT SD Negeri 103 Gresik)	111.300.000,00	110.490.000,00	99,27%	(810.000,00)
4	3	1	06	05 0	Pendapatan BOS SD Negeri Banter (UPT SD Negeri 95 Gresik)	100.500.000,00	99.690.000,00	99,19%	(810.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	05 1	Pendapatan BOS SD Negeri Metatu (UPT SD Negeri 112 Gresik)	85.200.000,00	83.850.000,00	98,42%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	05 2	Pendapatan BOS SD Negeri Bungah (UPT SD Negeri 242 Gresik)	281.700.000,00	280.080.000,00	99,42%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	05 3	Pendapatan BOS SD Negeri Sungonlegowo I (UPT SD Negeri 255 Gresik)	150.300.000,00	144.090.000,00	95,87%	(6.210.000,00)
4	3	1	06	05 4	Pendapatan BOS SD Negeri Masangan (UPT SD Negeri 246 Gresik)	119.700.000,00	118.890.000,00	99,32%	(810.000,00)
4	3	1	06	05 5	Pendapatan BOS SD Negeri Tanjungwedoro (UPT SD Negeri 257 Gresik)	177.000.000,00	178.890.000,00	101,07%	1.890.000,00
4	3	1	06	05 6	Pendapatan BOS SD Negeri Sungonlegowo II (UPT SD Negeri 256 Gresik)	179.700.000,00	182.670.000,00	101,65%	2.970.000,00
4	3	1	06	05 7	Pendapatan BOS SD Negeri Mojopurogede (UPT SD Negeri 248 Gresik)	148.500.000,00	148.770.000,00	100,18%	270.000,00
4	3	1	06	05 8	Pendapatan BOS SD Negeri Sukorejo (UPT SD Negeri 253 Gresik)	126.900.000,00	124.740.000,00	98,30%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	05 9	Pendapatan BOS SD Negeri Bedanten (UPT SD Negeri 241 Gresik)	140.100.000,00	138.480.000,00	98,84%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	06 0	Pendapatan BOS SD Negeri Sidorejo (UPT SD Negeri 252 Gresik)	149.100.000,00	148.020.000,00	99,28%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	06 1	Pendapatan BOS SD Negeri Sidomukti Bungah (UPT SD Negeri 251 Gresik)	150.900.000,00	151.440.000,00	100,36%	540.000,00
4	3	1	06	06 2	Pendapatan BOS SD Negeri Kramat (UPT SD Negeri 245 Gresik)	136.500.000,00	137.850.000,00	100,99%	1.350.000,00
4	3	1	06	06 3	Pendapatan BOS SD Negeri Mojopurowetan (UPT SD Negeri 249 Gresik)	135.600.000,00	138.030.000,00	101,79%	2.430.000,00
4	3	1	06	06 4	Pendapatan BOS SD Negeri Abar Abir (UPT SD Negeri 240 Gresik)	141.900.000,00	144.060.000,00	101,52%	2.160.000,00
4	3	1	06	06 5	Pendapatan BOS SD Negeri Indrodelik (UPT SD Negeri 243 Gresik)	126.600.000,00	126.330.000,00	99,79%	(270.000,00)
4	3	1	06	06 6	Pendapatan BOS SD Negeri Watuagung (UPT SD Negeri 258 Gresik)	103.200.000,00	104.280.000,00	101,05%	1.080.000,00
4	3	1	06	06 7	Pendapatan BOS SD Negeri Melirang (UPT SD Negeri 247 Gresik)	127.500.000,00	128.310.000,00	100,64%	810.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	06 8	Pendapatan BOS SD Negeri Sukowati (UPT SD Negeri 254 Gresik)	108.600.000,00	109.140.000,00	100,50%	540.000,00
4	3	1	06	06 9	Pendapatan BOS SD Negeri Kemangi (UPT SD Negeri 244 Gresik)	107.700.000,00	107.700.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	07 0	Pendapatan BOS SD Negeri Pegundan (UPT SD Negeri 250 Gresik)	90.600.000,00	90.330.000,00	99,70%	(270.000,00)
4	3	1	06	07 1	Pendapatan BOS SD Negeri Cerme Lor (UPT SD Negeri 57 Gresik)	542.700.000,00	532.980.000,00	98,21%	(9.720.000,00)
4	3	1	06	07 2	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Cerme Kidul (UPT SD Negeri 55 Gresik)	483.300.000,00	486.000.000,00	100,56%	2.700.000,00
4	3	1	06	07 3	Pendapatan BOS SD Negeri Betiting (UPT SD Negeri 53 Gresik)	353.700.000,00	360.990.000,00	102,06%	7.290.000,00
4	3	1	06	07 4	Pendapatan BOS SD Negeri Banjarsari (UPT SD Negeri 52 Gresik)	231.300.000,00	226.440.000,00	97,90%	(4.860.000,00)
4	3	1	06	07 5	Pendapatan BOS SD Negeri Dungus (UPT SD Negeri 60 Gresik)	248.100.000,00	251.610.000,00	101,41%	3.510.000,00
4	3	1	06	07 6	Pendapatan BOS SD Negeri Padeg (UPT SD Negeri 70 Gresik)	234.600.000,00	234.681.000,00	100,03%	81.000,00
4	3	1	06	07 7	Pendapatan BOS SD Negeri Ngabetan (UPT SD Negeri 68 Gresik)	182.700.000,00	187.020.000,00	102,36%	4.320.000,00
4	3	1	06	07 8	Pendapatan BOS SD Negeri Ngembung (UPT SD Negeri 69 Gresik)	238.200.000,00	235.500.000,00	98,87%	(2.700.000,00)
4	3	1	06	07 9	Pendapatan BOS SD Negeri Cagak Agung (UPT SD Negeri 54 Gresik)	163.800.000,00	164.340.000,00	100,33%	540.000,00
4	3	1	06	08 0	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sukoanyar (UPT SD Negeri 74 Gresik)	228.300.000,00	227.490.000,00	99,65%	(810.000,00)
4	3	1	06	08 1	Pendapatan BOS SD Negeri Guranganyar (UPT SD Negeri 62 Gresik)	147.600.000,00	153.000.000,00	103,66%	5.400.000,00
4	3	1	06	08 2	Pendapatan BOS SD Negeri Pandu (UPT SD Negeri 71 Gresik)	135.000.000,00	136.620.000,00	101,20%	1.620.000,00
4	3	1	06	08 3	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Cerme Kidul (UPT SD Negeri 56 Gresik)	144.900.000,00	146.520.000,00	101,12%	1.620.000,00
4	3	1	06	08 4	Pendapatan BOS SD Negeri Gedangkulut (UPT SD Negeri 61 Gresik)	183.300.000,00	184.920.000,00	100,88%	1.620.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	08 5	Pendapatan BOS SD Negeri Kandangan (UPT SD Negeri 66 Gresik)	171.600.000,00	171.600.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	08 6	Pendapatan BOS SD Negeri Iker Iker Geger (UPT SD Negeri 63 Gresik)	108.000.000,00	113.130.000,00	104,75%	5.130.000,00
4	3	1	06	08 7	Pendapatan BOS SD Negeri Jono (UPT SD Negeri 64 Gresik)	170.700.000,00	171.510.000,00	100,47%	810.000,00
4	3	1	06	08 8	Pendapatan BOS SD Negeri Wedani (UPT SD Negeri 76 Gresik)	156.300.000,00	154.950.000,00	99,14%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	08 9	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sukoanyar (UPT SD Negeri 73 Gresik)	151.800.000,00	151.260.000,00	99,64%	(540.000,00)
4	3	1	06	09 0	Pendapatan BOS SD Negeri Dadapkuning (UPT SD Negeri 58 Gresik)	150.900.000,00	148.470.000,00	98,39%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	09 1	Pendapatan BOS SD Negeri Kambingan (UPT SD Negeri 65 Gresik)	123.900.000,00	126.870.000,00	102,40%	2.970.000,00
4	3	1	06	09 2	Pendapatan BOS SD Negeri Tambakberas (UPT SD Negeri 75 Gresik)	126.600.000,00	126.870.000,00	100,21%	270.000,00
4	3	1	06	09 3	Pendapatan BOS SD Negeri Dooro (UPT SD Negeri 59 Gresik)	110.400.000,00	113.910.000,00	103,18%	3.510.000,00
4	3	1	06	09 4	Pendapatan BOS SD Negeri Morowudi (UPT SD Negeri 67 Gresik)	106.800.000,00	107.070.000,00	100,25%	270.000,00
4	3	1	06	09 5	Pendapatan BOS SD Negeri Semampir (UPT SD Negeri 72 Gresik)	100.500.000,00	99.150.000,00	98,66%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	09 6	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Petiken (UPT SD Negeri 163 Gresik)	565.200.000,00	574.920.000,00	101,72%	9.720.000,00
4	3	1	06	09 7	Pendapatan BOS SD Negeri Tanjungan (UPT SD Negeri 167 Gresik)	594.600.000,00	594.870.000,00	100,05%	270.000,00
4	3	1	06	09 8	Pendapatan BOS SD Negeri Cangkir (UPT SD Negeri 148 Gresik)	577.500.000,00	574.800.000,00	99,53%	(2.700.000,00)
4	3	1	06	09 9	Pendapatan BOS SD Negeri Mojosarirejo (UPT SD Negeri 158 Gresik)	592.800.000,00	597.930.000,00	100,87%	5.130.000,00
4	3	1	06	10 0	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Driyorejo (UPT SD Negeri 149 Gresik)	443.700.000,00	435.870.000,00	98,24%	(7.830.000,00)
4	3	1	06	10 1	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Bambe (UPT SD Negeri 145 Gresik)	387.900.000,00	378.990.000,00	97,70%	(8.910.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	10 2	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Bambe (UPT SD Negeri 144 Gresik)	319.500.000,00	314.370.000,00	98,39%	(5.130.000,00)
4	3	1	06	10 3	Pendapatan BOS SD Negeri Banjaran (UPT SD Negeri 147 Gresik)	409.200.000,00	411.090.000,00	100,46%	1.890.000,00
4	3	1	06	10 4	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sumpat (UPT SD Negeri 166 Gresik)	292.200.000,00	276.000.000,00	94,46%	(16.200.000,00)
4	3	1	06	10 5	Pendapatan BOS SD Negeri Tenaru (UPT SD Negeri 168 Gresik)	324.600.000,00	323.520.000,00	99,67%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	10 6	Pendapatan BOS SD Negeri Randegansari (UPT SD Negeri 164 Gresik)	272.700.000,00	271.620.000,00	99,60%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	10 7	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Petiken (UPT SD Negeri 161 Gresik)	249.300.000,00	246.060.000,00	98,70%	(3.240.000,00)
4	3	1	06	10 8	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Petiken (UPT SD Negeri 162 Gresik)	263.700.000,00	261.270.000,00	99,08%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	10 9	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Bambe (UPT SD Negeri 146 Gresik)	242.100.000,00	237.510.000,00	98,10%	(4.590.000,00)
4	3	1	06	11 0	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Krikilan (UPT SD Negeri 155 Gresik)	216.900.000,00	216.630.000,00	99,88%	(270.000,00)
4	3	1	06	11 1	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sumpat (UPT SD Negeri 165 Gresik)	294.900.000,00	294.360.000,00	99,82%	(540.000,00)
4	3	1	06	11 2	Pendapatan BOS SD Negeri Wedoroanom (UPT SD Negeri 169 Gresik)	326.400.000,00	323.430.000,00	99,09%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	11 3	Pendapatan BOS SD Negeri Gadung (UPT SD Negeri 151 Gresik)	267.900.000,00	271.680.000,00	101,41%	3.780.000,00
4	3	1	06	11 4	Pendapatan BOS SD Negeri Mulung I (UPT SD Negeri 159 Gresik)	211.200.000,00	206.880.000,00	97,95%	(4.320.000,00)
4	3	1	06	11 5	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Krikilan (UPT SD Negeri 157 Gresik)	200.400.000,00	199.590.000,00	99,60%	(810.000,00)
4	3	1	06	11 6	Pendapatan BOS SD Negeri Mulung II (UPT SD Negeri 160 Gresik)	165.600.000,00	166.680.000,00	100,65%	1.080.000,00
4	3	1	06	11 7	Pendapatan BOS SD Negeri Kesamben Wetan (UPT SD Negeri 154 Gresik)	209.400.000,00	207.240.000,00	98,97%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	11 8	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Karangandong (UPT SD Negeri 153 Gresik)	193.200.000,00	192.120.000,00	99,44%	(1.080.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	11 9	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Karangandong (UPT SD Negeri 152 Gresik)	181.500.000,00	176.370.000,00	97,17%	(5.130.000,00)
4	3	1	06	12 0	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Driyorejo (UPT SD Negeri 150 Gresik)	167.100.000,00	166.020.000,00	99,35%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	12 1	Pendapatan BOS SD Negeri Krikilan II (UPT SD Negeri 156 Gresik)	164.400.000,00	163.320.000,00	99,34%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	12 2	Pendapatan BOS SD Negeri Sumengko (UPT SD Negeri 87 Gresik)	189.000.000,00	184.140.000,00	97,43%	(4.860.000,00)
4	3	1	06	12 3	Pendapatan BOS SD Negeri Sumari (UPT SD Negeri 86 Gresik)	176.100.000,00	176.910.000,00	100,46%	810.000,00
4	3	1	06	12 4	Pendapatan BOS SD Negeri I Tambakrejo (UPT SD Negeri 88 Gresik)	187.800.000,00	186.180.000,00	99,14%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	12 5	Pendapatan BOS SD Negeri Gredeg (UPT SD Negeri 80 Gresik)	182.400.000,00	180.780.000,00	99,11%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	12 6	Pendapatan BOS SD Negeri Duduksampeyan (UPT SD Negeri 78 Gresik)	144.600.000,00	144.600.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	12 7	Pendapatan BOS SD Negeri Tebaloan (UPT SD Negeri 90 Gresik)	133.800.000,00	132.180.000,00	98,79%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	12 8	Pendapatan BOS SD Negeri Petisbenem (UPT SD Negeri 83 Gresik)	136.500.000,00	133.260.000,00	97,63%	(3.240.000,00)
4	3	1	06	12 9	Pendapatan BOS SD Negeri Tambakrejo II (UPT SD Negeri 89 Gresik)	129.300.000,00	128.760.000,00	99,58%	(540.000,00)
4	3	1	06	13 0	Pendapatan BOS SD Negeri Ambeng Ambeng Watangrejo (UPT SD Negeri 77 Gresik)	135.600.000,00	135.060.000,00	99,60%	(540.000,00)
4	3	1	06	13 1	Pendapatan BOS SD Negeri Glanggang (UPT SD Negeri 79 Gresik)	131.100.000,00	131.100.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	13 2	Pendapatan BOS SD Negeri Pandanan (UPT SD Negeri 81 Gresik)	126.600.000,00	124.440.000,00	98,29%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	13 3	Pendapatan BOS SD Negeri Samirplapan (UPT SD Negeri 84 Gresik)	128.400.000,00	127.050.000,00	98,95%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	13 4	Pendapatan BOS SD Negeri Panjunan (UPT SD Negeri 82 Gresik)	133.800.000,00	134.340.000,00	100,40%	540.000,00
4	3	1	06	13 5	Pendapatan BOS SD Negeri Tumapel (UPT SD Negeri 92 Gresik)	124.800.000,00	126.690.000,00	101,51%	1.890.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	13 6	Pendapatan BOS SD Negeri Tirem (UPT SD Negeri 91 Gresik)	114.000.000,00	114.810.000,00	100,71%	810.000,00
4	3	1	06	13 7	Pendapatan BOS SD Negeri Setrohadi (UPT SD Negeri 85 Gresik)	105.000.000,00	103.920.000,00	98,97%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	13 8	Pendapatan BOS SD Negeri Lowayu (UPT SD Negeri 282 Gresik)	379.500.000,00	383.280.000,00	101,00%	3.780.000,00
4	3	1	06	13 9	Pendapatan BOS SD Negeri Mentaras (UPT SD Negeri 284 Gresik)	182.400.000,00	179.970.000,00	98,67%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	14 0	Pendapatan BOS SD Negeri Sawo (UPT SD Negeri 288 Gresik)	166.200.000,00	164.580.000,00	99,03%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	14 1	Pendapatan BOS SD Negeri Madumulyorejo (UPT SD Negeri 283 Gresik)	164.400.000,00	163.050.000,00	99,18%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	14 2	Pendapatan BOS SD Negeri Karangcangkring (UPT SD Negeri 281 Gresik)	143.700.000,00	142.080.000,00	98,87%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	14 3	Pendapatan BOS SD Negeri Tebuwung (UPT SD Negeri 291 Gresik)	159.900.000,00	159.630.000,00	99,83%	(270.000,00)
4	3	1	06	14 4	Pendapatan BOS SD Negeri Dukuhkembar (UPT SD Negeri 279 Gresik)	144.600.000,00	177.900.000,00	123,03%	33.300.000,00
4	3	1	06	14 5	Pendapatan BOS SD Negeri Tiremenggall (UPT SD Negeri 292 Gresik)	149.100.000,00	149.910.000,00	100,54%	810.000,00
4	3	1	06	14 6	Pendapatan BOS SD Negeri Sambogunung (UPT SD Negeri 287 Gresik)	159.000.000,00	164.670.000,00	103,57%	5.670.000,00
4	3	1	06	14 7	Pendapatan BOS SD Negeri Padangbandung (UPT SD Negeri 285 Gresik)	132.000.000,00	133.890.000,00	101,43%	1.890.000,00
4	3	1	06	14 8	Pendapatan BOS SD Negeri Petiyintunggal (UPT SD Negeri 286 Gresik)	136.500.000,00	137.040.000,00	100,40%	540.000,00
4	3	1	06	14 9	Pendapatan BOS SD Negeri Babaksari (UPT SD Negeri 274 Gresik)	130.200.000,00	129.390.000,00	99,38%	(810.000,00)
4	3	1	06	15 0	Pendapatan BOS SD Negeri Bulangan (UPT SD Negeri 278 Gresik)	130.200.000,00	133.440.000,00	102,49%	3.240.000,00
4	3	1	06	15 1	Pendapatan BOS SD Negeri Kalirejo (UPT SD Negeri 280 Gresik)	120.300.000,00	120.300.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	15 2	Pendapatan BOS SD Negeri Baron (UPT SD Negeri 277 Gresik)	123.000.000,00	123.370.000,00	100,30%	370.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	15 3	Pendapatan BOS SD N Kecil Bangeran 2 (UPT SD Negeri 276 Gresik)	111.300.000,00	109.410.000,00	98,30%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	15 4	Pendapatan BOS SD Negeri Babakbawo (UPT SD Negeri 273 Gresik)	119.400.000,00	119.940.000,00	100,45%	540.000,00
4	3	1	06	15 5	Pendapatan BOS SD Negeri Bangeran I (UPT SD Negeri 275 Gresik)	89.700.000,00	90.240.000,00	100,60%	540.000,00
4	3	1	06	15 6	Pendapatan BOS SD Negeri Sembunganyar (UPT SD Negeri 290 Gresik)	91.500.000,00	92.040.000,00	100,59%	540.000,00
4	3	1	06	15 7	Pendapatan BOS SD Negeri Sekargadung (UPT SD Negeri 289 Gresik)	94.200.000,00	94.200.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	15 8	Pendapatan BOS SD Negeri Sidokumpul 2 (UPT SD Negeri 6 Gresik)	468.900.000,00	467.550.000,00	99,71%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	15 9	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sidokumpul (UPT SD Negeri 5 Gresik)	458.100.000,00	455.940.000,00	99,53%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	16 0	Pendapatan BOS SD Negeri Petrokimia Gresik (UPT SD Negeri 4 Gresik)	449.100.000,00	453.960.000,00	101,08%	4.860.000,00
4	3	1	06	16 1	Pendapatan BOS SD Negeri Sidokumpul 3 (UPT SD Negeri 7 Gresik)	447.300.000,00	440.820.000,00	98,55%	(6.480.000,00)
4	3	1	06	16 2	Pendapatan BOS SD Negeri Sukorame (UPT SD Negeri 12 Gresik)	438.300.000,00	433.710.000,00	98,95%	(4.590.000,00)
4	3	1	06	16 3	Pendapatan BOS SD Negeri Tlogopatut 2 (UPT SD Negeri 14 Gresik)	317.700.000,00	316.620.000,00	99,66%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	16 4	Pendapatan BOS SD Negeri Sidorukun (UPT SD Negeri 11 Gresik)	284.400.000,00	284.940.000,00	100,19%	540.000,00
4	3	1	06	16 5	Pendapatan BOS SD Negeri Tlogopojok (UPT SD Negeri 15 Gresik)	261.900.000,00	256.770.000,00	98,04%	(5.130.000,00)
4	3	1	06	16 6	Pendapatan BOS SD Negeri Bedilan Gresik (UPT SD Negeri 1 Gresik)	267.300.000,00	267.840.000,00	100,20%	540.000,00
4	3	1	06	16 7	Pendapatan BOS SD Negeri Lumpur (UPT SD Negeri 3 Gresik)	153.000.000,00	152.190.000,00	99,47%	(810.000,00)
4	3	1	06	16 8	Pendapatan BOS SD Negeri Karangturi (UPT SD Negeri 2 Gresik)	147.600.000,00	143.280.000,00	97,07%	(4.320.000,00)
4	3	1	06	16 9	Pendapatan BOS SD Negeri Sidokumpul 6 (UPT SD Negeri 9 Gresik)	152.100.000,00	148.050.000,00	97,34%	(4.050.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	17 0	Pendapatan BOS Sdn 5 Sidokumpul (UPT SD Negeri 8 Gresik)	146.700.000,00	146.700.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	17 1	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Tlogopatut (UPT SD Negeri 13 Gresik)	186.900.000,00	185.010.000,00	98,99%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	17 2	Pendapatan BOS SD Negeri Sidokumpul 7 (UPT SD Negeri 10 Gresik)	163.500.000,00	162.690.000,00	99,50%	(810.000,00)
4	3	1	06	17 3	Pendapatan BOS SD Negeri Kedanyang (UPT SD Negeri 23 Gresik)	616.500.000,00	617.850.000,00	100,22%	1.350.000,00
4	3	1	06	17 4	Pendapatan BOS SD Negeri Singosari (UPT SD Negeri 35 Gresik)	425.700.000,00	427.050.000,00	100,32%	1.350.000,00
4	3	1	06	17 5	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sidomoro (UPT SD Negeri 32 Gresik)	439.200.000,00	441.900.000,00	100,61%	2.700.000,00
4	3	1	06	17 6	Pendapatan BOS SD Negeri Indro (UPT SD Negeri 19 Gresik)	414.000.000,00	416.700.000,00	100,65%	2.700.000,00
4	3	1	06	17 7	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Randuagung (UPT SD Negeri 28 Gresik)	353.700.000,00	342.360.000,00	96,79%	(11.340.000,00)
4	3	1	06	17 8	Pendapatan BOS SD Negeri Dahanrejo (UPT SD Negeri 16 Gresik)	305.100.000,00	301.860.000,00	98,94%	(3.240.000,00)
4	3	1	06	17 9	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Randuagung (UPT SD Negeri 29 Gresik)	279.900.000,00	282.600.000,00	100,96%	2.700.000,00
4	3	1	06	18 0	Pendapatan BOS SD Negeri Gending (UPT SD Negeri 17 Gresik)	292.500.000,00	289.260.000,00	98,89%	(3.240.000,00)
4	3	1	06	18 1	Pendapatan BOS SD Negeri Gulomantung (UPT SD Negeri 18 Gresik)	237.600.000,00	242.460.000,00	102,05%	4.860.000,00
4	3	1	06	18 2	Pendapatan BOS SD Negeri 4 Randuagung (UPT SD Negeri 30 Gresik)	238.500.000,00	235.800.000,00	98,87%	(2.700.000,00)
4	3	1	06	18 3	Pendapatan BOS SD Negeri Kawisanyar (UPT SD Negeri 21 Gresik)	241.200.000,00	238.230.000,00	98,77%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	18 4	Pendapatan BOS SD Negeri Kebomas (UPT SD Negeri 22 Gresik)	217.800.000,00	212.400.000,00	97,52%	(5.400.000,00)
4	3	1	06	18 5	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Randuagung (UPT SD Negeri 27 Gresik)	182.700.000,00	178.920.000,00	97,93%	(3.780.000,00)
4	3	1	06	18 6	Pendapatan BOS SD Negeri Kembangan (UPT SD Negeri 24 Gresik)	163.800.000,00	168.660.000,00	102,97%	4.860.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	18 7	Pendapatan BOS SD Negeri Segoromadu (UPT SD Negeri 31 Gresik)	159.300.000,00	159.300.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	18 8	Pendapatan BOS SD Negeri Klangonan (UPT SD Negeri 25 Gresik)	141.300.000,00	141.570.000,00	100,19%	270.000,00
4	3	1	06	18 9	Pendapatan BOS SD Negeri 4 Sidomoro (UPT SD Negeri 34 Gresik)	121.500.000,00	122.850.000,00	101,11%	1.350.000,00
4	3	1	06	19 0	Pendapatan BOS SD Negeri Karangkring (UPT SD Negeri 20 Gresik)	174.300.000,00	173.760.000,00	99,69%	(540.000,00)
4	3	1	06	19 1	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sidomoro (UPT SD Negeri 33 Gresik)	113.400.000,00	109.080.000,00	96,19%	(4.320.000,00)
4	3	1	06	19 2	Pendapatan BOS SD Negeri Prambangan (UPT SD Negeri 26 Gresik)	151.800.000,00	149.640.000,00	98,58%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	19 3	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Slempit (UPT SD Negeri 209 Gresik)	259.200.000,00	267.570.000,00	103,23%	8.370.000,00
4	3	1	06	19 4	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Kedamean (UPT SD Negeri 200 Gresik)	284.400.000,00	280.350.000,00	98,58%	(4.050.000,00)
4	3	1	06	19 5	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Slempit (UPT SD Negeri 208 Gresik)	198.900.000,00	198.090.000,00	99,59%	(810.000,00)
4	3	1	06	19 6	Pendapatan BOS SD Negeri Sidoraharjo (UPT SD Negeri 207 Gresik)	271.500.000,00	270.690.000,00	99,70%	(810.000,00)
4	3	1	06	19 7	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Banyuurip (UPT SD Negeri 193 Gresik)	184.500.000,00	185.850.000,00	100,73%	1.350.000,00
4	3	1	06	19 8	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Lampah (UPT SD Negeri 201 Gresik)	195.900.000,00	194.280.000,00	99,17%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	19 9	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Mojowuku (UPT SD Negeri 205 Gresik)	219.300.000,00	221.460.000,00	100,98%	2.160.000,00
4	3	1	06	20 0	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Tanjung (UPT SD Negeri 211 Gresik)	119.700.000,00	120.240.000,00	100,45%	540.000,00
4	3	1	06	20 1	Pendapatan BOS SD Negeri Ngepung (UPT SD Negeri 206 Gresik)	127.800.000,00	127.260.000,00	99,58%	(540.000,00)
4	3	1	06	20 2	Pendapatan BOS SD Negeri Tulung (UPT SD Negeri 212 Gresik)	193.200.000,00	194.820.000,00	100,84%	1.620.000,00
4	3	1	06	20 3	Pendapatan BOS SD Negeri Belahanrejo (UPT SD Negeri 195 Gresik)	179.700.000,00	182.130.000,00	101,35%	2.430.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	20 4	Pendapatan BOS SDN 2 Banyuurip (UPT SD Negeri 194 Gresik)	168.000.000,00	167.730.000,00	99,84%	(270.000,00)
4	3	1	06	20 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Glindah (UPT SD Negeri 198 Gresik)	165.300.000,00	164.760.000,00	99,67%	(540.000,00)
4	3	1	06	20 6	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Menunggal (UPT SD Negeri 203 Gresik)	170.700.000,00	171.510.000,00	100,47%	810.000,00
4	3	1	06	20 7	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Glindah (UPT SD Negeri 197 Gresik)	152.700.000,00	148.650.000,00	97,35%	(4.050.000,00)
4	3	1	06	20 8	Pendapatan BOS SD Negeri Turirejo (UPT SD Negeri 213 Gresik)	150.000.000,00	149.730.000,00	99,82%	(270.000,00)
4	3	1	06	20 9	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Kedamean (UPT SD Negeri 199 Gresik)	152.700.000,00	151.080.000,00	98,94%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	21 0	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Menunggal (UPT SD Negeri 204 Gresik)	137.400.000,00	134.970.000,00	98,23%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	21 1	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Tanjung (UPT SD Negeri 210 Gresik)	129.300.000,00	127.680.000,00	98,75%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	21 2	Pendapatan BOS SD Negeri Cermenlerek (UPT SD Negeri 196 Gresik)	118.500.000,00	121.470.000,00	102,51%	2.970.000,00
4	3	1	06	21 3	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Lampah (UPT SD Negeri 202 Gresik)	118.500.000,00	117.960.000,00	99,54%	(540.000,00)
4	3	1	06	21 4	Pendapatan BOS SD Negeri Pongangan (UPT SD Negeri 43 Gresik)	726.300.000,00	719.550.000,00	99,07%	(6.750.000,00)
4	3	1	06	21 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sukomulyo (UPT SD Negeri 49 Gresik)	453.600.000,00	451.980.000,00	99,64%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	21 6	Pendapatan BOS SD Negeri Manyarejo (UPT SD Negeri 41 Gresik)	294.300.000,00	285.930.000,00	97,16%	(8.370.000,00)
4	3	1	06	21 7	Pendapatan BOS SD Negeri Suci (UPT SD Negeri 47 Gresik)	295.200.000,00	299.520.000,00	101,46%	4.320.000,00
4	3	1	06	21 8	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sembayat (UPT SD Negeri 46 Gresik)	205.800.000,00	202.830.000,00	98,56%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	21 9	Pendapatan BOS SD Negeri Roomo (UPT SD Negeri 44 Gresik)	154.800.000,00	153.720.000,00	99,30%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	22 0	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sembayat (UPT SD Negeri 45 Gresik)	174.300.000,00	175.650.000,00	100,77%	1.350.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	22 1	Pendapatan BOS SD Negeri Manyar Sidomukti (UPT SD Negeri 40 Gresik)	156.600.000,00	163.080.000,00	104,14%	6.480.000,00
4	3	1	06	22 2	Pendapatan BOS SD Negeri Tebalo (UPT SD Negeri 50 Gresik)	153.600.000,00	150.630.000,00	98,07%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	22 3	Pendapatan BOS SD Negeri Leran (UPT SD Negeri 39 Gresik)	168.900.000,00	169.980.000,00	100,64%	1.080.000,00
4	3	1	06	22 4	Pendapatan BOS SD Negeri Yosowilangun (UPT SD Negeri 51 Gresik)	150.900.000,00	157.600.000,00	104,44%	6.700.000,00
4	3	1	06	22 5	Pendapatan BOS SD Negeri Betoyoguci (UPT SD Negeri 36 Gresik)	123.900.000,00	123.900.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	22 6	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sukomulyo (UPT SD Negeri 48 Gresik)	118.500.000,00	118.230.000,00	99,77%	(270.000,00)
4	3	1	06	22 7	Pendapatan BOS SD Negeri Karangrejo (UPT SD Negeri 38 Gresik)	131.100.000,00	135.960.000,00	103,71%	4.860.000,00
4	3	1	06	22 8	Pendapatan BOS SD Negeri Gumeno (UPT SD Negeri 37 Gresik)	123.000.000,00	122.460.000,00	99,56%	(540.000,00)
4	3	1	06	22 9	Pendapatan BOS SD Negeri Morobakung (UPT SD Negeri 42 Gresik)	88.800.000,00	88.530.000,00	99,70%	(270.000,00)
4	3	1	06	23 0	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Menganti (UPT SD Negeri 228 Gresik)	690.300.000,00	683.010.000,00	98,94%	(7.290.000,00)
4	3	1	06	23 1	Pendapatan BOS SD Negeri Pelemwatu (UPT SD Negeri 231 Gresik)	392.400.000,00	401.040.000,00	102,20%	8.640.000,00
4	3	1	06	23 2	Pendapatan BOS SD Negeri Kepatihan (UPT SD Negeri 225 Gresik)	366.300.000,00	362.790.000,00	99,04%	(3.510.000,00)
4	3	1	06	23 3	Pendapatan BOS SD Negeri Bringkang (UPT SD Negeri 217 Gresik)	348.300.000,00	334.530.000,00	96,05%	(13.770.000,00)
4	3	1	06	23 4	Pendapatan BOS SD Negeri Gadingwatu (UPT SD Negeri 220 Gresik)	405.000.000,00	407.160.000,00	100,53%	2.160.000,00
4	3	1	06	23 5	Pendapatan BOS SD Negeri Boteng (UPT SD Negeri 216 Gresik)	377.100.000,00	374.130.000,00	99,21%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	23 6	Pendapatan BOS SD Negeri Sidojangkung (UPT SD Negeri 238 Gresik)	327.600.000,00	331.650.000,00	101,24%	4.050.000,00
4	3	1	06	23 7	Pendapatan BOS SD Negeri Putat Lor I (UPT SD Negeri 234 Gresik)	317.700.000,00	315.000.000,00	99,15%	(2.700.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	23 8	Pendapatan BOS SD Negeri Laban I (UPT SD Negeri 226 Gresik)	264.600.000,00	269.460.000,00	101,84%	4.860.000,00
4	3	1	06	23 9	Pendapatan BOS SD Negeri Sidowungu (UPT SD Negeri 239 Gresik)	231.300.000,00	228.870.000,00	98,95%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	24 0	Pendapatan BOS SD Negeri Domas I (UPT SD Negeri 218 Gresik)	263.700.000,00	258.300.000,00	97,95%	(5.400.000,00)
4	3	1	06	24 1	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Gempolkurung (UPT SD Negeri 222 Gresik)	291.600.000,00	302.130.000,00	103,61%	10.530.000,00
4	3	1	06	24 2	Pendapatan BOS SD Negeri Hendrosari (UPT SD Negeri 223 Gresik)	222.300.000,00	216.900.000,00	97,57%	(5.400.000,00)
4	3	1	06	24 3	Pendapatan BOS SD Negeri Gempolkurung I (UPT SD Negeri 221 Gresik)	206.100.000,00	211.770.000,00	102,75%	5.670.000,00
4	3	1	06	24 4	Pendapatan BOS SD Negeri Mojotengah (UPT SD Negeri 230 Gresik)	169.200.000,00	165.690.000,00	97,93%	(3.510.000,00)
4	3	1	06	24 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Laban (UPT SD Negeri 227 Gresik)	196.800.000,00	191.940.000,00	97,53%	(4.860.000,00)
4	3	1	06	24 6	Pendapatan BOS SD Negeri Hulaan (UPT SD Negeri 224 Gresik)	165.600.000,00	162.900.000,00	98,37%	(2.700.000,00)
4	3	1	06	24 7	Pendapatan BOS SD Negeri Pranti (UPT SD Negeri 233 Gresik)	180.000.000,00	177.570.000,00	98,65%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	24 8	Pendapatan BOS SD Negeri 4 Menganti (UPT SD Negeri 229 Gresik)	136.800.000,00	134.370.000,00	98,22%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	24 9	Pendapatan BOS SD Negeri Setro (UPT SD Negeri 237 Gresik)	186.000.000,00	185.190.000,00	99,56%	(810.000,00)
4	3	1	06	25 0	Pendapatan BOS SD Negeri Boboh (UPT SD Negeri 215 Gresik)	138.600.000,00	141.570.000,00	102,14%	2.970.000,00
4	3	1	06	25 1	Pendapatan BOS SD Negeri Drancang (UPT SD Negeri 219 Gresik)	156.600.000,00	161.920.000,00	103,40%	5.320.000,00
4	3	1	06	25 2	Pendapatan BOS SD Negeri Randupadangan (UPT SD Negeri 236 Gresik)	192.300.000,00	195.000.000,00	101,40%	2.700.000,00
4	3	1	06	25 3	Pendapatan BOS SD Negeri Pengalangan (UPT SD Negeri 232 Gresik)	142.200.000,00	139.770.000,00	98,29%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	25 4	Pendapatan BOS SD Negeri Beton (UPT SD Negeri 214 Gresik)	143.700.000,00	144.510.000,00	100,56%	810.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	25 5	Pendapatan BOS SD Negeri Putat Lor II (UPT SD Negeri 235 Gresik)	124.800.000,00	122.910.000,00	98,49%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	25 6	Pendapatan BOS SD Negeri Sumurber (UPT SD Negeri 321 Gresik)	215.700.000,00	214.350.000,00	99,37%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	25 7	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Dalegan (UPT SD Negeri 311 Gresik)	123.300.000,00	126.270.000,00	102,41%	2.970.000,00
4	3	1	06	25 8	Pendapatan BOS SD Negeri Campurejo (UPT SD Negeri 310 Gresik)	186.900.000,00	190.680.000,00	102,02%	3.780.000,00
4	3	1	06	25 9	Pendapatan BOS SD Negeri Pantenan (UPT SD Negeri 315 Gresik)	162.600.000,00	165.030.000,00	101,49%	2.430.000,00
4	3	1	06	26 0	Pendapatan BOS SD Negeri Petung (UPT SD Negeri 316 Gresik)	154.500.000,00	153.420.000,00	99,30%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	26 1	Pendapatan BOS SD Negeri Prupuh (UPT SD Negeri 317 Gresik)	146.400.000,00	149.640.000,00	102,21%	3.240.000,00
4	3	1	06	26 2	Pendapatan BOS SD Negeri Serah (UPT SD Negeri 318 Gresik)	132.900.000,00	134.520.000,00	101,22%	1.620.000,00
4	3	1	06	26 3	Pendapatan BOS SD Negeri Ketanen (UPT SD Negeri 314 Gresik)	125.700.000,00	126.240.000,00	100,43%	540.000,00
4	3	1	06	26 4	Pendapatan BOS SD Negeri Siwalan (UPT SD Negeri 319 Gresik)	130.200.000,00	131.550.000,00	101,04%	1.350.000,00
4	3	1	06	26 5	Pendapatan BOS SD Negeri Banyutengah (UPT SD Negeri 309 Gresik)	132.000.000,00	132.810.000,00	100,61%	810.000,00
4	3	1	06	26 6	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Surowiti (UPT SD Negeri 323 Gresik)	123.000.000,00	123.270.000,00	100,22%	270.000,00
4	3	1	06	26 7	Pendapatan BOS SD Negeri Sukodono (UPT SD Negeri 320 Gresik)	105.000.000,00	103.110.000,00	98,20%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	26 8	Pendapatan BOS SD Negeri 4 Dalegan (UPT SD Negeri 313 Gresik)	93.300.000,00	94.380.000,00	101,16%	1.080.000,00
4	3	1	06	26 9	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Dalegan (UPT SD Negeri 312 Gresik)	77.100.000,00	75.750.000,00	98,25%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	27 0	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Surowiti (UPT SD Negeri 322 Gresik)	87.900.000,00	86.280.000,00	98,16%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	27 1	Pendapatan BOS SD Negeri Wotan (UPT SD Negeri 324 Gresik)	69.900.000,00	70.170.000,00	100,39%	270.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	27 2	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sawahmulya (UPT SD Negeri 347 Gresik)	258.900.000,00	254.310.000,00	98,23%	(4.590.000,00)
4	3	1	06	27 3	Pendapatan BOS SD Negeri Kotakusuma (UPT SD Negeri 337 Gresik)	240.900.000,00	238.740.000,00	99,10%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	27 4	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Suwari (UPT SD Negeri 359 Gresik)	217.500.000,00	212.640.000,00	97,77%	(4.860.000,00)
4	3	1	06	27 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sidogedungbatu (UPT SD Negeri 350 Gresik)	190.500.000,00	190.500.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	27 6	Pendapatan BOS SD Negeri Pudakit Barat (UPT SD Negeri 345 Gresik)	177.900.000,00	178.710.000,00	100,46%	810.000,00
4	3	1	06	27 7	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Daun (UPT SD Negeri 329 Gresik)	204.000.000,00	206.700.000,00	101,32%	2.700.000,00
4	3	1	06	27 8	Pendapatan BOS SD Negeri 4 Sidogedungbatu (UPT SD Negeri 352 Gresik)	185.100.000,00	184.020.000,00	99,42%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	27 9	Pendapatan BOS SD Negeri Bululanjang 1 (UPT SD Negeri 327 Gresik)	170.700.000,00	168.270.000,00	98,58%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	28 0	Pendapatan BOS SD Negeri Kebunteluk Dalam 1 (UPT SD Negeri 335 Gresik)	154.500.000,00	155.850.000,00	100,87%	1.350.000,00
4	3	1	06	28 1	Pendapatan BOS SD Negeri 5 Sidogedungbatu (UPT SD Negeri 353 Gresik)	162.600.000,00	159.900.000,00	98,34%	(2.700.000,00)
4	3	1	06	28 2	Pendapatan BOS SD Negeri Lebak 3 (UPT SD Negeri 341 Gresik)	144.600.000,00	148.380.000,00	102,61%	3.780.000,00
4	3	1	06	28 3	Pendapatan BOS SD Negeri Bululanjang 2 (UPT SD Negeri 328 Gresik)	149.100.000,00	149.100.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	28 4	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Sidogedungbatu (UPT SD Negeri 351 Gresik)	131.100.000,00	130.938.000,00	99,88%	(162.000,00)
4	3	1	06	28 5	Pendapatan BOS SD Negeri Lebak 2 (UPT SD Negeri 340 Gresik)	128.400.000,00	128.670.000,00	100,21%	270.000,00
4	3	1	06	28 6	Pendapatan BOS SD Negeri Sungai Rujing 2 (UPT SD Negeri 356 Gresik)	119.400.000,00	119.670.000,00	100,23%	270.000,00
4	3	1	06	28 7	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Dekatagung (UPT SD Negeri 333 Gresik)	128.400.000,00	128.400.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	28 8	Pendapatan BOS SD Negeri Sungai Teluk (UPT SD Negeri 358 Gresik)	121.200.000,00	122.550.000,00	101,11%	1.350.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	28 9	Pendapatan BOS SD Negeri Gunung Teguh (UPT SD Negeri 334 Gresik)	128.400.000,00	129.750.000,00	101,05%	1.350.000,00
4	3	1	06	29 0	Pendapatan BOS SD Negeri Sungai Rujing 3 (UPT SD Negeri 357 Gresik)	126.600.000,00	126.330.000,00	99,79%	(270.000,00)
4	3	1	06	29 1	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Suwari (UPT SD Negeri 360 Gresik)	128.400.000,00	126.240.000,00	98,32%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	29 2	Pendapatan BOS SD Negeri Sawahmulya 2 (UPT SD Negeri 348 Gresik)	123.900.000,00	121.740.000,00	98,26%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	29 3	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sidogedungbatu (UPT SD Negeri 349 Gresik)	123.000.000,00	123.270.000,00	100,22%	270.000,00
4	3	1	06	29 4	Pendapatan BOS SD Negeri Pudakit Timur (UPT SD Negeri 346 Gresik)	121.200.000,00	122.280.000,00	100,89%	1.080.000,00
4	3	1	06	29 5	Pendapatan BOS SD Negeri Kumalasa (UPT SD Negeri 338 Gresik)	127.500.000,00	126.960.000,00	99,58%	(540.000,00)
4	3	1	06	29 6	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Patar Selamat (UPT SD Negeri 343 Gresik)	117.600.000,00	116.520.000,00	99,08%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	29 7	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Daun (UPT SD Negeri 330 Gresik)	117.600.000,00	118.950.000,00	101,15%	1.350.000,00
4	3	1	06	29 8	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Kebunteluk Dalam (UPT SD Negeri 336 Gresik)	90.600.000,00	90.060.000,00	99,40%	(540.000,00)
4	3	1	06	29 9	Pendapatan BOS SD Negeri Sungai Rujing 1 (UPT SD Negeri 355 Gresik)	114.000.000,00	112.920.000,00	99,05%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	30 0	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Patarselamat (UPT SD Negeri 344 Gresik)	113.100.000,00	115.260.000,00	101,91%	2.160.000,00
4	3	1	06	30 1	Pendapatan BOS SD Negeri Dekatagung 1 (UPT SD Negeri 332 Gresik)	96.000.000,00	94.920.000,00	98,88%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	30 2	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Balikterus (UPT SD Negeri 325 Gresik)	100.500.000,00	99.960.000,00	99,46%	(540.000,00)
4	3	1	06	30 3	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Balikterus (UPT SD Negeri 326 Gresik)	102.300.000,00	102.570.000,00	100,26%	270.000,00
4	3	1	06	30 4	Pendapatan BOS SD Negeri 6 Sidogedungbatu (UPT SD Negeri 354 Gresik)	94.200.000,00	94.740.000,00	100,57%	540.000,00
4	3	1	06	30 5	Pendapatan BOS SD Negeri Patar Selamat 2 (UPT SD Negeri 342 Gresik)	92.400.000,00	92.400.000,00	100,00%	0,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	30 6	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Daun (UPT SD Negeri 331 Gresik)	80.700.000,00	79.890.000,00	99,00%	(810.000,00)
4	3	1	06	30 7	Pendapatan BOS SD Negeri Lebak 1 (UPT SD Negeri 339 Gresik)	75.300.000,00	76.920.000,00	102,15%	1.620.000,00
4	3	1	06	30 8	Pendapatan BOS SD Negeri Golokan (UPT SD Negeri 260 Gresik)	169.200.000,00	169.200.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	30 9	Pendapatan BOS SD Negeri Wadeng 3 (UPT SD Negeri 272 Gresik)	195.000.000,00	200.400.000,00	102,77%	5.400.000,00
4	3	1	06	31 0	Pendapatan BOS SD Negeri Racitengah (UPT SD Negeri 266 Gresik)	153.600.000,00	155.220.000,00	101,05%	1.620.000,00
4	3	1	06	31 1	Pendapatan BOS SD Negeri Sedagaran (UPT SD Negeri 268 Gresik)	152.700.000,00	154.320.000,00	101,06%	1.620.000,00
4	3	1	06	31 2	Pendapatan BOS Sdn Sukorejo Sidayu (UPT SD Negeri 270 Gresik)	154.500.000,00	154.230.000,00	99,83%	(270.000,00)
4	3	1	06	31 3	Pendapatan BOS SD Negeri Gedangan (UPT SD Negeri 259 Gresik)	144.600.000,00	146.490.000,00	101,31%	1.890.000,00
4	3	1	06	31 4	Pendapatan BOS Sdn Mriyunan (UPT SD Negeri 263 Gresik)	134.700.000,00	134.970.000,00	100,20%	270.000,00
4	3	1	06	31 5	Pendapatan BOS SD Negeri Sidomulyo (UPT SD Negeri 269 Gresik)	128.400.000,00	125.160.000,00	97,48%	(3.240.000,00)
4	3	1	06	31 6	Pendapatan BOS SD Negeri Randuboto (UPT SD Negeri 267 Gresik)	132.900.000,00	130.470.000,00	98,17%	(2.430.000,00)
4	3	1	06	31 7	Pendapatan BOS SD Negeri Wadeng 2 (UPT SD Negeri 271 Gresik)	139.200.000,00	135.960.000,00	97,67%	(3.240.000,00)
4	3	1	06	31 8	Pendapatan BOS SD Negeri Ngawen (UPT SD Negeri 264 Gresik)	117.600.000,00	116.250.000,00	98,85%	(1.350.000,00)
4	3	1	06	31 9	Pendapatan BOS SD Negeri Lasem (UPT SD Negeri 262 Gresik)	110.400.000,00	112.020.000,00	101,47%	1.620.000,00
4	3	1	06	32 0	Pendapatan BOS SD Negeri Kertosono (UPT SD Negeri 261 Gresik)	103.200.000,00	102.660.000,00	99,48%	(540.000,00)
4	3	1	06	32 1	Pendapatan BOS SD Negeri Racikulon (UPT SD Negeri 265 Gresik)	97.800.000,00	97.530.000,00	99,72%	(270.000,00)
4	3	1	06	32 2	Pendapatan BOS SD Negeri Tanjungsari II (UPT SD Negeri 383 Gresik)	182.400.000,00	181.050.000,00	99,26%	(1.350.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	32 3	Pendapatan BOS SD Negeri 4 Tambak (UPT SD Negeri 381 Gresik)	144.900.000,00	142.740.000,00	98,51%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	32 4	Pendapatan BOS SD Negeri 3 Tambak (UPT SD Negeri 380 Gresik)	170.700.000,00	170.700.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	32 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Tambak (UPT SD Negeri 379 Gresik)	124.200.000,00	121.230.000,00	97,61%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	32 6	Pendapatan BOS SD Negeri Tanjungori I (UPT SD Negeri 382 Gresik)	174.300.000,00	172.680.000,00	99,07%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	32 7	Pendapatan BOS SD Negeri Diponggo (UPT SD Negeri 361 Gresik)	149.100.000,00	150.990.000,00	101,27%	1.890.000,00
4	3	1	06	32 8	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Tambak (UPT SD Negeri 378 Gresik)	135.600.000,00	135.330.000,00	99,80%	(270.000,00)
4	3	1	06	32 9	Pendapatan BOS SD Negeri Kepuh Teluk II (UPT SD Negeri 367 Gresik)	138.300.000,00	140.460.000,00	101,56%	2.160.000,00
4	3	1	06	33 0	Pendapatan BOS SD Negeri Kepuh Legundi I (UPT SD Negeri 364 Gresik)	131.100.000,00	130.560.000,00	99,59%	(540.000,00)
4	3	1	06	33 1	Pendapatan BOS SD Negeri Sukalela (UPT SD Negeri 376 Gresik)	128.400.000,00	129.750.000,00	101,05%	1.350.000,00
4	3	1	06	33 2	Pendapatan BOS SD Negeri Sukaoneng (UPT SD Negeri 377 Gresik)	119.400.000,00	119.110.724,00	99,76%	(289.276,00)
4	3	1	06	33 3	Pendapatan BOS SD Negeri Kepuh Legundi II (UPT SD Negeri 365 Gresik)	120.300.000,00	131.220.000,00	109,08%	10.920.000,00
4	3	1	06	33 4	Pendapatan BOS SD Negeri Tanjungori III (UPT SD Negeri 384 Gresik)	120.300.000,00	122.460.000,00	101,80%	2.160.000,00
4	3	1	06	33 5	Pendapatan BOS SD Negeri Teluk Jati Dawang I (UPT SD Negeri 386 Gresik)	113.100.000,00	112.560.000,00	99,52%	(540.000,00)
4	3	1	06	33 6	Pendapatan BOS SD Negeri I Kepuh Teluk (UPT SD Negeri 366 Gresik)	119.400.000,00	119.130.000,00	99,77%	(270.000,00)
4	3	1	06	33 7	Pendapatan BOS SD Negeri Gelam (UPT SD Negeri 362 Gresik)	115.800.000,00	114.720.000,00	99,07%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	33 8	Pendapatan BOS SD Negeri Tanjungori 4 (UPT SD Negeri 385 Gresik)	114.900.000,00	114.360.000,00	99,53%	(540.000,00)
4	3	1	06	33 9	Pendapatan BOS SD Negeri Pekalongan I (UPT SD Negeri 371 Gresik)	100.500.000,00	100.770.000,00	100,27%	270.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	34 0	Pendapatan BOS SD Negeri Grejag (UPT SD Negeri 363 Gresik)	98.700.000,00	99.510.000,00	100,82%	810.000,00
4	3	1	06	34 1	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Telukjatidawang (UPT SD Negeri 387 Gresik)	100.500.000,00	99.690.000,00	99,19%	(810.000,00)
4	3	1	06	34 2	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Peromaan (UPT SD Negeri 373 Gresik)	104.100.000,00	105.180.000,00	101,04%	1.080.000,00
4	3	1	06	34 3	Pendapatan BOS SD Negeri 4 Telukjatidawang (UPT SD Negeri 389 Gresik)	93.300.000,00	93.030.000,00	99,71%	(270.000,00)
4	3	1	06	34 4	Pendapatan BOS SD Negeri Klompang Gubug I (UPT SD Negeri 369 Gresik)	96.000.000,00	95.460.000,00	99,44%	(540.000,00)
4	3	1	06	34 5	Pendapatan BOS SD Negeri Teluk Jati Dawang III (UPT SD Negeri 388 Gresik)	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	34 6	Pendapatan BOS Sdn 3 Kepuhteluk (UPT SD Negeri 368 Gresik)	95.100.000,00	95.640.000,00	100,57%	540.000,00
4	3	1	06	34 7	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Klompanggubug (UPT SD Negeri 370 Gresik)	93.300.000,00	93.570.000,00	100,29%	270.000,00
4	3	1	06	34 8	Pendapatan BOS Sdn 2 Peromaan (UPT SD Negeri 374 Gresik)	88.800.000,00	88.260.000,00	99,39%	(540.000,00)
4	3	1	06	34 9	Pendapatan BOS Sdn 3 Peromaan (UPT SD Negeri 375 Gresik)	83.400.000,00	82.320.000,00	98,71%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	35 0	Pendapatan BOS SD Negeri Pekalongan II (UPT SD Negeri 372 Gresik)	71.700.000,00	71.160.000,00	99,25%	(540.000,00)
4	3	1	06	35 1	Pendapatan BOS SD Negeri Pangkah Wetan I (UPT SD Negeri 304 Gresik)	287.100.000,00	290.340.000,00	101,13%	3.240.000,00
4	3	1	06	35 2	Pendapatan BOS SD Negeri Pangkahkulon (UPT SD Negeri 303 Gresik)	190.500.000,00	188.340.000,00	98,87%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	35 3	Pendapatan BOS SD Negeri Sekapuk I (UPT SD Negeri 306 Gresik)	177.900.000,00	178.440.000,00	100,30%	540.000,00
4	3	1	06	35 4	Pendapatan BOS SD Negeri Sekapuk II (UPT SD Negeri 307 Gresik)	162.600.000,00	162.330.000,00	99,83%	(270.000,00)
4	3	1	06	35 5	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Banyuurip (UPT SD Negeri 294 Gresik)	145.500.000,00	144.960.000,00	99,63%	(540.000,00)
4	3	1	06	35 6	Pendapatan BOS SD Negeri Karangrejo Ujungpangkah (UPT SD Negeri 299 Gresik)	129.300.000,00	129.840.000,00	100,42%	540.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	35 7	Pendapatan BOS Sdn I Banyuurip (UPT SD Negeri 293 Gresik)	135.600.000,00	132.900.000,00	98,01%	(2.700.000,00)
4	3	1	06	35 8	Pendapatan BOS SD Negeri Ngimboh (UPT SD Negeri 302 Gresik)	126.600.000,00	127.680.000,00	100,85%	1.080.000,00
4	3	1	06	35 9	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Pangkahwetan (UPT SD Negeri 305 Gresik)	133.800.000,00	130.290.000,00	97,38%	(3.510.000,00)
4	3	1	06	36 0	Pendapatan BOS Sdn Bolo (UPT SD Negeri 295 Gresik)	127.500.000,00	127.770.000,00	100,21%	270.000,00
4	3	1	06	36 1	Pendapatan BOS SD Negeri Glatik (UPT SD Negeri 297 Gresik)	126.600.000,00	127.410.000,00	100,64%	810.000,00
4	3	1	06	36 2	Pendapatan BOS SD Negeri Ketapanglor (UPT SD Negeri 301 Gresik)	107.700.000,00	106.890.000,00	99,25%	(810.000,00)
4	3	1	06	36 3	Pendapatan BOS SD Negeri Kebonagung (UPT SD Negeri 300 Gresik)	95.100.000,00	94.290.000,00	99,15%	(810.000,00)
4	3	1	06	36 4	Pendapatan BOS SD Negeri Tanggawanan (UPT SD Negeri 308 Gresik)	87.900.000,00	87.630.000,00	99,69%	(270.000,00)
4	3	1	06	36 5	Pendapatan BOS SD Negeri Gosari (UPT SD Negeri 298 Gresik)	80.700.000,00	80.160.000,00	99,33%	(540.000,00)
4	3	1	06	36 6	Pendapatan BOS SD Negeri Cangaan (UPT SD Negeri 296 Gresik)	79.800.000,00	78.990.000,00	98,98%	(810.000,00)
4	3	1	06	36 7	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Wringinanom (UPT SD Negeri 192 Gresik)	350.100.000,00	345.780.000,00	98,77%	(4.320.000,00)
4	3	1	06	36 8	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sumengko (UPT SD Negeri 188 Gresik)	249.300.000,00	242.010.000,00	97,08%	(7.290.000,00)
4	3	1	06	36 9	Pendapatan BOS SD Negeri Kepuh Klagen (UPT SD Negeri 172 Gresik)	300.300.000,00	296.790.000,00	98,83%	(3.510.000,00)
4	3	1	06	37 0	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Pasinan Lemah Putih (UPT SD Negeri 178 Gresik)	223.200.000,00	218.070.000,00	97,70%	(5.130.000,00)
4	3	1	06	37 1	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sumberame (UPT SD Negeri 183 Gresik)	256.200.000,00	256.740.000,00	100,21%	540.000,00
4	3	1	06	37 2	Pendapatan BOS SD Negeri Sembung (UPT SD Negeri 181 Gresik)	258.000.000,00	260.160.000,00	100,84%	2.160.000,00
4	3	1	06	37 3	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Kesamben Kulon (UPT SD Negeri 173 Gresik)	229.200.000,00	230.820.000,00	100,71%	1.620.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	37 4	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sumengko (UPT SD Negeri 187 Gresik)	215.700.000,00	210.840.000,00	97,75%	(4.860.000,00)
4	3	1	06	37 5	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Wates Tanjung (UPT SD Negeri 189 Gresik)	217.500.000,00	213.720.000,00	98,26%	(3.780.000,00)
4	3	1	06	37 6	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Pasinan Lemah Putih (UPT SD Negeri 179 Gresik)	203.100.000,00	200.940.000,00	98,94%	(2.160.000,00)
4	3	1	06	37 7	Pendapatan BOS SD Negeri Sumbergede (UPT SD Negeri 184 Gresik)	195.900.000,00	194.010.000,00	99,04%	(1.890.000,00)
4	3	1	06	37 8	Pendapatan BOS SD Negeri Sooko (UPT SD Negeri 182 Gresik)	232.800.000,00	231.180.000,00	99,30%	(1.620.000,00)
4	3	1	06	37 9	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Kedunganyar (UPT SD Negeri 170 Gresik)	141.300.000,00	138.330.000,00	97,90%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	38 0	Pendapatan BOS SD Negeri Pedagangan (UPT SD Negeri 180 Gresik)	211.200.000,00	208.230.000,00	98,59%	(2.970.000,00)
4	3	1	06	38 1	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Kesamben Kulon (UPT SD Negeri 174 Gresik)	193.200.000,00	193.470.000,00	100,14%	270.000,00
4	3	1	06	38 2	Pendapatan BOS SD Negeri Mondoluku (UPT SD Negeri 177 Gresik)	180.600.000,00	179.520.000,00	99,40%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	38 3	Pendapatan BOS SD Negeri Lebanisoko (UPT SD Negeri 175 Gresik)	173.400.000,00	169.350.000,00	97,66%	(4.050.000,00)
4	3	1	06	38 4	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Sumberwaru (UPT SD Negeri 185 Gresik)	194.100.000,00	193.290.000,00	99,58%	(810.000,00)
4	3	1	06	38 5	Pendapatan BOS SD Negeri 1 Wringinanom (UPT SD Negeri 191 Gresik)	177.000.000,00	174.300.000,00	98,47%	(2.700.000,00)
4	3	1	06	38 6	Pendapatan BOS SD Negeri Lebaniwaras (UPT SD Negeri 176 Gresik)	177.900.000,00	180.330.000,00	101,37%	2.430.000,00
4	3	1	06	38 7	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Kedunganyar (UPT SD Negeri 171 Gresik)	160.800.000,00	159.720.000,00	99,33%	(1.080.000,00)
4	3	1	06	38 8	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Sumberwaru (UPT SD Negeri 186 Gresik)	135.600.000,00	132.090.000,00	97,41%	(3.510.000,00)
4	3	1	06	38 9	Pendapatan BOS SD Negeri 2 Wates Tanjung (UPT SD Negeri 190 Gresik)	126.600.000,00	129.570.000,00	102,35%	2.970.000,00
4	3	1	06	39 0	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Gresik (UPT SMP Negeri 1 Gresik)	1.051.600.000,00	1.048.630.000,00	99,72%	(2.970.000,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	39 1	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Gresik (UPT SMP Negeri 2 Gresik)	839.300.000,00	838.970.000,00	99,96%	(330.000,00)
4	3	1	06	39 2	Pendapatan BOS SMP Negeri 3 Gresik (UPT SMP Negeri 3 Gresik)	943.800.000,00	944.130.000,00	100,03%	330.000,00
4	3	1	06	39 3	Pendapatan BOS SMP Negeri 4 Gresik (UPT SMP Negeri 4 Gresik)	928.400.000,00	932.030.000,00	100,39%	3.630.000,00
4	3	1	06	39 4	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Kebomas (UPT SMP Negeri 20 Gresik)	943.800.000,00	944.130.000,00	100,03%	330.000,00
4	3	1	06	39 5	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Kebomas (UPT SMP Negeri 22 Gresik)	944.900.000,00	945.230.000,00	100,03%	330.000,00
4	3	1	06	39 6	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Manyar (UPT SMP Negeri 17 Gresik)	931.700.000,00	939.950.000,00	100,89%	8.250.000,00
4	3	1	06	39 7	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Manyar (UPT SMP Negeri 25 Gresik)	786.000.000,00	785.010.000,00	99,87%	(990.000,00)
4	3	1	06	39 8	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Bungah (UPT SMP Negeri 10 Gresik)	732.600.000,00	732.930.000,00	100,05%	330.000,00
4	3	1	06	39 9	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Sidayu (UPT SMP Negeri 6 Gresik)	654.500.000,00	656.480.000,00	100,30%	1.980.000,00
4	3	1	06	40 0	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Sidayu (UPT SMP Negeri 23 Gresik)	295.400.000,00	303.980.000,00	102,90%	8.580.000,00
4	3	1	06	40 1	Pendapatan BOS SMP Negeri 3 Sidayu (UPT SMP Negeri 30 Gresik)	288.200.000,00	274.340.000,00	95,19%	(13.860.000,00)
4	3	1	06	40 2	Pendapatan BOS SMP Negeri 4 Sidayu (UPT SMP Negeri 32 Gresik)	221.700.000,00	221.040.000,00	99,70%	(660.000,00)
4	3	1	06	40 3	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Dukun (UPT SMP Negeri 11 Gresik)	520.900.000,00	537.070.000,00	103,10%	16.170.000,00
4	3	1	06	40 4	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Ujungpangkah (UPT SMP Negeri 13 Gresik)	393.800.000,00	396.110.000,00	100,59%	2.310.000,00
4	3	1	06	40 5	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Panceng (UPT SMP Negeri 21 Gresik)	264.000.000,00	264.891.000,00	100,34%	891.000,00
4	3	1	06	40 6	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Cerme (UPT SMP Negeri 5 Gresik)	1.070.300.000,00	1.063.700.000,00	99,38%	(6.600.000,00)
4	3	1	06	40 7	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Cerme (UPT SMP Negeri 24 Gresik)	793.700.000,00	794.360.000,00	100,08%	660.000,00

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	1	06	40 8	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Duduksampeyan (UPT SMP Negeri 15 Gresik)	775.500.000,00	787.380.000,00	101,53%	11.880.000,00
4	3	1	06	40 9	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Benjeng (UPT SMP Negeri 14 Gresik)	942.700.000,00	942.700.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	41 0	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Benjeng (UPT SMP Negeri 28 Gresik)	612.700.000,00	617.980.000,00	100,86%	5.280.000,00
4	3	1	06	41 1	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Balongpanggang (UPT SMP Negeri 9 Gresik)	839.300.000,00	840.620.000,00	100,16%	1.320.000,00
4	3	1	06	41 2	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Balongpanggang (UPT SMP Negeri 27 Gresik)	478.000.000,00	478.000.000,00	100,00%	0,00
4	3	1	06	41 3	Pendapatan BOS SMP Negeri 3 Balongpanggang (UPT SMP Negeri 31 Gresik)	393.800.000,00	388.520.000,00	98,66%	(5.280.000,00)
4	3	1	06	41 4	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Menganti (UPT SMP Negeri 18 Gresik)	1.043.900.000,00	1.046.210.000,00	100,22%	2.310.000,00
4	3	1	06	41 5	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Menganti (UPT SMP Negeri 29 Gresik)	937.200.000,00	938.190.000,00	100,11%	990.000,00
4	3	1	06	41 6	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Kedamean (UPT SMP Negeri 16 Gresik)	942.700.000,00	849.310.000,00	90,09%	(93.390.000,00)
4	3	1	06	41 7	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Wringinanom (UPT SMP Negeri 12 Gresik)	938.300.000,00	939.620.000,00	100,14%	1.320.000,00
4	3	1	06	41 8	Pendapatan BOS SMP Negeri 2 Wringinanom (UPT SMP Negeri 26 Gresik)	660.000.000,00	672.870.000,00	101,95%	12.870.000,00
4	3	1	06	41 9	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Sangkapura (UPT SMP Negeri 7 Gresik)	630.900.000,00	630.570.000,00	99,95%	(330.000,00)
4	3	1	06	42 0	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Tambak (UPT SMP Negeri 19 Gresik)	292.600.000,00	294.250.000,00	100,56%	1.650.000,00
4	3	1	06	42 1	Pendapatan BOS SMP Negeri 1 Driyorejo (UPT SMP Negeri 8 Gresik)	1.155.000.000,00	1.157.310.000,00	100,20%	2.310.000,00
4	3	1	06	42 2	Pendapatan BOS SMP Negeri 33 Driyorejo (UPT SMP Negeri 33 GRESIK)	192.000.000,00	244.470.000,00	127,33%	52.470.000,00
4	3	1	06	42 3	Pendapatan BOS SMP Negeri Satu Atap Sangkapura (UPT SMP Negeri Satu Atap)	115.000.000,00	118.630.000,00	103,16%	3.630.000,00
4	3	3			DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	213.078.929.000,00	199.149.740.485,00	93,46%	(13.929.188.515,00)

KODE REKENING					URAIAN	TARGET PERUBAHAN 2020	REALISASI s.d. BULAN DESEMBER	Efektifitas	Selisih
1					2	3	4	5	6
4	3	3	0 1		DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	213.078.929.000,00	199.149.740.485,00	93,46%	(13.929.188.515,00)
4	3	3	01	00 1	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	56.701.000.000,00	54.128.300.360,00	95,46%	(2.572.699.640,00)
4	3	3	01	00 3	BAGI HASIL DARI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	31.444.430.000,00	32.889.939.635,00	104,60%	1.445.509.635,00
4	3	3	01	00 5	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	75.151.615.000,00	56.660.778.557,00	75,40%	(18.490.836.443,00)
4	3	3	01	00 7	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	872.728.000,00	700.009.709,00	80,21%	(172.718.291,00)
4	3	3	01	00 8	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	48.909.156.000,00	54.770.712.224,00	111,98%	5.861.556.224,00
4	3	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	357.834.778.000,00	367.707.457.000,00	102,76%	9.872.679.000,00
4	3	4	0 1		DANA PENYESUAIAN	357.834.778.000,00	367.707.457.000,00	102,76%	9.872.679.000,00
4	3	4	01	01 8	DANA DESA	284.325.494.000,00	284.325.494.000,00	100,00%	0,00
4	3	4	01	01 9	DANA INSENTIF DAERAH	73.509.284.000,00	83.381.963.000,00	113,43%	9.872.679.000,00
4	3	5			BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	16.832.613.350,00	16.832.613.350,00	100,00%	0,00
4	3	5	0 1		BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	16.832.613.350,00	16.832.613.350,00	100,00%	0,00
4	3	5	01	00 1	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TIMUR	16.832.613.350,00	16.832.613.350,00	100,00%	0,00

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Rp3.095.541.249.535,02 atau mencapai 93,34% dari Target Rp3.316.580.535.001,57 dengan komponen rincian belanja sebagaimana berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga. Pada Tahun 2020, Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp2.144.554.402.611,18 dan terealisasi sebesar Rp2.030.629.073.905,32 atau mencapai 94,68%; dan
- b. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah Barang, Hibah Barang /Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat selain Hibah dan Bantuan Sosial, Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Operasional dan Belanja Modal. Pada Tahun 2020, Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp1.172.026.132.390,39 dan terealisasi sebesar Rp1.064.912.175.629,70 atau mencapai 90,86%

Adapun rincian belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdapat pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.29
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Efektifitas	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA DAERAH	3.316.580.535.001,57	3.095.541.249.535,02	93,34%	(221.016.461.066,55)
2.1	Belanja Tidak Langsung	2.144.554.402.611,18	2.030.629.073.905,32	94,68%	(113.925.328.705,86)
2.1.1	Belanja Pegawai	858.546.593.221,18	822.860.824.907,16	96%	(35.685.768.314,02)
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	309.995.675.000,00	301.260.743.200,00	97%	(8.734.931.800,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19.183.200.000,00	18.853.400.000,00	98%	(329.800.000,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	98.971.989.000,00	81.402.823.100,00	82%	(17.569.165.900,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	528.877.021.000,00	528.422.021.000,00	100%	(455.000.000,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	328.979.924.390,00	277.829.261.698,16	84%	(51.150.662.691,84)
2.2	Belanja Langsung	1.172.026.132.390,39	1.064.912.175.629,70	90,86%	(107.111.132.360,69)

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp305.932.418.103,27. Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik ditargetkan sebesar Rp462.004.151.544,22 dan terealisasi sebesar Rp462.004.151.544,22 atau mencapai 100%. dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.30
Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Efektifitas	LEBIH / (KURANG)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	462.004.151.544,22	462.004.151.544,22	100,00%	0,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	462.004.151.544,22	462.004.151.544,22	100,00%	0,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	462.004.151.544,22	462.004.151.544,22	100,00%	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	462.004.151.544,22	462.004.151.544,22	1,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00		0,00
	Pembiayaan Neto	462.004.151.544,22	462.004.151.544,22	1,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	305.935.018.103,27		305.935.018.103,27

Sumber: BPPKAD Tahun 2021 Tanggal 02 Maret 2021

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2020 dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19. Secara epidemiologi, penyebaran wabah ini telah dimulai sejak Desember 2019 di Wuhan, China dan terus ke berbagai penjuru dunia hingga ditetapkan *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Sejak ditemukan Kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret tahun 2020, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi tersebut baik dalam pemulihan ekonomi maupun penanganan kedaruratan kesehatan.

Dalam tataran pengeluaran keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBD mengalami berbagai perubahan mengacu pada berbagai kebijakan penanganan pandemi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD. Pemerintah Kabupaten Gresik

juga telah menetapkan Keputusan Bupati Gresik Nomor: 188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Gresik. Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020 mengalami 4 (empat) kali pergeseran atau *refocusing* anggaran guna penyesuaian penanganan pandemi Covid-19.

Secara umum, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan sebagaimana Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang merupakan penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah selaras baik dalam dengan Dokumen Perencanaan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagaimana berikut:

1. Estimasi pendapatan Perubahan APBD menurun Rp560.058.734.719 atau 16,40% dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah mencapai 29,86%, Dana Perimbangan sebesar 9,52%, dan lain-lain pendapatan Daerah yang 9,30%;
2. Pelaksanaan Belanja menurun Rp251.713.163.174 atau 7,05% dengan komposisi peningkatan belanja tidak langsung mencapai 15,75% yang dipengaruhi oleh peningkatan belanja tidak terduga guna penanganan darurat kesehatan dan pemulihan dampak sosial ekonomi mencapai Rp326.479.924.390 sedangkan belanja langsung menurun 31,68% berkurang dari Rp1.715.549.946.570 menjadi Rp1.172.026.132.390.

2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan

Perubahan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp2.854.576.383.457 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp816.210.832.745 turun Rp347.462.081.131 , Dana Perimbangan Rp1.355.693.530.362 turun Rp142.582.560.938 dan Lain Lain

Pendapatan Daerah yang Sah Rp682.672.020.350 turun Rp70.014.092.650 sebagaimana berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	PENDAPATAN	3.414.635.118.176	2.854.576.383.457	-560.058.734.719	-16,40%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.163.672.913.876	816.210.832.745	-347.462.081.131	-29,86%
	DANA PERIMBANGAN	1.498.276.091.300	1.355.693.530.362	-142.582.560.938	-9,52%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	752.686.113.000	682.672.020.350	-70.014.092.650	-9,30%

Sumber: BPPKAD KAb. Gresik Tahun 2021

2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah turun Rp347.462.081.131 didominasi dengan turunnya obyek pendapatan pada Pajak Daerah dengan persentase penurunan 28,57% dari Target Awal yang ditetapkan di APBD 2020.

Tabel 2.2
Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	Pendapatan Asli Daerah	1.163.672.913.876	816.210.832.745	-347.462.081.131	-29,86%
	Hasil Pajak Daerah	760.994.000.000	543.600.000.000	-217.394.000.000	-28,57%
	Retribusi Daerah	112.482.403.876	62.429.175.437	-50.053.228.439	-44,50%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.607.000.000	12.221.274.794	-385.725.206	-3,06%
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	277.589.510.000	197.960.382.514	-79.629.127.486	-28,69%

Sumber: BPPKAD KAb. Gresik Tahun 2021

2.1.1.1 Kebijakan Perubahan Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak

daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis. Kebijakan Perubahan Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Hasil Pajak Daerah Tahun 2020

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	HASIL PAJAK DAERAH	760.994.000.000	543.600.000.000	-217.394.000.000	-28,57%
	Pajak Hotel	8.800.000.000	4.500.000.000	-4.300.000.000	-48,86%
4	Hotel Bintang Tiga	5.800.000.00	2.965.000.000	-2.835.000.000	
5	Hotel Bintang Dua	1.350.000.000	690.000.000	-660.000.000	-48,89%
9	Hotel Melati Satu	1.350.000.000	690.000.000	-660.000.000	-48,89%
12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/- Hostel/Rumah Kos	300.000.000	155.000.000	-145.000.000	-48,33%
	Pajak Restoran	31.500.000.000	21.260.000.000	-10.240.000.000	-32,51%
1	Restoran	18.800.000.000	12.688.000.000	-6.112.000.000	-32,51%
2	Rumah Makan	8.200.000.000	5.534.000.000	-2.666.000.000	-32,51%
5	Katering	4.492.500.000	3.032.000.000	-1.460.500.000	-32,51%
6	Warung	7.500.000	6.000.000	-1.500.000	-20,00%
	Pajak Hiburan	9.234.000.000	2.360.000.000	-6.874.000.000	-74,44%
1	Tontonan Film/Bioskop/TV kabel	5.590.000.000	1.428.000.000	-4.162.000.000	-74,45%
2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	47.000.000	12.000.000	-35.000.000	-74,47%
10	Permainan Biliar	150.000.000	38.000.000	-112.000.000	-74,67%
15	Permainan Ketangkasan	2.500.000.000	638.000.000	-1.862.000.000	-74,48%
18	Pusat Kebugaran	210.000.000	53.000.000	-157.000.000	-74,76%
19	Pertandingan Olahraga	165.000.000	42.000.000	-123.000.000	-74,55%
20	Kolam Renang	469.000.000	119.000.000	-350.000.000	-74,63%
21	Hiburan dunia anak	103.000.000	30.000.000	-73.000.000	-70,87%
	Pajak Reklame	3.900.000.000	3.900.000.000	-	
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	2.230.000.000	2.230.000.000	-	
2	Reklame Kain	1.670.000.000	1.670.000.000	-	
	Pajak Penerangan Jalan	252.560.000.000	208.000.000.000	-44.560.000.000	-17,64%
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	231.460.000.000	194.000.000.000	-37.460.000.000	-16,18%
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	21.100.000.000	14.000.000.000	-7.100.000.000	-33,65%
	Pajak Parkir	6.000.000.000	5.000.000.000	-1.000.000.000	-16,67%
1	Pajak Parkir.	6.000.000.000	5.000.000.000	-1.000.000.000	-16,67%
	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.080.000.000	80.000.000	8,00%

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
1	Pajak Air Tanah.	1.000.000.000	1.080.000.000	80.000.000	8,00%
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000	2.500.000.000	-2.500.000.000	-50,00%
4	Batu Kapur	5.000.000.000	2.500.000.000	-2.500.000.000	-50,00%
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.	131.000.000.000	105.000.000.000	-26.000.000.000	-19,85%
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	131.000.000.000	105.000.000.000	-26.000.000.000	-19,85%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	312.000.000.000	190.000.000.000	-122.000.000.000	-39,10%
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	312.000.000.000	190.000.000.000	-122.000.000.000	-39,10%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2021

Hampir semua sektor pada Pajak Daerah mengalami penurunan yang signifikan kecuali pada Pajak Reklame. Pajak Hotel turun 28,57%, Pajak Restoran turun 32,51%, Pajak Hiburan turun 74,44%, Pajak Penerangan Jalan turun 17,64%, Pajak Parkir turun 16,67%, Pajak Air Tanah turun 8,00%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan turun 50,00%, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan turun 19,85% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan turun 39,10%.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut retribusi daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sumber-sumber penerimaan retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah 7 (tujuh) jenis Retribusi Jasa Umum, 7 (tujuh) jenis Retribusi Jasa Usaha dan 3 (tiga) jenis Retribusi Perizinan

Tertentu. Retribusi Daerah di Perubahan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan Rp62.429.175.437 dari Target Sebelumnya Rp112.482.403.876.

Tabel 2.4
Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2020

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	RETRIBUSI DAERAH	112.482.403.876	62.429.175.437	-50.053.228.439	-44,50%
	Retribusi Jasa Umum	24.631.053.876	13.721.794.000	-10.909.259.876	-44,29%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.763.520.876	5.500.000.000	736.479.124	15,46%
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.053.000.000	802.673.000	-250.327.000	-23,77%
5	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	12.000.000.000	1.200.000.000	-10.800.000.000	-90,00%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	3.304.748.000	2.519.121.000	-785.627.000	-23,77%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.500.000.000	2.100.000.000	-400.000.000	-16,00%
11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.785.000	100.000.000	90.215.000	921,97%
14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,00%
	Retribusi Jasa Usaha	6.100.000.000	5.981.406.437	-118.593.563	-1,94%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.105.000.000	4.495.387.437	2.390.387.437	113,56%
3	Retribusi Tempat Pelelangan	18.000.000	17.133.000	-867.000	-4,82%
4	Retribusi Terminal	100.000.000	95.168.000	-4.832.000	-4,83%
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	700.000.000	560.000.000	-140.000.000	-20,00%
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	130.000.000	123.718.000	-6.282.000	-4,83%
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.777.000.000	550.000.000	-2.227.000.000	-80,19%
11	Retribusi Penyeberangan di Air	270.000.000	140.000.000	-130.000.000	-48,15%
	Retribusi Perizinan Tertentu	81.751.350.000	42.725.975.000	-39.025.375.000	-47,74%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	80.000.000.000	40.224.625.000	-39.775.375.000	-49,72%
4	Retribusi Izin Trayek	1.350.000	1.350.000	-	
6	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	1.750.000.000	2.500.000.000	750.000.000	42,86%

Sumber: BPPKAD KAb. Gresik Tahun 2021

Penurunan retribusi Daerah terbesar pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang turun 39.775.375.000, disusul dengan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum turun Rp10.800.000.000.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah (BUMN) dan Swasta. Bagian laba atas penyertaan modal meningkat sesuai dengan performa perusahaan tersebut dan jumlah penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mempunyai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, PT Gresik Migas, PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp12.221.274.794

Tabel 2.5

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2020

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.607.000.000	12.221.274.794	-385.725.206	-3,06%
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.607.000.000	12.221.274.794	-385.725.206	-3,06%
2	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik	600.000.000	600.000.000	-	
3	PT Gresik Migas	1.000.000.000	1.000.000.000	-	
4	PT Bank Jatim	11.000.000.000	10.614.274.794	-385.725.206	-3,51%
5	PT BPR Jatim	7.000.000	7.000.000	-	

Sumber: BPPKAD KAb. Gresik Tahun 2021

2.1.1.4 Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum , Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah dan Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 diperkirakan akan mencapai Rp197.960.382.514 mengalami perubahan target dari Rp277.589.510.000 atau turun Rp79.629.127.486)

Tabel 2.6
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2020

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	277.589.510.000	197.960.382.514	-79.629.127.486	-28,69%
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.000.000	67.494.000	-132.506.000	-66,25%
10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	200.000.000	67.494.000	-132.506.000	-66,25%
	Penerimaan Jasa Giro	4.000.000.000	4.700.000.000	700.000.000	17,50%
1	Jasa Giro Kas Daerah	4.000.000.000	4.700.000.000	700.000.000	17,50%
	Pendapatan Bunga deposito	25.000.000.000	10.000.000.000	-15.000.000.000	-60,00%
1	Rekening Deposito pada Bank Jatim	25.000.000.000	10.000.000.000	-15.000.000.000	-60,00%
	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	226.582.033.440	166.894.951.814	-59.687.081.626	-26,34%
	Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	21.807.476.560	16.297.936.700	-5.509.539.860	-25,26%

Sumber: BPPKAD KAb. Gresik Tahun 2021

2.1.2 Dana Perimbangan

Pendapatan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 turun Rp142.582.560.938 dari target awal yang ditetapkan Rp1.498.276.091.300 menjadi Rp1.355.693.530.362.

2.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan dari dana bagi hasil mencapai Rp165.926.192.160,00.

Tabel 2.7
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	157.763.759.300	181.573.308.362	23.809.549.062	15,09%
	Bagi Hasil Pajak	117.995.598.300	146.267.097.663	28.271.499.363	23,96%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	35.001.004.000	31.697.906.662	-3.303.097.338	-9,44%
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	66.982.631.000	97.641.093.001	30.658.462.001	45,77%
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	16.011.963.300	16.928.098.000	916.134.700	5,72%
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	39.768.161.000	35.306.210.699	-4.461.950.301	-11,22%
6	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	502.790.000	1.588.988.903	1.086.198.903	216,03%
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	30.916.887.000	28.415.532.691	-2.501.354.309	-8,09%
9	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	7.724.179.000	4.167.593.898	-3.556.585.102	-46,04%
10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	32.390.000	44.233.524	11.843.524	36,57%
11	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan	258.310.000	365.676.638	107.366.638	41,57%
13	Bagi Hasil Mineral dan Batubara	333.605.000	724.185.045	390.580.045	117,08%

Sumber: BPPKAD KAb. Gresik Tahun 2021

2.1.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Daerah yang bersifat “Block Grant”. Perubahan pendapatan Dana Alokasi Umum pada Tahun 2020 sebesar Rp890.343.102.000

Tabel 2.8
Dana Alokasi Umum

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	DANA ALOKASI UMUM	982.169.880.000	890.343.102.000	-91.826.778.000	-9,35%
	Dana Alokasi Umum	982.169.880.000	890.343.102.000	-91.826.778.000	-9,35%
1	Dana Alokasi Umum.	982.169.880.000	890.343.102.000	-91.826.778.000	-9,35%

Sumber: BPPKAD KAB. Gresik Tahun 2021

2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus

Penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Untuk kriteria teknis dirumuskan oleh Kementerian Teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana-prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp283.777.120.000

Tabel 2.9
Dana Alokasi Khusus

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	DANA ALOKASI KHUSUS	358.342.452.000	283.777.120.000	-74.565.332.000	-20,81%
	Dana Alokasi Khusus Fisik	133.461.998.000	73.352.157.000	-60.109.841.000	-45,04%
1	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD	9.970.645.000	9.970.645.000	-	
2	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP	6.723.054.000	6.723.054.000	-	
4	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	7.518.299.000	7.518.299.000	-	
5	Dana alokasi khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan	22.993.600.000	22.993.600.000	-	
6	Dana alokasi khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	4.559.658.000	4.559.658.000	-	
7	Dana alokasi khusus Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana	1.438.405.000	1.438.405.000	-	
8	Dana alokasi khusus Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	3.466.462.000	3.466.462.000	-	
14	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum	4.200.472.000	2.118.226.000	-2.082.246.000	-49,57%
15	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi	477.722.000	-	-477.722.000	-100,00%
16	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan	10.767.360.000	-	-10.767.360.000	-100,00%
34	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Lingkungan Hidup	375.000.000	-	-375.000.000	-100,00%
37	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Sanitasi	2.633.667.000	-	-2.633.667.000	-100,00%
39	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Jalan	34.491.021.000	-	-34.491.021.000	-100,00%

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
40	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penurunan Stunting	1.133.563.000	1.133.563.000	-	
43	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi	5.617.781.000	-	-5.617.781.000	-100,00%
44	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan	2.500.000.000	-	-2.500.000.000	-100,00%
45	Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	349.657.000	349.657.000	-	
46	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penurunan AKI-AKB	620.280.000	620.280.000	-	
47	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	10.737.749.000	10.737.749.000	-	!
48	Dana Alokasi Khusus Penugasan Sub Bidang Pertanian	2.386.362.000	1.221.318.000	-1.165.044.000	-48,82%
49	Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kelautan Dan Perikanan	501.241.000	501.241.000	-	
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	224.880.454.000	210.424.963.000	-14.455.491.000	-6,43%
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	33.075.000.000	30.294.600.000	-2.780.400.000	-8,41%
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tunjangan Profesi Guru.	148.382.844.000	139.518.371.000	-8.864.473.000	-5,97%
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Bantuan Operasional Kesehatan	18.677.564.000	25.637.564.000	6.960.000.000	37,26%
8	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Akreditasi Puskesmas	1.230.880.000	1.230.880.000	-	

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
9	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Jaminan Persalinan	1.506.288.000	1.506.288.000	-	
10	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.235.412.000	5.798.228.000	-437.184.000	-7,01%
13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.542.689.000	2.542.689.000	-	
14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.113.200.000	2.039.500.000	-73.700.000	-3,49%
15	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Penyelenggaraan Museum	600.000.000	600.000.000	-	
17	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000	417.358.000	-	
18	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Pelayanan Kepariwisata	928.604.000	575.870.000	-352.734.000	-37,99%
19	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi	5.658.000.000	-	-5.658.000.000	-100,00%
20	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	3.249.000.000	-	-3.249.000.000	-100,00%
23	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	263.615.000	263.615.000	-	

Sumber: BPPKAD KAB. Gresik Tahun 2021

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Bagi Hasil Propinsi yang berasal dari Dana Bagi

Hasil Pajak Dari Provinsi, Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. Perkiraan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 akan menjadi Rp682.672.020.350.

Tabel 2.10
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	752.686.113.000	682.672.020.350	-70.014.092.650	-9,30%
	PENDAPATAN HIBAH	70.690.400.000	94.925.700.000	24.235.300.000	34,28%
	Pendapatan Hibah Dana BOS	70.690.400.000	94.925.700.000	24.235.300.000	34,28%
423	Pendapatan BOS SMP Negeri Satu Atap Sangkapura (UPT SMP Negeri Satu Atap)	56.000.000	115.000.000	59.000.000	105,36%
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	331.000.000.000	213.078.929.000	-117.921.071.000	-35,63%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	331.000.000.000	213.078.929.000	-117.921.071.000	-35,63%
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	100.000.000.000	56.701.000.000	-43.299.000.000	-43,30%
3	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	75.000.000.000	31.444.430.000	-43.555.570.000	-58,07%
5	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	95.000.000.000	75.151.615.000	-19.848.385.000	-20,89%
7	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.000.000.000	872.728.000	-127.272.000	-12,73%
8	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	60.000.000.000	48.909.156.000	-11.090.844.000	-18,48%
	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	335.719.913.000	357.834.778.000	22.114.865.000	6,59%
	Dana Penyesuaian	335.719.913.000	357.834.778.000	22.114.865.000	6,59%
18	Dana Desa	287.891.804.000	284.325.494.000	-3.566.310.000	-1,24%
19	Dana Insentif Daerah	47.828.109.000	73.509.284.000	25.681.175.000	53,69%
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	15.275.800.000	16.832.613.350	1.556.813.350	10,19%
	Bantuan keuangan dari provinsi	15.275.800.000	16.832.613.350	1.556.813.350	10,19%
1	Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur	15.275.800.000	16.832.613.350	1.556.813.350	10,19%

2.2 Kebijakan Perubahan Belanja

Perubahan Belanja Daerah pada Tahun 2020 dilakukan karena adanya perubahan target kegiatan, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, menambah atau mengurangi anggaran belanja program dan kegiatan, mengakomodasi program dan kegiatan prioritas yang belum dialokasikan pada APBD Tahun 2020 sekaligus dalam rangka penanganan darurat kesehatan dan pemulihan dampak sosial ekonomi. Belanja Daerah Pada Perubahan APBD 2020 Mencapai Rp3.316.580.535.002 atau turun 16,40% dari Target APBD sebesar Rp3.568.293.698.176.

2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Perubahan Kebijakan Penganggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 diarahkan untuk:

1. Penyesuaian alokasi gaji dan tunjangan penghasilan pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Penyesuaian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa agar dilaksanakan dengan padat karya.
3. Belanja Tidak Terduga diarahkan dalam rangka Upaya tracking (pelacakan), tracing (penelusuran) dan testing (pengujian) dalam mendeteksi sebaran kasus Covid-19 serta pemberian insentif kepada warga tidak mampu secara langsung terdampak akibat Pandemi Covid-19

Tabel 2.11
Belanja Tidak Langsung

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.852.743.751.606	2.144.554.402.611	291.810.651.005	15,75%
	BELANJA PEGAWAI	933.766.295.286	858.546.593.221	-75.219.702.065	-8,06%
	BELANJA HIBAH	299.561.282.000	309.995.675.000	10.434.393.000	3,48%
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	38.697.300.000	19.183.200.000	-19.514.100.000	-50,43%

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	87.347.650.000	98.971.989.000	11.624.339.000	13,31%
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	490.871.224.320	528.877.021.000	38.005.796.680	7,74%
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000	328.979.924.390	326.479.924.390	13059,20%

Sumber: BPPKAD Kab. Gresik Tahun 2021

2.2.2 Belanja Langsung

Sebagian besar Program dan kegiatan pembangunan mencapai 31,68% mengalami *refocusing* dalam rangka penanganan darurat kesehatan dan pemulihan dampak sosial ekonomi sebagaimana berikut:

Tabel 2.12
Belanja Langsung

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	
	BELANJA LANGSUNG	1.715.549.946.570	1.172.026.132.390	-543.523.814.180	-31,68%
	BELANJA PEGAWAI	71.047.721.520	64.412.693.493	-6.635.028.027	-9,34%
	BELANJA BARANG DAN JASA	964.541.338.774	792.455.232.673	-172.086.106.101	-17,84%
	BELANJA MODAL	679.960.886.276	315.158.206.224	-364.802.680.052	-53,65%

2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019. Berikut pembiayaan Daerah Tahun 2020:

Tabel 2.13
Pembiayaan Daerah

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	PEMBIAYAAN DAERAH	153.658.580.000	462.004.151.544	308.345.571.544	201%
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	153.658.580.000	462.004.151.544	308.345.571.544	201%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya(SILPA)	153.658.580.000	462.004.151.544	308.345.571.544	201%
	Pelampauan Penerimaan PAD	12.174.046.000	56.803.306.476	44.629.260.476	367%
1	Pajak Daerah	10.700.000.000	55.044.041.397	44.344.041.397	414%
2	Retribusi Daerah	-	-1.019.438.339	-1.019.438.339	
4	Lain-Lain PAD yang Sah	1.474.046.000	2.778.703.417	1.304.657.417	89%
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	12.570.000.000	14.032.526.366	1.462.526.366	12%
1	Bagi Hasil Pajak	12.570.000.000	-7.414.955.381	-19.984.955.381	-159%
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	17.470.918.227	17.470.918.227	
3	Dana Alokasi Khusus	-	3.976.563.520	3.976.563.520	
	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	36.971.315.277	36.971.315.277	
1	Pendapatan Hibah	-	12.861.770.897	12.861.770.897	
2	Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	24.109.544.380	24.109.544.380	
	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	128.914.534.000	354.176.501.425	225.261.967.425	175%
1	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	15.721.400.000	39.697.550.412	23.976.150.412	153%
2	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	14.446.000.000	10.152.526.613	-4.293.473.387	-30%
3	Belanja Barang dan Jasa	53.780.000.000	143.595.729.363	89.815.729.363	167%
4	Belanja Modal	23.450.000.000	114.409.064.608	90.959.064.608	388%
7	Belanja Hibah	14.328.134.000	19.072.874.104	4.744.740.104	33%
8	Belanja Bantuan Sosial	-	4.860.950.000	4.860.950.000	
9	Belanja Belanja Bagi Hasil	-	16.322.375.250	16.322.375.250	
10	Belanja Bantuan Keuangan	6.400.000.000	4.949.641.450	-1.450.358.550	-23%
11	Belanja Belanja Tidak Terduga	789.000.000	1.115.789.625	326.789.625	41%
	Pembiayaan Netto	-	20.502.000	20.502.000	
1	Penerimaan Pembiayaan	-	20.502.000	20.502.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	153.658.580.000	462.004.151.544	308.345.571.544	201%

No Rek	Uraian	APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETO	153.658.580.000	462.004.151.544	308.345.571.544	201%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	-	

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan dengan substansi pokok sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja Utama (Tujuan) dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
2. Penyelenggaraan urusan dan program pembangunan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang;
3. Nomenklatur Perangkat Daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Rekapitulasi Capaian Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020;

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

Persentase Capaian Kinerja

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan penilaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

3.1.1 Nilai Peduli HAM

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Apresiasi kepedulian Hak Asasi Manusia diukur atas pemenuhan beberapa kriteria meliputi :

1. Hak Atas Kesehatan
2. Hak Atas Pendidikan
3. Hak Atas Perempuan dan Anak
4. Hak Atas Kependudukan
5. Hak atas Pekerjaan
6. Hak atas Perumahan
7. Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

Berdasarkan perhitungan terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dijelaskan bahwa Nilai Peduli HAM Kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang signifikan sejak diukur pada Tahun 2015 dengan nilai 75,29 meningkat dramatis

menjadi 90 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, meskipun terdapat perubahan kriteria, Kabupaten Gresik mampu mencapai nilai 89 sedangkan pada Tahun 2018, Nilai Kabupaten Peduli Ham pada tingkat 85,02. Pada tahun 2019 Kabupaten Gresik mengalami peningkatan nilai Peduli HAM pada tingkat 88,96. Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ke-72 di tahun 2020 yang bertemakan *Recover Better – Stand Up For Human Rights*, Kabupaten Gresik masih mempertahankan Predikat Kriteria sebagai **Kabupaten dan Kota Peduli HAM** dengan nilai 86,07.

3.1.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 memasuki tahun ke 12 (dua belas) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. *Grand Design* Reformasi Birokrasi sendiri bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau

tahun berikutnya. Pada tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan mencakup: (a) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan; (b) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya; serta (c) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/ memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem *self assessment*.

Model penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang digunakan disusun atas dasar Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Komponen penilaian mandiri Indeks Reformasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Komponen *self assement* Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen	Bobot	Sub- Komponen
1	Komponen pengungkit	60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tata laksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%) b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)

No	Komponen	Bobot	Sub- Komponen
			c. Kualitas pelayanan publik (10%)
	Total	100%	

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik “*criteria referenced test*” dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini BPK atas Laporan Keuangan. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor. Sedangkan hasil penilaian secara mandiri dikategorikan ke dalam 7 (tujuh) kategori sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Kategori Nilai Hasil Assesment Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 – 100	Istimewa
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 – 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, maka dapat diketahui **Nilai Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 66,45 dengan kategori B atau dengan interpretasi baik dan perlu sedikit perbaikan. Capaian Tahun 2020 menurun 0,24 poin dibandingkan capaian Tahun 2019 sebesar 66.69 serta meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 63.30.

3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mampu menggambarkan proses perkembangan dan perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi regional merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu daerah.

PDB dan PDRB disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha yang merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas pelbagai aktivitas produksi; dan pendekatan sisi pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan nilai tambah bruto. PDB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian yaitu Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB) dimana seluruh agregat yang dinilai menggunakan harga pada tahun berjalan; dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang penilaiannya didasarkan pada harga tahun dasar tertentu. Indikator pertumbuhan ekonomi daerah umumnya berupa angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi nasional dipublikasikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap kuartal, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dipublikasi setiap 1 (satu) tahun. Sebelum pandemi, kinerja perekonomian Kabupaten Gresik menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meskipun kontribusi kategori berfluktuasi selama lima tahun terakhir, hingga tahun 2019 kontribusi per kategori lapangan usaha Kabupaten Gresik masih tetap didominasi oleh industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Gresik masih sangat bergantung dari industri pengolahan. Kendati demikian, berdasarkan publikasi BPS termutakhir, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 mencapai -59,35%.



Sumber Data: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2016 sd 2020

Berdasarkan publikasi BPS termutakhir, dapat dilihat dari tabel di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, Perekonomian Kabupaten Gresik selalu mengalami penurunan, di tahun

2019 penurunan mencapai 0,39% dan penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 mencapai -3,68%. Hal ini kemudian menjadikan nilai pertumbuhan ekonomi Sangat Rendah.

3.1.4 Laju Inflasi

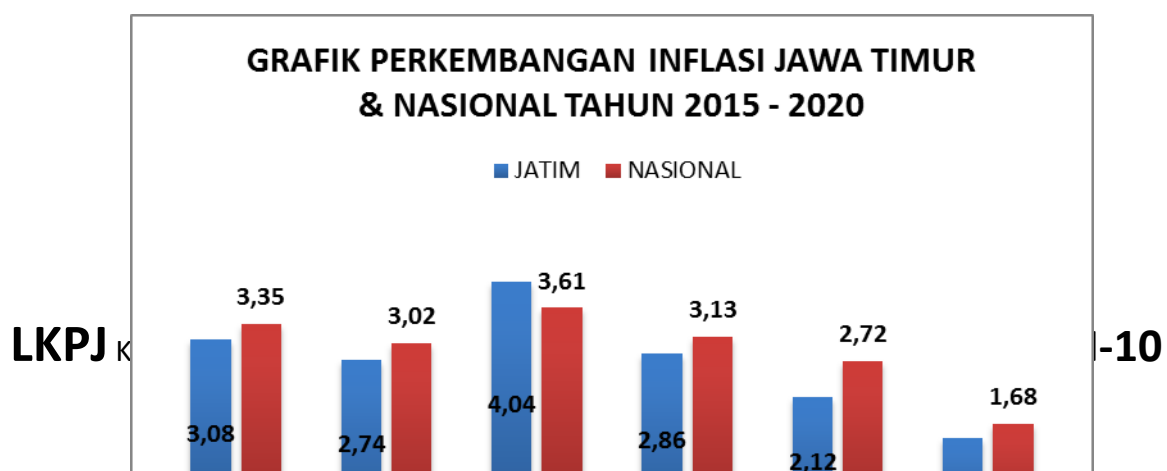
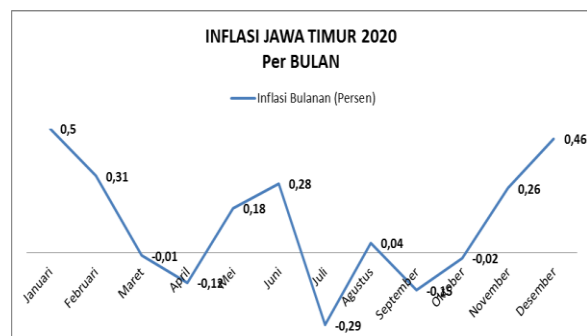
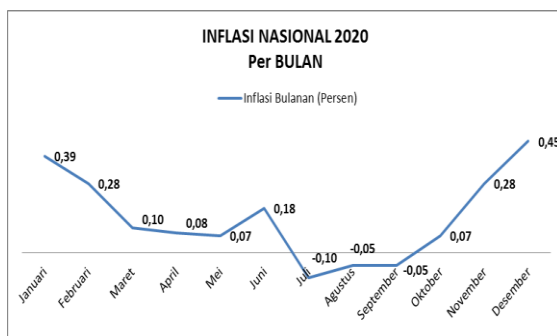
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga pada satuan tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang baik adalah inflasi yang mampu dikendalikan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Inflasi dapat meningkatkan taraf hidup pertumbuhan karena inflasi memegang peran penting dalam kenaikan harga barang dan jasa selain investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro seperti rumah tangga/masyarakat inflasi dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian anggaran pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Selain itu pada tingkat korporat, angka inflasi dapat digunakan untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- 1) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*);

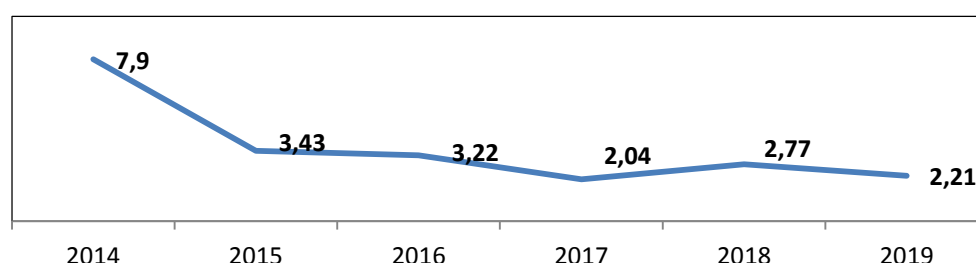
- 2) Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*);
- 3) Eskalasi nilai proyek (*project escalation*);
- 4) Penentuan target inflasi (*inflation targeting*);
- 5) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (*budget indexation*);
- 6) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi;
- 7) Sebagai proxy perubahan biaya hidup (*proxy of cost living*);
- 8) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100 dari sebelumnya yang menggunakan IHK tahun dasar 2012=100 karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Di Jawa Timur, IHK diperoleh dari 8 Kota antara lain: Surabaya, Madiun, Probolinggo, Malang, Kediri, Sumenep, Banyuwangi, dan Jember.



Gambar 3.2
Grafik Perkembangan Inflasi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 sd 2020

Inflasi 2020 menjadi inflasi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Laju inflasi Nasional tahun 2020 mencapai 1,68 atau lebih rendah dibandingkan tahu sebelumnya yang mencapai 2,72. Berbanding lurus dengan inflasi nasional, inflasi Jawa Timur juga menunjukkan penurunan dari 2,12 pada tahun 2019 turun menjadi 1,44 pada tahun 2020. Inflasi Nasional tahun 2020 banyak dipengaruhi oleh naiknya harga komoditas antara lain cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Di Jawa Timur, cabai rawit menyumbang inflasi dengan persentase sebesar 51,58%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks dalam kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang menyumbang andil terbesar terhadap inflasi nasional diantaranya bahan makanan, makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,49%, sedangkan di Jawa Timur kelompok makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi sebesar 0,35 % terhadap inflasi.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik

Gambar 3.3
Laju Inflasi Kabupaten Gresik

Sementara itu, posisi laju inflasi Kabupaten Gresik relatif terkendali

dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Laju Inflasi Kabupaten Gresik termutakhir berada pada angka 2,21 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 2.77.

3.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan kriteria kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH didapatkan dari penjumlahan indikator Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara dengan bobot (30%) dan Indeks Tutupan Lahan (40%) dengan masing-masing parameter dan perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Sungai

Indeks Kualitas Air Sungai didapatkan berdasarkan perhitungan Indeks Pencemaran Air sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 20113 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan paling sedikit 4 kali dalam setahun pada 3 lokasi dengan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Coliform.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara didapatkan dari perhitungan Indeks Pencemaran Udara melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang mewakili dampak pencemaran udara dari kawasan transportasi, perumahan, perkantoran dan industri dengan periode pengukuran maksimal 2 kali per tahun. Paramater yang diukur adalah SO₂ dan NO₂ dengan metode *passive sampler*.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung dari pertimbangan aspek konservasi dan rehabilitasi berdasarkan tutupan lahan serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator yang digunakan adalah

- a. Luas tutupan hutan (*forest cover index*) dan perubahan tutupan lahan (*forest performance index*);
- b. Kondisi tutupan tanah (*soil condition index*), indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan limpasan air;
- c. Konservasi sempadan sungai/danau/pantai (*water health index*), kondisi tutupan lahan di area sekitar ekosistem riparian;
- d. Kondisi habitat (*land habitat index*), yang terdiri dari fragmentasi tutupan lahan dan fragmentasi hutan di kawasan hutan (*protected area*).

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan didapatkan dari data tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi Citra Landsat liputan tahun sebelumnya dibandingkan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten.

Berdasarkan perhitungan terhadap ketiga indikator tersebut, IKLH Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2018 yaitu 64,62 menjadi 73,99 di tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai Indeks Kualitas Udara meningkat menjadi 87,03, sedangkan Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 63,33 dan 72,85. Sehingga didapatkan nilai IKLH di tahun 2020 adalah sebesar 74,25. Perbandingan capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2020

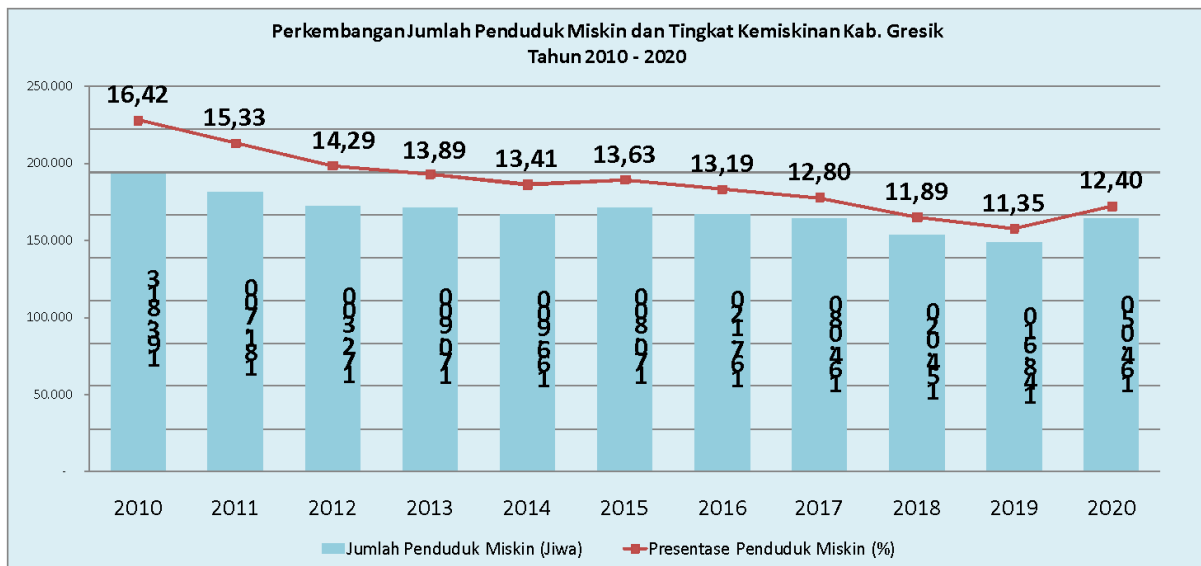
Tahun	IKA	IKU	ITL	IKLH
2018	60,91	57,35	72,85	64,62
2019	63,33	86,16	72,85	73,99
2020	63,33	87,03	72,85	74,25

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2019 -2021

3.1.6 Tingkat Kemiskinan

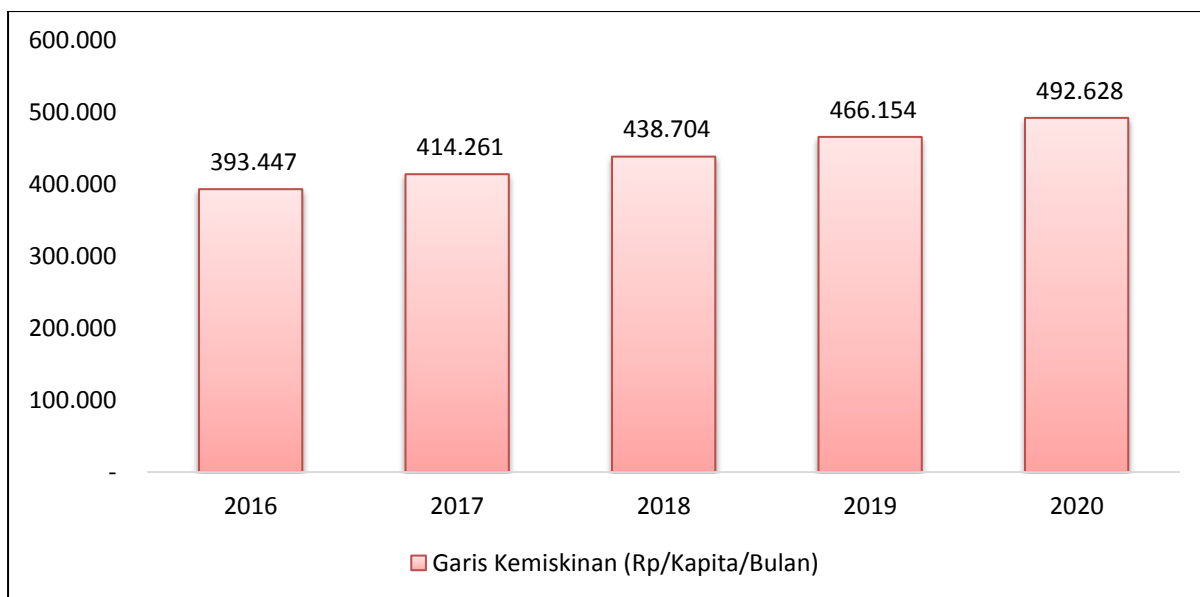
Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro sedangkan sebaran penduduk miskin secara *by name by addres* merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengentasan kemiskinan Kabupaten Gresik yang terus mengalami peningkatan namun cenderung melambat. Kondisi **tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik** pada Tahun 2020 mencapai 12,40% atau mengalami peningkatan 1,05% dibandingkan Tahun 2019 sebesar 11,35%. Peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh berbagai faktor penting seperti resesif ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pandemi ini juga meningkatkan laju inflasi yang menyebabkan harga barang atau jasa meningkat, serta faktor lain seperti dinamika pertumbuhan penduduk menyebabkan garis kemiskinan (taraf hidup pengeluaran seorang individu atau rumah tangga) meningkat lebih tinggi dibandingkan akselerasi peningkatan kesejahteraan.

Selama periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 4,02 persen, yaitu dari 16,42 persen pada tahun 2010 menjadi 12,40 persen pada Tahun 2020. Penurunan tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 193.813 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 164.050 jiwa pada Tahun 2019. Gambaran Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat kemiskinan Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kab. Gresik Tahun 2010-2020

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2020 sebesar 492.628 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 466.154 Rupiah/Kapita/Bulan.



Gambar 3.5
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kab. Gresik Tahun 2016 - 2020

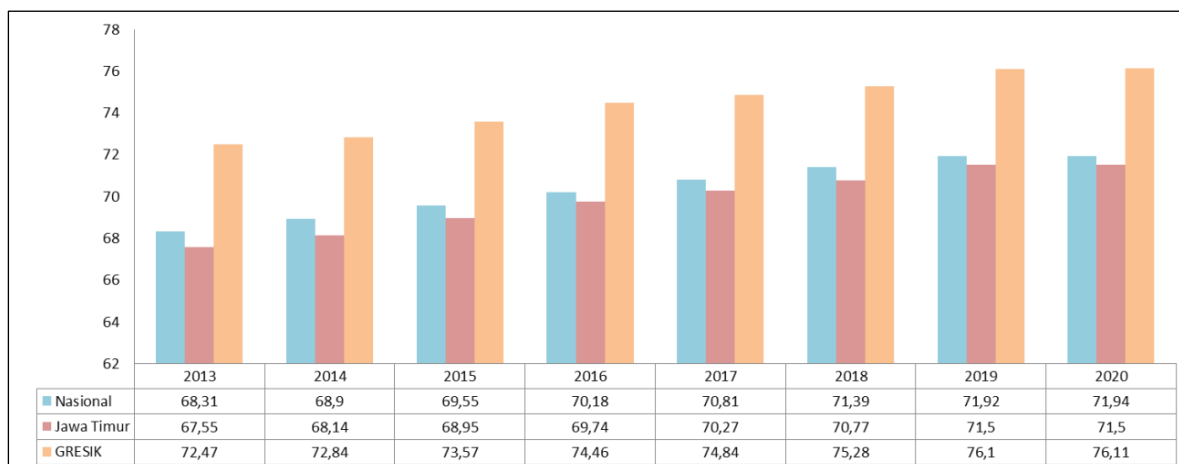
Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibandingkan dengan Tahun 2019. Dari yang sebelumnya pada Tahun 2019 sebesar 2,21 menjadi 2,51 pada Tahun 2020. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar 0,19 dari yang semula pada Tahun 2019 sebesar 0,61 menjadi 0,80 di Tahun 2020.

3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data strategis yang menjadi salah satu ukuran kinerja Pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang dibentuk oleh 3 dimensi kebutuhan dasar manusia yang antara lain Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Meski hanya 3 dimensi dari pembangunan manusia namun IPM dapat menjelaskan bagaimana manusia khususnya penduduk kabupaten gresik dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pada 15 Desember 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Kabupaten Gresik di tahun 2020 mencapai 76,11 poin, 4,4 poin diatas

Provinsi Jawa Timur (71,71 poin) dan 4,17 poin di atas Nasional (71,94 poin). IPM Kabupaten Gresik secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2019 sebesar 76,10 maupun capaian pada tahun 2018 sebesar 75,28.



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Gambar 3.6

IPM Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik 2012 – 2020

3.1.8 Indeks Pembangunan Gender

Rumusan Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan kualitas pembangunan laki-laki pada suatu wilayah. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM.

Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan

pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Di Kabupaten Gresik, ketimpangan gender telah diatasi secara optimal dan bertahap pada seluruh aspek kehidupan terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pengukuran IPG Kabupaten Gresik mencapai 90,05 mengalami peningkatan secara konsisten dibandingkan tahun 2018 dengan capaian 89,72 maupun tahun 2017 dengan capaian 89,57. Akan tetapi capaian IPG Kabupaten Gresik masih dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar 90,77 dan Nasional sebesar 91,07.

3.2 Capaian Indikator Sasaran RPJMD

3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan melalui 11 program terdiri 510 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp196.822.278.266 yang terealisasi sebesar Rp185.372.251.692 atau 94,18% tidak terserap sebesar Rp 11.450.026.574 disebabkan efisiensi dan tidak dilaksanakan sebesar Rp4.260.289.680. Capaian indikator kinerja urusan pendidikan pada tahun 2020 dengan sasaran **“Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	APM SD dan Sederajat	94,58%	95,04%	99,15%	96,67%	97,49%	ST
2	APM SMP sederajat;	66,94%	86,99%	87,10%	74,77%	85,72%	T
3	Angka Rata rata lama sekolah (Tahun)	8,96	9,5	9,6	9,47	98,64%	ST

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun

2020 mencapai 96,67%, naik dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 95,04%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 122.557 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 118.470 siswa.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2020 mencapai 74,77% atau naik dibandingkan tahun 2019 mencapai 72,10%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.244 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 45.045 siswa.

Angka Rata rata lama sekolah Pada Tahun 2020 realisasi mencapai 9,47 tahun diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.551.430 siswa dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 902.543 Siswa. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 9,47 tahun meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 9,29 tahun.

2) Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan RSUD Ibnu sina melalui 29 Program dan 134 Kegiatan. Alokasi Anggaran Rp 376.786.341.744 dengan realisasi sebesar Rp337.336.500.844 atau 89,53% dengan rincian:

- 1) Dinas Kesehatan melalui 23 program terdiri 120 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 208.476.728.300 realisasi sebesar Rp163.132.842.105 atau 78,25%, tidak terserap sebesar Rp45.343.886.195 disebabkan efisiensi Rp 24.663.779.357 dan sisa lelang Rp 2.317.446.776 dan Tidak dilaksanakan sebesar Rp18.362.660.060.
- 2) RSUD Ibnu Sina melalui 2 Program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp168.309.613.444 realisasi sebesar Rp174.203.658.738 atau 103,502%.

Capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2020 dengan

sasaran “**Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan**”

Sebagaimana berikut:

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,46	72,61	72,8	72,66	99,81%	ST

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator penting yang menentukan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsepsi Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat (BPS). Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik pada Tahun 2018-2020 selalu menunjukkan peningkatan yaitu dari 72,46 menjadi 72,61 dan akhirnya ditahun 2020 mencapai 72,66. Hal ini menunjukkan pada tahun 2020, rata-rata umur penduduk lebih panjang 0,05 tahun dibanding Angka Harapan Hidup tahun 2019. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Perangkat Daerah terkait dengan progam kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, dan progam pencegahan dan pengendalian penyakit.

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang melalui 16 program yang terdiri 74 kegiatan dengan alokasi dana Tahun 2020 sebesar Rp235.484.264.817 dengan realisasi sebesar Rp.231.936.978.270 atau 98%, tidak terserap sebesar Rp.3.547.286.546,38 disebabkan efisiensi Rp.1.346.695.099, sisa lelang Rp.2.047.020.547, dan tidak dilaksanakan sebesar Rp.150.000.000,00.

Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 dengan sasaran “**Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang**” dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	73.62%	72.41%	86.11%	73.81%	83%	T
2	Persentase Akses Air Bersih/Minum	61.57%	58.36%	100 %	66.27%	66.27%	S
3	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	93%	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2020

Kemantapan jalan menjadi sangat penting sebab jalan merupakan infrastruktur primer untuk mendukung perekonomian dan juga mobilitas masyarakat, **Capaian Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan** di Kabupaten Gresik diperoleh dari perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi mantap dengan total panjang jalan Kabupaten. Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 72,41 %.

Capaian Indikator Persentase Akses Air Bersih/Minum diperoleh dari perbandingan jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih dengan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik, dapat dijelaskan bahwa dari total 322.390.25 Rumah Tangga di Kabupaten Gresik, tercatat jumlah rumah tangga pengguna air bersih Non PDAM sebanyak 143.766 RT atau 66.27% dari target 100% di tahun 2020 dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 58,36 % dan dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat tahun 2020 yaitu 100% air bersih.

Kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sejauh mana aturan pola pemanfaatan ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah, **Capaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW** di Kabupaten Gresik diperoleh dari perbandingan jumlah izin pemanfaatan

ruang yang sudah dikeluarkan dengan jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Dari total 272 pengajuan ijin pemanfaatan ruang di tahun 2020, terdapat 267 ijin yang dikeluarkan dengan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 100 %. Kendala yang terjadi adalah sumber air terbatas sehingga tindak lanjut selanjutnya akan dilakukan penyelidikan sumber air dengan menggunakan geolistrik.

4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui 8 program yang terdiri 40 kegiatan dengan alokasi dana Tahun 2020 sebesar Rp.22.080.924.161, realisasi sebesar Rp.19.010.530.626 atau 93%, tidak terserap sebesar Rp.3.070.393.535 disebabkan efisiensi Rp.323.933.469, sisa lelang Rp1.508.038.166 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp.1.238.421.900.

Capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2020 dengan sasaran **“Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018 s/d 2020

Tahun 2018 s/d 2020							
No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	88,6 ha (62,42 ha) dari 181,92 ha	102,79 ha (14,19 ha) dari 181,92 ha	41% (40 ha) dari 181,92 ha	73,19 Ha untuk penanganan kawasan kumuh diluar perkotaan dan 20,13 Ha untuk Pencegahan Kumuh Perkotaan	100 %	ST

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
2	Persentase Rumah Layak Huni	89.34%	90,55%	86.08%	86.40%	99.97 %	ST

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2020

Capaian Indikator Penurunan Luas Kawasan Kumuh diperoleh dari perbandingan antara luasan kawasan kumuh yang ditangani dengan jumlah luasan Kawasan kumuh Kabupaten Gresik, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 telah tertangani 102,79 ha pada kawasan perkotaan. Untuk kawasan diluar perkotaan sampai tahun 2019 telah tertangani 73,19 ha dengan pelaporan pada tahun 2020. Selama tahun 2016-2020 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara akumulatif mencapai 181,92 Ha atau 100%, sehingga pada tahun 2020 kegiatan penanganan kumuh bersifat pencegahan seluas 20,13 Ha yang tersebar di wilayah perkotaan.

Capaian Indikator Persentase Rumah Layak Huni diperoleh dari perbandingan total jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah di Kabupaten Gresik. Dari Total jumlah rumah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebanyak 314.118 unit terdapat 271.405 unit yang layak huni atau 86.40%.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melalui 8 program yang terdiri 27 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 15.712.132.911 realisasi sebesar Rp14.392.593.716 atau 91,60%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp1.319.539.195 dikarenakan efisiensi dengan rincian:

- Dinas satuan polisi pamong praja melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.848.862.337 realisasi sebesar Rp10.884.979.783 atau 91,86%, tidak terserap sebesar Rp963.882.554 disebabkan efisiensi.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.863.270.574

realisasi sebesar Rp3.507.613.933 atau 90,79%, tidak terserap sebesar Rp 355.656.641 disebabkan efisiensi.

Capaian indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 dengan sasaran **”Menciptakan kententraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”** dilaksanakan oleh Satpol PP sedangkan dalam hal penanggulangan bencana melalui sasaran **“Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran”** dilaksanakan oleh BPBD Sebagaimana berikut:

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Presentase Penurunan Angka Kriminalitas	49% (354 Pelanggaran)	17% (295 Pelanggaran)	10-20%	20% (300 Pelanggaran)	100%	ST
2	Persentase Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2020

Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 20% dengan jumlah pelanggaran 300 kasus menurun dibandingkan Tahun 2019 sebanyak 375 Kasus. Penurunan angka kriminalitas merupakan upaya kolaboratif yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Kepolisian Gresik serta berbagai pihak pemangku kepentingan.

Persentase penanganan bencana oleh BPBD dihitung berdasarkan jumlah kejadian bencana dan jumlah bencana yang berhasil ditangani. Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang. Kejadian bencana pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 255 kejadian bencana meliputi banjir, angin

kencang, kebakaran, dan pohon tumbang.

6) Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 11 program yang terdiri dari 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.357.409.671 dan realisasi sebesar Rp3.221.516.094 atau 95,95%. Sedangkan dana yang tidak terserap yakni sebesar Rp135.893.577, hal ini disebabkan oleh efisiensi dan refocussing anggaran di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Capaian indikator kinerja urusan sosial pada tahun 2020 dengan sasaran **“Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2018 s/d 2020

Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2018 s/d 2020							
No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Persentase penanganan terhadap jumlah laju , eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	6,22%	7,14%	5,1-5,6%	6,98%	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2020

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 6,98% diperoleh dari Jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas sebanyak 9.437 orang dibandingkan dengan jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang. Penanganan PMKS pada tahun 2020 menurun dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 7,41% melalui penanganan PMKS sebanyak 10.018 orang dari total keseluruhan PMKS dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.177 orang.

3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 7 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.031.757.000 realisasi sebesar Rp.1.998.290.987 atau 98.35% tidak terserap sebesar Rp. 33.466.013 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2020 dengan sasaran **“Menurunnya tingkat pengangguran”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,82	5,54%	5.05-4.75%	8,21%	37,46%	SR

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2020

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8,21% dengan jumlah penganggur sebanyak 46.304 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 617.699 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 naik 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,54%. Kenaikan ini disebabkan karena banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 dan jumlah penempatan yang sedikit.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 2 program terdiri 10 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp477.760.116 realisasi sebesar Rp324.834.144 atau 67.99%, tidak terserap sebesar Rp152.925.972 disebabkan efisiensi dan adanya pandemic Covid 19. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada

tahun 2020 dengan sasaran **"Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak Anak"** Sebagaimana berikut :

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisas i	Capaia n (%)	Nilai
				2020			
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%	ST
2	Nilai Kabupaten Layak Anak	754,2	828	850-925	828	97,41%	ST

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2020

Penyelesaian **penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak** selama tahun 2020 terdapat 124 aduan dengan 100% tertangani. Aduan terhadap P2TP2A mengalami penurunan sebanyak 11 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 135 kasus. Sedangkan **Nilai Kabupaten Layak Anak** mencapai 828 dan mendapatkan Peringkat Kabupaten Layak Anak pada Kategori Madya.

3) Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 1 program yang terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp145.025.875,00 realisasi sebesar Rp144.701.600,00 atau 99.77%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp324.275,00 dikarenakan efisiensi sebesar Rp324.275,00.

Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2020 dengan sasaran **"Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian"** sebagaimana berikut:

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	180,41 kg/kpt/thn	187,55 kg/kpt/thn	194 kg/kpt/thn	180,10 kg/kpt/thn	92,84%	ST

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 180,10 kg/kpt/thn atau sebesar 92,84% dengan nilai ST (Sangat Tinggi). Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 187,55kg/kpt/tahun. Ketersediaan pangan utama ini mencapai 383.744 Ton mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 388.568,18 Ton sebabkan karena penurunan produktivitas tanaman padi yg disebabkan oleh semakin tinggi nya serangan hama tikus di Kabupaten Gresik.

4) Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanahan dilaksanakan oleh dinas pertanahan melalui 5 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 17.951.534.139 realisasi sebesar Rp5.385.758.885 atau 30%, tidak terserap sebesar Rp12.565.775.254 disebabkan 1.026.486.704 efisiensi dan Rp11.539.288.550 tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pengadaan tanah terhambat di Embung Sukodono dengan progres 15% disebabkan banyak berkas yang terkendala karena pemilik berada di Malaysia serta Peta Bidang banyak mengalami perubahan sehingga baru terbit pada awal November.

5) Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 10 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 20.129.962.425,00 realisasi sebesar Rp 19.520.973.227,00 atau 96,97% dan tidak terserap sebesar Rp 608.989.198,00 disebabkan efisiensi Rp409.215.987,00 dan sisa lelang sebesar Rp199.773.691,00. Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup pada tahun 2020

dengan sasaran “**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan**” sebagaimana berikut:

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Indeks Kualitas Air Sungai	60,90	63,33	64.3-68	63,33	98,49%	ST
2	Indeks Kualitas Udara	57,35	86,16	87,5-90	87,03	99,46%	ST
3	Indeks Tutupan Lahan	9,75	9,75	9,75	9,75	100,00%	ST

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021

Indeks Kualitas Air Sungai dihitung berdasarkan Indeks Pencemaran Air melalui pengukuran parameter TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform. Pada tahun 2020, dilakukan pengukuran pada enam lokasi sampling, 4 diantaranya termasuk dalam kategori baik atau memenuhi baku mutu kualitas air Kelas I, dan 2 lainnya termasuk kategori tercemar ringan. Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebesar 63,33 atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indeks Kualitas Udara dihitung melalui pengukuran udara ambien pada parameter pencemar SO₂ dan NO₂ pada kawasan transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran. Berdasarkan pengukuran tersebut didapatkan hasil bahwa konsentrasi pencemar SO₂ dan NO₂ mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 mencapai 87,03 atau meningkat sebesar 0,87% dibandingkan dengan tahun 2019.

Indeks Tutupan Lahan merupakan persentase perbandingan luas tutupan hutan yang terdiri dari kawasan lindung dan hutan lainnya yaitu 116,15 KM² dibandingkan luas wilayah administrasi Kabupaten Gresik yaitu 1.191,25 KM², sehingga didapatkan nilai Indeks Tutupan Lahan sebesar 9,75%. Indeks Tutupan Lahan tidak mengalami perubahan tiap tahunnya karena hanya didasarkan pada tutupan lahan pada kawasan lindung.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 8 program yang terdiri dari 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 5.719.943.700,00. Dari target anggaran tahun 2020 yang disepakati, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 5.155.525.666,00 atau 90.13%, sedangkan sisa 9.87% sebesar Rp 564.418.034,00 yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran sebesar Rp 448.495.014,00 dan sisa lelang sebesar Rp 115.923.020,00.

Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2020 dengan sasaran “**Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik**” dapat dilihat dari nilai survey kepuasan masyarakat unit A, sebagaimana berikut :

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Unit A	79,50	80,79	85,00	82,40	96,94	ST

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai realisasi survey kepuasan masyarakat unit kerja kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2020 mencapai 82,40 meningkat 1,61 dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 80,75. Nilai realisasi survey kepuasan masyarakat unit kerja kependudukan dan catatan sipil mendapatkan interpretasi baik dan selalu meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melalui 7 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.986.459.280 realisasi sebesar Rp4.255.317.755 atau 85.34%, tidak terserap sebesar

Rp78.870.844 dikarenakan efisiensi, sisa lelang sebesar Rp 751,945 , dan karena tidak dilaksanakan sebesar Rp 651,518,736. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2019 dengan sasaran **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Indeks Desa Membangun	0,635	0.7072	0,7	0.7325	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi Desa. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan perhitungan terhadap faktor komposit, **Indeks Desa Membangun** Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 0,7325 meningkat 0,0532 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,7022 Rerata IDM Kabupaten Gresik mendapat klasifikasi Desa Maju (>0,707 dan < 0,815). Dari 360 desa di Kabupaten Gresik, terdapat 47 desa mandiri, 152 desa maju, dan 131 desa berkembang. Dalam skala nasional, dari 69938 desa yang termasuk kedalam klasifikasi desa maju hanya sebesar 17,02%. Prosentase paling besar masuk kedalam klasifikasi desa berkembang sebesar 57,01 %. Sedangkan untuk klasifikasi desa sangat tertinggal, tertinggal, dan mandiri berturut turut 3,52 %,19,96%, dan 2,4 %.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui 7 program yang terdiri dari 33 kegiatan dengan Alokasi dana sebesar Rp11.485.012.571 dan realisasi sebesar Rp9.539.135.224 atau 83,06%. Sedangkan yang tidak terserap yakni sebesar Rp1.945.877.347 disebabkan karena Sisa lelang sebesar Rp158.798.090, Efisiensi sebesar Rp153.430.113 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp1.633.649.144.

Capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2020 dengan sasaran **"Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana"** dan **"Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
					2020		
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	1,7%	1,4%	0,6-1,4%	1,07%	100%	ST
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,35	65,33	63.50-64.00	69.43	108%	ST

Sumber Data: (Sumber data: Tabel Dinamis BPS.go.id
<https://www.bps.go.id/site/resultTab>, data Tahun 2019, publikasi 2020)

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020 mencapai 1,07% mengalami penurunan 0,33% dari tahun 2019 sebesar 1,4%. Jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 1.298.394 Jiwa mengalami penerunan sejumlah 210 jiwa dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 1.298.184 jiwa. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Gresik Tahun 2020 mencapai 69.43 meningkat dari tahun 2019 sebesar 65,33. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender ini didukung dengan keterwakilan perempuan dalam

Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah yang mencapai 36,35% dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan mencapai 87,90%.

9) Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 9 program yang terdiri dari 41 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.394.594.025,00 realisasi sebesar Rp11.229.937.966,00 atau 99%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp164.656.059,00 dikarenakan lelang sebesar Rp52.637.566,00 dan efisiensi sebesar Rp112.018.494,00.

Capaian indikator kinerja urusan perhubungan pada tahun 2020 dengan sasaran **"Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	0,13%	0,12%	0,11%	0,11%	100,00%	ST

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Angka Kecelakaan Angkutan Umum di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 0,11% mengalami penurunan 0,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah kecelakaan umum yang terjadi pada Tahun 2020 sebanyak 28 kecelakaan Angkutan Umum dari Total 25.621 Kendaraan Wajib Uji.

10) Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 4 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.157.978.850 dan realisasi sebesar Rp 4.150.459.134 atau 99,81%, tidak terserap 0,16% atau sebesar Rp7.519.716,00 disebabkan oleh efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2020 dengan sasaran

”Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi” Sebagaimana berikut:

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Indeks e- Government	2,68 (Mandiri) 2,56 (Ketetapan Menpan)	3,15 (Mandiri) 3,14 (Ketetapan Menpan))	3.00- 3.10	3,18	>100%	ST

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021

Indeks e-Government Kabupaten Gresik mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2019, Indeks e-Government Kabupaten Gresik dengan penilaian secara mandiri memperoleh nilai sebesar 3,15, naik 0,47 atau 17,5% dari Tahun 2018 sebesar 2,68. Sedangkan untuk Tahun 2020, kenaikan Indeks e-Government mencapai 3,18 mengalami peningkatan 0,03 atau 0,95%.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 5 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.361.072.434,00 realisasi sebesar Rp3.117.421.181,00 atau 92,75%, tidak terserap sebesar Rp 243.651.253,00 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2020 dengan sasaran **” Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.20
Capaian Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,14% (230 Usaha Mikro)	0,15% (250 Usaha Mikro)	0,16% (270 Usaha Mikro)	0,17% (284 Usaha Mikro)	>100%	ST
2	Pertumbuhan Koperasi Sehat	9,37% (350 Koperasi Sehat)	8,82% (415 Koperasi Sehat)	8,55% (330 Koperasi Sehat)	12,18% (470 Koperasi Sehat)	>100	ST

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pertumbuhan Usaha Mikro pada tahun 2020 mencapai 0.17% mencapai 284 usaha mikro dibandingkan tahun 2019 sebanyak 250 usaha. Sedangkan **pertumbuhan koperasi sehat** di Kabupaten Gresik mencapai 12,18% dengan pertumbuhan Koperasi Sehat sebanyak 470 pada Tahun 2020 dibandingkan dengan 415 Koperasi Sehat pada Tahun 2019 dari total 1.395 koperasi secara keseluruhan.

12) Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui 8 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.353.657.103 realisasi sebesar Rp4.015.858.523 atau 92,24%, tidak terserap sebesar Rp337.798.580 disebabkan efisiensi sebesar Rp213.466.780, sisa lelang sebesar Rp74.331.800 dan kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp50.000.000. Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2020 dengan sasaran **"Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah"** sebagaimana berikut:

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Urusan Penanaman Modal
Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2019			
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	48.34 T	52,93T	82,29% (43.45T)	67,21	>100%	ST

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara signifikan pada Tahun 2020 dengan total investasi akumulatif mencapai 67,21 T yang terdiri dari 12.385.034,6 juta rupiah) Penanaman Modal Dalam Negeri dan 127.284,80 (US\$ ribu) berasal dari Penanaman Modal Asing. Secara tahunan investais Kabupaten Gresik mencapai 14,28 Triliun. Rincian realisasi investasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 3.22
Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Persetujuan PMDN	Juta Rupiah	671.413,6	3.982.980,6	4.449.254,7	3.452.308,2	3.199.731,0	12.385.034,6
2	Realisasi Persetujuan PMA	US\$ Ribu	152.925,4	348.001,0	436.663,1	165.375,8	98.364,90	127.284,80

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2020

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga melalui 6 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 5.525.449.556,00 realisasi sebesar Rp 5.037.090.370,00 atau 91.16%, tidak terserap sebesar Rp 488.359.186,00 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olah raga pada tahun 2020 dengan sasaran **"Menggugah kreativitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan"** sebagaimana berikut:

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	94,79%	96,37%	98%	33.3%	34%	SR

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2020

Selama tahun 2017, jumlah Pemuda yang dibina mencapai 1.356 orang dengan jumlah Pemuda Pelopor dan berprestasi mencapai 644 atau 47% dengan rincian 567 berprestasi dalam bidang olahraga dan 77 Paskibra. Pada Tahun 2018 pembinaan pemuda pelopor dan berprestasi meningkat secara signifikan mencapai 94,79% dengan rincian 459 di bidang olahraga dan 87 di bidang kepemudaan dibanding jumlah pemuda yang dibina sebanyak 576 orang. Pada Tahun 2019 pembinaan pemuda pelopor dan berprestasi meningkat secara signifikan mencapai 96,37% diperoleh dari jumlah Pemuda Pelopor/Berprestasi 1.407 dibandingkan dengan Jumlah total Pemuda yang dibina 1.460. Dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang melanda hampir disemua negara termasuk Indonesia, maka pembinaan pemuda pelopor tahun 2020 menurun sangat drastis yakni hanya sebesar 33,33% yang diperoleh dari jumlah Pemuda Pelopor/Berprestasi 6 dibandingkan dengan Jumlah total Pemuda yang dibina 18.

14) Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp762.171.700 realisasi sebesar 100%. Capaian indikator kinerja urusan statistik pada tahun 2020 dengan sasaran **“Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi”** terintegrasi dengan indikator Indeks *e-Government* pada urusan Komunikasi dan Informatika.

15) Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika melalui 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp66.766.259 realisasi sebesar 100%. Capaian indikator kinerja urusan persandian pada tahun 2020 dengan sasaran **“Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi”** terintegrasi dengan indikator Indeks *e-Government* pada urusan Komunikasi dan Informatika.

16) Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan melalui 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.417.993.950 realisasi sebesar Rp 1.346.952.484 atau 94,9%, tidak terserap sebesar Rp 71.041.466 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan kebudayaan pada tahun 2020 dengan sasaran **“Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.24
Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	ST

Sumber Data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pada tahun 2020 telah terdaftar sebanyak 35 cagar budaya di Kabupaten Gresik. Seluruh 35 cagar budaya tersebut telah dilestarikan dengan baik. Pelestarian cagar budaya ini meningkat dibandingkan tahun 2019 dari 24 cagar budaya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, seluruhnya dilestarikan dengan baik. Selain itu sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan dua kegiatan pelestarian adat budaya daerah nilai tradisi.

17) Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 4 program yang terdiri dari 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.796.696.535,00. Dari target anggaran tahun 2020, anggaran yang mampu terealisasi sebesar Rp3.609.491.722,00 atau 95,07%, sedangkan sisa 4,93% sebesar Rp 187.204.813,00 yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran sebesar Rp 104.457.950,00 dan sisa lelang sebesar Rp 82.746.863,00.

Pengukuran kinerja pada urusan perpustakaan terintegrasi dengan sasaran pada urusan kependudukan dan catatan sipil pada Tahun 2020 dengan sasaran **"Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik"**. Berikut merupakan capaian sasaran urusan perpustakaan yang dapat dilihat melalui indikator sasaran nilai survey kepuasan masyarakat :

Tabel 3.25
Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	91,46	97,96	86-90	98,00	>100	ST

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai realisasi survey kepuasan masyarakat pada urusan perpustakaan terus menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Pada peralihan tahun 2018 ke 2019, nilai survey kepuasan masyarakat mengalami kenaikan nilai hingga 7% dan kembali naik sebesar 0,04% pada tahun 2020 dengan nilai 98,00. Meskipun tidak sebesar kenaikan yang terjadi antara tahun 2018-2019, kenaikan nilai survey kepuasan masyarakat setiap tahunnya mengindikasikan adanya perbaikan kualitas pelayanan terhadap urusan perpustakaan. Hal ini membuat penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat skala 100 untuk nilai kepuasan masyarakat pada mutu pelayanan urusan perpustakaan mendapat interpretasi Sangat Baik.

18) Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Dilaksanakan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 1 program yang terdiri dari 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp287.089.200,00. Dari target anggaran tahun 2020, anggaran yang dapat terealisasi sebesar Rp285.996.000,00 atau 0,99%%, sedangkan sisa 0,01% sebesar Rp 1.093.200,00 yang tidak terserap merupakan efisiensi anggaran sebesar Rp104.457.950,00. Pengukuran kinerja pada urusan kearsipan terintegrasi pada urusan kependudukan dan catatan sipil pada Tahun 2020 terintegrasi dengan sasaran **“Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik”**, dengan capaian sasaran urusan kearsipan sebagaimana berikut :

Tabel 3.26
Capaian Sasaran Urusan Kearsipan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pembinaan Kearsipan	70,74	75,02	86-90	75,02	<100	ST

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai survey kepuasan masyarakat urusan kearsipan mengalami kenaikan nilai hingga 6% pada peralihan tahun 2018-2019. Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat tahun 2020 relatif sama dengan tahun sebelumnya yang berada pada nilai 75,02.

3.2.3 Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas perikanan melalui 8 program terdiri 47 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.3.289.090.328 realisasi sebesar Rp.2.804.954.264 atau 85,28 %, tidak terserap sebesar Rp.484.136.064 disebabkan efisiensi sebesar Rp.114.167.369, sisa lelang sebesar Rp.32.858.695 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp.337.110.000. Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2020 dengan sasaran **“Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.27
Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
				2020			
1	Nilai Tukar Nelayan	126,9	125,84	112,5	95,28	84,69%	T

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Rata rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik mengikuti NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2020, NTN mengalami penurunan sebesar 30,12% dibanding tahun 2019 yaitu dari 125,84 menjadi 95,28. Penurunan tersebut menggambarkan bahwa penurunan rata-rata indeks harga yang diterima oleh nelayan lebih kecil dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan.

2) Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan melalui 7 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.922.735.519 realisasi sebesar Rp4.551.454.635 atau 92,46%, tidak terserap sebesar 371.280.884 disebabkan efisiensi sebesar Rp38.715.884 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp332.565.000. Capaian indikator kinerja urusan pariwisata pada tahun 2020 dengan sasaran **“Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif”** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.28
Capaian Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2016 s/d 2019

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	12,93%	29,39%	7-8%	21,71%	>100	ST

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pada Tahun 2020, Kunjungan Wisatawan sebanyak 2.103.355 orang yang terdiri dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 4.360 orang dan wisatawan lokal 2.098.995 orang. Pertumbuhan kunjungan wisata pada Tahun 2020 mencapai 21,71% dibandingkan

kunjungan wisata pada Tahun Dasar sebanyak 1.723.768 orang.

Jika dibandingkan dengan tahun dasar /tahun 2016 memang terdapat peningkatan sebanyak 21,71% namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 29,39% peningkatan lebih kecil. Hal ini disebabkan karena terjadinya wabah COVID-19. Hal ini terlihat dari data kunjungan wisatawan dimana pada bulan april terjadi penurunan jumlah wisatawan secara besar-besaran. Selain itu selama terjadinya pandemi COVID-19 banyak ODTW tutup.

3) Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 15 program yang terdiri 44 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.622.421.943,00 realisasi sebesar Rp8.514.001.523,00 atau 99%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp108.420.420,00 dikarenakan lelang sebesar Rp43.238.720,00 dan efisiensi sebesar Rp65.181.700,00.

Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2020 dengan sasaran **“Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian”** sebagaimana berikut:

Tabel 3.29
Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Nilai Tukar Petani	106,62	108,53	109,42	108,53	99,19%	ST

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. Berdasarkan pada tabel di atas, seluruh Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Gresik memiliki nilai NTP > 100, berarti petani mengalami surplus, dimana artinya pendapatan petani naik lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya sehingga tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 memiliki target sebesar 109,42 dan realisasi sebesar 108,53. Sehingga capaian nilai tukar petani pada tahun 2020 mencapai 99,19% dengan nilai Sangat Tinggi (ST). Realisasi nilai tukar petani di Kabupaten Gresik tahun 2020 mencapai 108,53 dimana memiliki nilai yang sama dengan nilai tukar petani tahun 2019, sedangkan dibandingkan nilai tukar petani tahun 2018 mengalami peningkatan dari 106,62 yaitu sebesar 1,91.

4) Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan melalui 4 program dan 9 kegiatan. Untuk mendukung jalannya program tersebut diberikan alokasi dana sebesar Rp1.123.684.950 dengan realisasi Rp1.108.266.893 atau 98,63%. Dana yang tidak terserap sebesar Rp15.418.057 dikarenakan efisiensi akibat dampak pandemi Covid-19.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menjawab capaian indikator kinerja tahun 2020 dalam hal perdagangan dengan sasaran **“Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan”** seperti pada Tabel berikut.

Tabel 3.30
Capaian Sasaran Urusan Perdagangan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Pertumbuh an Nilai Ekspor Barang/ Komoditi (US \$)	13,9% (USD 1,817,040, 007.27)	28,36 (USD 1.691.565.3 05,62)	40.96% (USD 1.857.61 0,40)	10,62% (USD 1.457.587. 407.84)	25,85%	SR

Sumber Data: Dinas Koperindag Kabupaten Gresik Tahun 2020

Setiap aktivitas ekspor dalam perdagangan memiliki suatu nilai yang disebut nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor Barang/Komoditi pada Tahun 2019 mencapai US\$1.691.565.305.62 mengalami peningkatan sebesar 28,36% dibandingkan tahun dasar sebesar US\$1.317.863.550,00.

Pada tahun 2020, nilai ekspor barang/komoditi mencapai US\$ 1.457.587.407.84 mengalami peningkatan sebesar 10,62% dibandingkan dengan tahun dasar sebesar US\$1.317.863.550,00. Meskipun mengalami peningkatan, secara *year on year*, nilai ekspor Barang/Komoditi masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya atau mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19.

5) Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp130.900.550 realisasi sebesar Rp 130.842.550 atau 99,95%, tidak terserap sebesar Rp 58.000 disebabkan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2020 dengan sasaran **"Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan"** sebagaimana berikut:

Tabel 3.31
Capaian Sasaran Urusan Perindustrian Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	0,84% (7.207 IMKM)	0.94% (7.275 IMKM)	0.95% (7.331 IMKM)	0.95% 7.331 IMKM	100%	ST

Sumber Data: Dinas Koperindag Kabupaten Gresik Tahun 2020

Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2020 mencapai 0,95% meningkat secara *year on year* dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,94%. Jumlah industri mikro kecil dan menengah pada tahun 2020 mencapai 7.331 meningkat 56 IMKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7.275 IMKM.

3.2.4 Urusan Penunjang

1) Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Urusan Sekretariat dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah** melalui 17 program yang terdiri dari 97 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp84.262.015.097 dengan realisasi Rp 78.564.188.050, tidak terserap sebesar Rp5.697.827.047 disebabkan karena efisiensi sebesar Rp

5.412.442.497 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp285.384.550 karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid 19.

Capaian indikator kinerja Urusan Sekretariat pada tahun 2020 dengan sasaran “**Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**” dapat ditunjukkan oleh nilai survey kepuasan masyarakat yang menggambarkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta dari nilai predikat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sebagaimana berikut:

Tabel 3.32
Capaian Sasaran Urusan Sekretariat Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90,16	87,93	84,5	82,95	98,87	ST
2	Predikat AKIP Daerah	A 80.12	A 80.69	A	A	100	ST

Sumber Data: Bagian Ortala Setda Kabupaten Gresik Tahun 2020

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2020 Kabupaten Gresik disetimasikan kembali mempertahankan predikat A dari Kementerian PAN RB. Nilai Predikat AKIP Tahun 2020 disetimasikan kembali meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan nilai 80,69 dan tahun 2018 dengan nilai 80,12.

Nilai survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Gresik justru mengalami penurunan setiap tahunnya namun dengan intrepetasi baik. Pada tahun 2020 nilai survey rata-rata kepuasan masyarakat mencapai nilai 82,95 atau 98,87% dari target 2020 dengan nilai 84,50. Pada peralihan tahun 2018 ke 2019, nilai survey kepuasan masyarakat mengalami penurunan nilai hingga -2,5%, selanjutnya diikuti penurunan kembali dari tahun 2019 ke 2020 hingga -5,7%. Berikut merupakan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2019 – 2020 :

Tabel 3.33
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Instansi Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2019 - 2020

NO	OPD	NILAI SKM 2019	NILAI SKM 2020	KINERJA PELAYANAN 2020	
1	BPPKAD	93,72	79,58	↓	Baik
2	DINAS SOSIAL	96,46	80,72	↓	Baik
3	DINAS PERTANIAN	86,04	82,34	↓	Baik
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	84,75	86,72	↑	Baik
5	DINAS PERHUBUNGAN	92,97	72,61	↓	Baik
6	DINAS PU TR	65,57	86,33	↑	Baik
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	96,10	84,53	↓	Baik
8	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	75,16	84,17	↑	Baik
9	DINAS KB PP	80,60	86,33	↑	Baik
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	93,40	84,89	↓	Baik
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	80,79	82,39	↑	Baik
12	DINAS PARIWISATA	90,91	81,89	↓	Baik
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	88,72	91,10	↑	Sangat Baik
14	DINAS PERIKANAN	86,04	74,36	↓	Kurang Baik
15	DINAS TENAGA KERJA	95,62	81,81	↓	Baik
16	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDAG	85,89	83,25	↓	Baik
17	BKD	88,60	86,59	↓	Baik
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	76,69	89,44	↑	Sangat Baik
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88,00	66,81	↓	Kurang Baik
20	RSUD IBNU SINA	77,70	73,61	↓	Kurang Baik
21	BAPPEDA	92,60	86,00	↓	Baik
22	SATPOL PP	97,86	87,91	↓	Baik
23	BPBD	99,90	79,28	↓	Baik
24	KESBANGPOL	98,80	76,00	↓	Kurang Baik
25	DINAS PERTANAHAN	92,78	76,39	↓	Kurang Baik
26	UPT PUSK MANYAR	88,31	79,56	↓	Baik
27	UPT PUSK ALUN-ALUN	91,80	93,03	↑	Sangat Baik
28	UPT PUSK UJUNGPAKHAH	87,21	97,19	↑	Sangat Baik
29	UPT PUSK MENTARAS	93,30	79,17	↓	Baik
30	UPT PUSK MENGANTI	88,25	88,36	↑	Sangat Baik
31	UPT PUSK BUNGAH	81,62	92,33	↑	Sangat Baik
32	UPT PUSK DRIYOREJO	94,57	94,57	=	Sangat Baik
33	UPT PUSK SIDAYU	90,40	98,89	↑	Baik
34	UPT PUSK KEBOMAS	77,62	80,39	↑	Baik
35	UPT PUSK BENJENG	81,79	82,03	↑	Baik
36	UPT PUSK DUDUKSAMPEYAN	93,25	88,22	↓	Baik
37	UPT PUSK KESAMBEN KULON	98,80	91,94	↓	Sangat Baik

NO	OPD	NILAI SKM 2019	NILAI SKM 2020	KINERJA PELAYANAN 2020	
38	UPT PUSK SEKAPUK	85,20	88,01	↑	Baik
39	UPT PUSK WRINGINANOM	76,99	80,67	↑	Baik
40	UPT PUSK DUKUN	89,82	91,00	↑	Sangat Baik
41	UPT PUSK BALONGPANGGANG	85,88	83,17	↓	Baik
42	UPT PUSK CERME	83,97	79,83	↓	Baik
43	UPT PUSK PANCENG	77,30	77,28	↓	Baik
44	UPT PUSK NELAYAN	95,40	95,37	↓	Sangat Baik
45	UPT PUSK SEMBAYAT	81,30	82,20	↑	Baik
46	UPT PUSK METATU	93,50	76,81	↓	Baik
47	UPT PUSK DAPET	97,73	97,78	↑	Sangat Baik
48	UPT PUSK SLEMPIT	97,20	94,02	↓	Sangat Baik
49	UPT PUSK INDUSTRI	80,95	85,69	↑	Baik
50	UPT PUSK GENDING	88,46	88,69	↑	Sangat Baik
51	UPT PUSK KEPATIHAN	88,46	79,67	↓	Baik
52	KECAMATAN GRESIK	84,01	81,36	↓	Baik
53	KECAMATAN MANYAR	85,67	79,81	↓	Baik
54	KECAMATAN BALONGPANGGANG	81,23	80,53	↓	Baik
55	KECAMATAN CERME	87,61	90,83	↑	Sangat Baik
56	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	88,15	78,56	↓	Baik
57	KECAMATAN BENJENG	88,44	75,61	↓	Kurang Baik
58	KECAMATAN BUNGAH	84,93	79,33	↓	Baik
59	KECAMATAN KEBOMAS	92,20	75,72	↓	Kurang Baik
60	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	76,05	81,08	↑	Baik
61	KECAMATAN DRIYOREJO	86,54	83,47	↓	Baik
62	KECAMATAN MENGANTI	94,79	76,94	↓	Baik
63	KECAMATAN PANCENG	84,20	82,83	↓	Baik
64	KECAMATAN DUKUN	86,77	89,91	↑	Baik
65	KECAMATAN SIDAYU	98,79	85,03	↓	Baik
66	KECAMATAN KEDAMEAN	87,64	86,11	↓	Baik
67	KECAMATAN WRINGINANOM	89,21	80,53	↓	Baik
Rata-Rata		87,93	82,95	↓	Baik
Jumlah OPD Nilai SKM Kurang Baik		0	8		-
Jumlah OPD Nilai SKM Baik		12	46		-
Jumlah OPD Nilai SKM Sangat Baik		55	13		-
Total OPD		67	67		-

Berdasarkan data di atas, nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap Instansi Daerah Kabupaten Gresik 2020 mencapai 82,95 pada predikat mutu pelayanan B dengan interpretasi kinerja pelayanan BAIK. Kinerja pelayanan OPD dengan Nilai SKM Sangat BAIK sebanyak 55 pada tahun 2019 turun menjadi 13 pada tahun 2020. Maka demi mencegah penurunan nilai kepuasan masyarakat yang terjadi setiap tahun,

diperlukan adanya evaluasi pada mutu pelayanan dan kinerja pelayanan di setiap instansi yang mengalami penurunan khususnya pada instansi-instansi dengan nilai SKM Kurang Baik.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD melalui 6 program terdiri 41 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp64.490.211.000,00 realisasi sebesar Rp51.868.497.883,00 atau 80.43%, tidak terserap sebesar Rp12.621.713.117,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp12.548.999.617,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp.72.713.500,00. Capaian indikator kinerja urusan sekretariat pada tahun 2020 dengan sasaran **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah”**.

3) Perencanaan

Penyelenggaraan urusan perencanaan dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan melalui 6 program terdiri 32 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp6.168.800.785,00 realisasi sebesar Rp6.042.829.508,00 atau 97,96%, tidak terserap sebesar Rp125.971.277,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp62.097.877,00 sisa lelang sebesar Rp58.339.400,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp5.534.000,00. Capaian indikator kinerja urusan perencanaan pada tahun 2020 dengan sasaran **”Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah”** sebagaimana berikut:

Tabel 3.34
Capaian Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
				2020			
1	Nilai Pangripta	B	A	A	A	100	ST

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2020

Nilai Pangripta Kabupaten Gresik mencapai Predikat A dan menjadi 5 Kabupaten terbaik se-jawa Timur dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD) dan mendapat peringkat ke 41 dalam penganugerahan *Innovative Government Indeks (IGA)* dari 415 Kabupaten di Indonesia. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan didukung dengan berbagai pendekatan

inovatif antara lain: (1) Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif, (2) Pemanfaatan BOT Kolaborasi dan melibatkan mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata untuk dapat mengakses BOT Telegram tersebut dalam rangka pemutakhiran BDT,(4) Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif, (5) *Proses Cleansing* dalam rangka penyaluran JPS APBD Tahun 2020 untuk masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 (6) Pemetaan Progam dan Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, (7) Pendampingan Desa dalam rangka perencanaan dan penganggaran ke dalam aplikasi SIPD.

Nilai pangripta didukung oleh pencapaian progam yang dilakukan oleh Bappeda , diantaranya adalah Progam Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dalam pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD yang sesuai petunjuk teknis dan capaian progam RPJMD dengan nilai minimal 76%. Dari progam tersebut tercapai output dari kegiatan berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan Renja),2 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi, Buku Panduan Tata kelola New-Normal, Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026, 2 Naskah pendukung perencanaan lintas sektoral serta 12 kali Fasilitasi Partisipasi Planning.

4) Keuangan

Penyelenggaraan Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 10 Program dan 45 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.398.666.400,00. Dari target anggaran tahun 2020 yang disepakati, anggaran yang mampu terealisasi mencapai 81,95% atau sebesar Rp. 10.160.506.404,00. Tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 2.238.159.996,00 atau 18.05% dari target anggaran, sebagian besar dikarenakan efisiensi dan realokasi anggaran. Efisiensi tersebut diantaranya terjadi karena adanya pembatasan pelaksanaan dan koordinasi lintas daerah secara langsung serta adanya dampak pengalihan anggaran untuk keperluan penanganan Covid 19.

Capaian indikator kinerja urusan keuangan pada tahun 2020 dengan

sasaran **”Mewujudkan Kemandirian Daerah yang Didukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah”** dapat dilihat dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik :

Tabel 3.35
Capaian Sasaran Urusan Keuangan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian(%)	Nilai
				2020			
1	Rasio Kemandirian Fiskal	67,14%	67,22%	61%	69,43%	114%	ST

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2020 sebesar Rp 924.652.463.463,07 sedangkan realisasi dana perimbangan Rp 1.458.947.957.330,00. Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 69,43% meningkat 2,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 67,22% pada tahun 2019. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-75% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau ekstern termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

5) Inspektorat

Penyelenggaraan urusan inspektorat dilaksanakan oleh inspektorat melalui 8 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3,972,362,700 realisasi sebesar Rp 3,317,577,525 atau 83,516%, tidak terserap sebesar Rp 654,785,175 disebabkan karena efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan inspektorat pada tahun 2020 dengan sasaran **"Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.36
Capaian Sasaran Urusan Inspektorat Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
				2020			
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	ST

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2020

Dari audit internal yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2020 telah ditemukan sebanyak 41 temuan. Dari 41 temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD di lingkungan kabupaten Gresik. Terdapat sebanyak 759 temuan dari hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK. Dari 759 temuan tersebut yang telah ditindak lanjuti sebesar 566 temuan. Terdapat 31 aduan masyarakat yang seluruhnya dapat ditindak lanjuti. Sebanyak 57 perangkat daerah telah melaksanakan SPIP. Berdasarkan tindak lanjut audit, opini BPK pada tahun 2020 adalah wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian pemerintah kabupaten Gresik telah mendapatkannya selama lima tahun berturut-turut.

6) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah melalui 8 program terdiri 43 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.243.178.312,00 realisasi sebesar Rp4.236.280.710,00 atau 80,8%, tidak terserap sebesar Rp1.006.897.602,00 disebabkan sisa lelang sebesar Rp10.658.240,00, kemudian efisiensi sebesar Rp668.927.026,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp327.312.338,00. Capaian indikator kinerja urusan kepegawaian

serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2020 dengan sasaran **"Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah"** Sebagaimana berikut:

Tabel 3.37
Capaian Sasaran Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 s/d 2020

No	Indikator Sasaran	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
1	Indeks Profesionalitas ASN	90,57%	66%	81%	47%	58%	R

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020

Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebesar 47% dari skor maksimum (100). Pencapaian pada tahun tersebut ini ditunjang data meliputi :

1. Gap Kualifikasi (49,92%)
2. Gap Kompetensi (79,03%)
3. Gap Penilaian Kinerja (39,97%)
4. Hukuman Disiplin Terlapor (0%)

Dalam hal kompetensi ASN di lingkungan Kabupaten Gresik Gap Kompetensi cukup tinggi sebesar 79,03% hal ini dikarenakan IPASN hanya menghitung diklat selama 2 tahun terakhir, namun yang memiliki sertifikasi diklat dari tahun 2016 s.d tahun 2020 sebesar 93% dari total ASN sebanyak 7.240 orang. Selaras dengan Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar 92,89% dengan *output* yang dihasilkan berupa jumlah peserta Latsar dan Prajabatan PNS sebesar 80 orang, jumlah peserta Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 40 orang, dan Jumlah Peserta FGD dan Pengiriman Peserta Diklat/Workshop sebesar 25 orang. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik telah menempatkan pegawai yang sesuai dengan standar kompetensi sejumlah 815 orang dengan jumlah penempatan pegawai sebesar 1.022 atau sebesar 79,75% hal ini menunjukkan bahwa kualitas penataan SDM baik sehingga sasaran dapat tercapai. Beriringan dengan itu penilaian kinerja dinilai Sangat Baik hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan persentase jumlah ASN yang memiliki nilai SKP baik sebesar 100%.

7) Kecamatan

Penyelenggaraan urusan kecamatan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Kecamatan Gresik melalui 26 program terdiri 83 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.679.497.014 realisasi sebesar Rp 5.358.643.811 atau 61,73%, tidak terserap sebesar Rp3.320.853.203 disebabkan efisiensi sebesar Rp 109.013.903 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp3.211.839.300
2. Kecamatan Kebomas melalui 19 program terdiri 58 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 5.778.157.700 realisasi sebesar Rp3.018.928.245 atau 52.24%, tidak terserap sebesar Rp2.759.229.455 disebabkan efisiensi sebesar Rp 416.044.205 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp2.343.185.250.
3. Kecamatan Manyar melalui 8 program terdiri 35 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp886.742.650 realisasi sebesar Rp 873.443.270 atau 98.5%, tidak terserap sebesar Rp -13.299.380 disebabkan efisiensi.
4. Kecamatan Cerme melalui 8 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp834.651.914 realisasi sebesar Rp 809.049.662 atau 96,9%, tidak terserap sebesar Rp 25.602.252 disebabkan efisiensi.
5. Kecamatan Benjeng melalui 8 program terdiri 27 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp805.238.888 realisasi sebesar Rp795.712.049 atau 98.8%, tidak terserap sebesar Rp9.526.839 disebabkan efisiensi.
6. Kecamatan Balong Panggang melalui 8 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 806.565.688 realisasi sebesar Rp801.388.328 atau 99.35%, tidak terserap sebesar Rp5.177.360 disebabkan efisiensi.
7. Kecamatan Dudusampeyan melalui 9 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp780.297.133 realisasi sebesar

Rp695.820.290 atau 89,17%%, tidak terserap sebesar Rp84.476.843 disebabkan efisiensi.

8. Kecamatan Driyorejo melalui 8 program terdiri 30 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 672.504.924 realisasi sebesar Rp662.170.664 atau 98.46%, tidak terserap sebesar Rp10.334.260 disebabkan efisiensi.
9. Kecamatan Wringinanom melalui 9 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 755.046.067 realisasi sebesar Rp749.960.508 atau 99.32%, tidak terserap sebesar Rp-5.085.559 disebabkan efisiensi.
10. Kecamatan Kedamean melalui 8 program terdiri 32 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 757.502.800 realisasi sebesar Rp725.114.902 atau 98%, tidak terserap sebesar Rp10.038.902,64 disebabkan efisiensi.
11. Kecamatan Menganti melalui 8 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 768.246.059 realisasi sebesar Rp739.017.756 atau 96,19%, tidak terserap sebesar Rp29.228.303 disebabkan efisiensi.
12. Kecamatan Sidayu melalui 9 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp716.647.685 realisasi sebesar Rp705.486.649 atau 98.44%, tidak terserap sebesar Rp11.161.036 disebabkan efisiensi sebesar Rp4.311.036 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp6.850.000.
13. Kecamatan Ujung Pangkah melalui 8 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp756.313.250 realisasi sebesar Rp756.158.901 atau 99.98%, tidak terserap sebesar Rp154.349 disebabkan efisiensi.
14. Kecamatan Panceng melalui 9 program terdiri 32 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 776.308.855 realisasi sebesar Rp771.899.970 atau 99.43%, tidak terserap sebesar Rp4.408.885 disebabkan efisiensi.
15. Kecamatan Bungah melalui 8 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp814.376.86 realisasi sebesar Rp783.968.559

- atau 96.26%, tidak terserap sebesar Rp30.408.303 disebabkan efisiensi sebesar Rp 28.519.953 dan sisa lelang sebesar Rp1.888.350
16. Kecamatan Dukun melalui 8 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp757.570.300 realisasi sebesar Rp 749.220.300 atau 98.89%, tidak terserap sebesar Rp2.436.900,00 disebabkan efisiensi sebesar Rp8.350.000 .
 17. Kecamatan Sangkapura melalui 8 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 812.104.487 realisasi sebesar Rp 768.685.450 atau 94,65%%, tidak terserap sebesar Rp 43.419.037 disebabkan efisiensi.
 18. Kecamatan Tambak melalui 8 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp846.621.000 realisasi sebesar Rp806.260.297 atau 95,23%, tidak terserap sebesar Rp40.360.703 disebabkan efisiensi.

Pengukuran kinerja pada urusan kecamatan terintegrasi dengan sasaran pada urusan Kearsipan, Perpustakaan, dan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2020 terintegrasi pada sasaran **“Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik”**.

8) Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik melalui 4 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.405.790.718 realisasi sebesar Rp 1.245.533.974 atau 88,6%, tidak terserap sebesar Rp 160.256.744 disebabkan efisiensi. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terintegrasi dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu **“Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”**.

3.3 Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dimuat sebagaimana lampiran capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.38
Laporan Kinerja Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Gresik

NO	SKPD	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
BIDANG KESEHATAN						
1	Dinas Kesehatan	Pengadaan APD, BMHP, Alat, dan Obat-obatan (DID)	14.919.829.000,00	12.078.099.341,00	80,95	2.841.729.659,00
		Klaim RS Swasta dan Klinik	26.942.884.000,00	24.918.207.997,00	92,49	2.024.676.003,00
		Check Point PSBB	573.000.000,00	573.000.000,00	100,00	0,00
		Insentif tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Tenaga Non Kesehatan Puskesmas, Dinkes dan Gejos	20.390.000.000,00	14.131.362.169,00	69,31	6.258.637.831,00
		Medical <i>ChekUp</i> tenaga Kesehatan	69.900.000,00	16.865.000,00	24,13	53.035.000,00
		Jaminan Kesehatan dan Kegiatan Gejos	117.360.000,00	23.167.692,00	19,74	94.192.308,00
		Perabot/ perlengkapan rumah tangga Gejos	399.606.000,00	388.690.950,00	97,27	10.915.050,00
		Alkes, Aldok, dan BMHP	4.818.677.070,00	254.160.000,00	5,27	4.564.517.070,00
2	RSUD Ibnu Sina	Kuratif (APD, Obat, Rapid tes) dan Permakanan	5.726.000.000,00	2.848.003.791,00	49,74	2.877.996.209,00
		Makan Minum Pasien dan petugas	2.376.771.600,00	2.242.105.180,50	94,33	134.666.419,50
		Mesin PCR dan Alat Pendukungnya	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
3	BPBD	Penanganan Awal (Dinas Kesehatan)	998.309.550,00	922.878.521,00	92,44	75.431.029,00
		Penanganan Awal (RSUD)	450.492.510,00	329.699.782,00	73,19	120.792.728,00

NO	SKPD	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
		Penanganan Awal (BPBD)	1.051.197.940,00	1.049.233.255,00	99,81	1.964.685,00
		Penanganan Kedaruratan	8.611.600.000,00	4.273.102.832,00	49,62	4.338.497.168,00
4	Satpol PP	Social Distancing dan APD	579.565.000,00	479.565.000,00	82,75	100.000.000,00
		Pengamanan PSBB	4.835.000.000,00	4.364.373.430,00	90,27	470.626.570,00
		Pengamanan <i>Tracing</i>	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
5	HUMAS	Sosialisasi dan Informasi Covid-19	1.000.000.000,00	986.815.000,00	98,68	13.185.000,00
6	Dinas PUTR	Pembuatan Ruang Isolasi/ Ruang Sehat	2.500.000.000,00	2.467.730.404,66	98,71	32.269.595,34
7	Dispora	Biaya Listrik dan Air untuk Operasional Ruang Isolasi	305.000.000,00	60.909.034,00	19,97	244.090.966,00
		Kelengkapan Operasional Tempat Observasi dan Rehabilitasi Pasien Covid-19	831.551.720,00	816.910.000,00	98,24	14.641.720,00
8	Dinas Sosial	Kegiatan Operasional JPS	336.255.000,00	331.565.000,00	98,61	4.690.000,00
		Bantuan Permakanan	780.500.000,00		0,00	780.500.000,00
9	Inspektorat	pendampingan pengadaan Barjas Covid-19	571.200.000,00	36.765.637,00	6,44	534.434.363,00
10	Dinas Perhubungan	Pengamanan PSBB	282.500.000,00	227.500.000,00	80,53	55.000.000,00
11	Dinas Koperindag	Posko Pasar PSBB	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
12	Kecamatan	Posko PSBB dan New Normal	472.500.000,00	178.500.000,00	37,78	294.000.000,00
13	Dinas LH	Pengelolaan Limbah Infeksius (ruang observasi dan rehabilitasi Pasien Covid-19)	546.900.000,00	272.420.192,00	49,81	274.479.808,00

NO	SKPD	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Tempat Penampungan Limbah (ruang observasi dan rehabilitasi Pasien Covid-19)	94.400.000,00	94.400.000,00	100,00	0,00
Sub Total Bidang Kesehatan			105.144.999.390,00	78.930.030.208,16	75,07	26.214.969.181,84

Bantuan Sosial Safety Net / Jaring Pengaman Sosial						
1	Dinas Sosial	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial	208.800.000.000,00	198.891.000.000,00	95,25	9.909.000.000,00
Sub Total JPS			208.800.000.000,00	198.891.000.000,00	95,25	9.909.000.000,00
Penanganan Dampak Ekonomi						
1	Belanja BK	Pemulihan Ekonomi Nasional	45.372.106.000,00	45.372.106.000,00	100,00	0,00
Sub Total Dampak Ekonomi			45.372.106.000,00	45.372.106.000,00	100,00	0,00
Total BTL Covid-19			359.317.105.390,00	323.193.136.208,16	89,95	36.123.969.181,84

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Capaian kinerja tugas pembantuan dan penugasan Tahun anggaran 2020 didelegasikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana SP DIPA - 032.07.4.059041/2020 tanggal 12 November 2019. Berikut rincian kegiatan tugas pembantuan tahun 2020:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020

No		Program/Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Keluaran	Anggaran	Realisasi
1		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT			
1	1	Keg. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Lahan Garam Yang difasilitasi	1.016.532.000	846.138.218
1	2	Rincian Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat Rincian : Pelayanan Umum,Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	386.560.000	310.072.200
Jumlah				1.403.092.000	1.156.210.418

Realisasi Capaian Kegiatan Tugas Pembantuan tercapai 100% dengan capaian kegiatan meliputi Pengadaan Sarana dan Prasarana Satker, Pengerjaan Saluran/ jalan Produksi serta Layanan Dukungan Manajemen Satker. Adapun Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.156.210.418 atau 82,4% dari Total Anggaran Rp1.403.092.000

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga

sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

1. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
3. Kerjasama investasi; dan
4. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan urusan pemerintahan sebagaimana perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan pihak ketiga sebagaimana berikut:

01 Kegiatan	:	Dokumen Kesepahaman antara Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jendral SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang energi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur SDA untuk mendukung Penyediaan Air Baku dan Pengembangan Jaringan Irigasi Hortikultura di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Direktorat Jendral SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor Perjanjian Kerjasama	:	HK.02.01-AN/01 180/2/437.12/2020
Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
02 Kegiatan	:	Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

		Bupati Gresik Tahun 2020
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/3/437.12/2020 001/k.93-06/HK/02.00/1/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
03	Kegiatan	: Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gresik Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/4/437.12/2020 04/ku.07-SPJ/3525/KPU-Kab/1/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
04	Kegiatan	: Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/5/437.12/2020 678/KTR/VII-13/2019
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Kesehatan
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
05	Kegiatan	: Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Cabang Gresik tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka
	Pihak Ketiga yang	: PT. Bank Rakyat Indonesia

	bekerjasama	(Persero) tbk Cabang Gresik
	Nomor Perjanjian	: 900/6/437.12/2020
	Kerjasama	B.988-kc/IX/Pem/III/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: BPPKAD
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
06	Kegiatan	: Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) tbk Cabang Gresik tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) tbk
	Nomor Perjanjian	: 900/7/437.12/2020
	Kerjasama	10/PKS/GRS.III/III/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: BPPKAD
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
07	Kegiatan	: Nota Kesepahaman Antara Oemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Smelting tentang Kegiatan Perawatan Rumput di Lapangan Utama Stadion Gelora Joko Samudra
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: PT Smelting
	Nomor Perjanjian	: 180/8/437.12/2020
	Kerjasama	SAD.394/01-6/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Sekretariat Daerah
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
08	Kegiatan	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kepolisian Resort Gresik Tentang Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dan Pengamanan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Kepolisian Resort Gresik
	Nomor Perjanjian	: 900/9/437.12/2020
	Kerjasama	B/580/VI/206.22/2020/Bagian
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Satpol PP Kabuaten Gresik

- 09 Lokasi : Kabupaten Gresik
- 09 Kegiatan : Addendum Kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik atas NPHD Nomor:180/24/437.12/2020 Nomor 006/K.97-06/HK.02.00/1/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pegawai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/10/437.71/2020 K.JI.06/HK.02.00/VI/2020
- Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Kantor Kesbangpol Kabupaten Gresik
- 10 Kegiatan : Kabupaten Gresik
- 10 : Addendum Kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik atas NPHD Nomor:180/25/437.12/2020, Nomor 845/KU.07.SPJ/3525/KPU.KAB/I/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian Kerjasama : 180/11/437.12/2020 KU.07.SPJ/3529/KPU.Kab/VI/2020
- Perangkat Daerah yang melaksanakan Lokasi : Kantor Kesbangpol
- 11 Kegiatan : Kabupaten Gresik
- 11 : Addendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik Atas Perjanjian Kerjasama Nomor:180/5/437.71/2020, nomor 078/KTR/VII.13/1219/Tentang

		Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang di Daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/12/437.12/2020 380/KTR/VII-1310720
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Dinas Kesehatan
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
12	Kegiatan	: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Muhammadiyah tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, jasa konsultansi, dan Bidang Bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pemerintah Kabupaten Gresik dan Universitas Muhammadiyah Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Universitas Muhammadiyah Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/13/437.12/2020 087/MOU/II.3.UMG/K/A/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Bappeda
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
13	Kegiatan	: Perjanjian Koerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk Cabang Gresik tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tbk Cabang Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/14/437.12/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: BPPKAD
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
14	Kegiatan	: Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2020
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian : 180/16/437.12/2020
- Kerjasama : KPTS/I/PIM.DPRD/VIII/2020
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : BPPKAD
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 15 Kegiatan : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian : 180/17/437.12/2020
- Kerjasama : KPTS/2/PIM.DPRD/VIII/2020
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : BPPKAD
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 16 Kegiatan : Perjanjian antara Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada Perumahan Griya Sumput Asri di Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pusat Koperasi Karyawan Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik
- Nomor Perjanjian : 072/tiga/IX/2020
- Kerjasama : 180/19/437.12/2020
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : Bappeda Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 17 Kegiatan : Perjanjian Antara PT. Tulen Graha Amerta dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pada Perumahan Pondok Alam Hijau Giri Asri di Desa Ngargosari Kecamatan Kabomas Kabupaten Gresik
- Pihak Ketiga yang : PT. Tulen Graha Amerta

- bekerjasama
 Nomor Perjanjian : 072/tigas/IX/2020
 Kerjasama : 180/19/437.12/2020
 Perangkat Daerah : Bappeda
 yang melaksanakan
 Lokasi : Kabupaten Gresik
- 18 Kegiatan : Notas Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tentang Kerjasama Bidang Pertanahan Melalui Pola Trijuang Di Jawa Timur
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Kantor Pertanahan Kabupaten
 Nomor Perjanjian : 180/20/437.12/2020
 Kerjasama : /perj.35.25/IX/2020
 Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik
 yang melaksanakan
 Lokasi : Kabupaten Gresik
- 19 Kegiatan : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Nomor Perjanjian : 180/21/437.12/2020
 Kerjasama : BPPKAD
 Perangkat Daerah : Kabupaten Gresik
 yang melaksanakan
 Lokasi : Kabupaten Gresik
- 20 Kegiatan : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Nomor Perjanjian : 180/22/437.12/2020
 Kerjasama : BPPKAD
 Perangkat Daerah : Kabupaten Gresik
 yang melaksanakan
 Lokasi : Kabupaten Gresik
- 21 Kegiatan : Perjanjian Antara Bunga Regency dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Penyerahan Prasarana,

		Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pada Perumahan Bunga Regency di Desa Dungus Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: Bunga Regency
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 004/SP/PSU/XI/2020 180/23/437.12/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Bappeda Kabupaten Gresik
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
22	Kegiatan	: Perjanjian Antara PT Inovatif Sukses Sejahtera dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang penyerahan Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pada Perumahan The Lotus Residence di Desa Sunegko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: PT Inovatif Sukses Sejahtera
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 180/24/437.12/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Bappeda
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
23	Kegiatan	: Perjanjian Antara PT Tirtajaya Graha Abadi dari Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pada Perumahan Swan Menganti Mas Regency di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	: PT Tirtajaya Graha Abadi dari Pemerintah Kabupaten
	Nomor Perjanjian Kerjasama	: 18/Tiga/XI/2020 180/25/437.12/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	: Bappeda
	Lokasi	: Kabupaten Gresik
24	Kegiatan	: Nota Kesepakatan Antara Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis SubSpesialis dan Dokter Gigi Spesialis

	Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Kementerian Kesehatan RI
	Nomor Perjanjian Kerjasama	:	180/26/437.12/2020
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	:	Dinas Kesehatan
	Lokasi	:	Kabupaten Gresik
25	Kegiatan	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Persatuan Wartawan Indonesia tentang Program Kerja Kegiatan dan Pengembangan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Gresik
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	Persatuan Wartawan Indonesia
	Nomor Perjanjian Kerjasama	:	900/27/437.12/2020 001/Peng.Prop
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	:	Bagian Humas Setda Kabupaten Gresik
	Lokasi	:	Kabupaten Gresik

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya

NIHIL

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun (APBD) 2020 berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2016-2021.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan atas ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2020 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya, sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik pada masa mendatang. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang telah baik.

Gresik, Maret 2020

BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.